

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU
1982 - 1992**

SKRIPSI



Oleh :

Jarcicius Suhirman

NIM : 88 214 074

NIRM : 88005201604120069

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1994**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU
1982 - 1992**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**

Oleh :

Jarcicius Suhirman

NIM : 88 214 074

NIRM 88005201604120069

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A
1994**

S K R I P S I

PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU
1982 - 1992

Oleh :

Jarcicius Suhirman

NIM : 88 214 074

NIRM : 88005201604120069

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal 30 April 1994

Pembimbing II



Drs. J.B.M. Mudjihardjo

Tanggal 30 April 1994

S K R I P S I

PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU
1982 - 1992

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Jarcicius Suhirman

NIM : 88 214 074

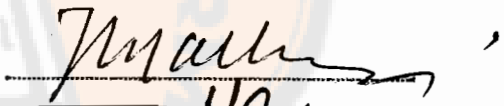

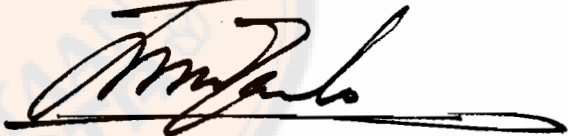
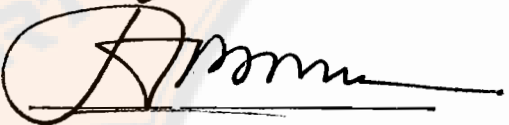
NIRM : 88005201604120069

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada Tanggal : 14 Mei 1994

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. J. Markiswo	
Sekretaris/Anggota	Drs. A. Kardiyat Wiharyanto	
Anggota	Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Anggota	Drs. J.B.M. Mudjihardjo	

Yogyakarta, 21/6/1994

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Priyono Marwan

DR. A. Priyono Marwan, S.J.

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada :

- Teristimewa Ibunda yang telah berpulang ketika penulis sedang KKN di tahun 1992 dan tak sempat membaca skripsi ini,
- Ayahnda yang sangat kucintai, adikku Antonius Parjiyono, FX.Sarjono, Valentina Yuliyanti dan Paulina Darini yang kusayang,
- Orang tua angkatku Bpk. Y.Supardi dan Ibu Munarti yang sangat saya hormati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Perkembangan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Kabupaten Sleman Pada Pemilu 1982-1992 " .

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi program Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Drs.G.Moedjanto, M.A. yang telah sudi memberi banyak bimbingan dan mengoreksi skripsi ini
2. Bapak Drs.J.B.M.Mudjihardjo yang dengan senang hati membimbing dan mendampingi penulisan skripsi ini
3. Bapak Drs.A.Kardiyat Wiharyanto yang bersedia turut dalam pengujian skripsi ini
4. Bapak Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sleman beserta stafnya
5. Bapak Ketua DPC PDI Kabupaten Sleman beserta stafnya yang telah memberikan data-data dan fasilitas lain yang berguna bagi penulis
6. Bapak Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Sleman beserta stafnya
7. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan di-

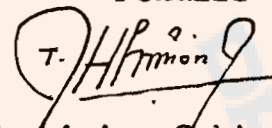
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sini yang telah banyak memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga saran-saran semua pihak akan sangat penulis harapkan.

Yogyakarta , 15 JUNI..... 1994

Penulis



Tarcicius Suhirman



DAFTAR ISI



HALAMAN	JUDUL	i
HALAMAN	PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN	PENGESAHAN	iii
HALAMAN	PERSEMBAHAN	iv
KATA	PENGANTAR	v
DAFTAR	ISI	vii
DAFTAR	TABEL	ix
ABSTRAK	x
BA B	I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah Dan Sistematika Pembahasan	7
	C. Tujuan Penulisan	9
	D. Landasan Teori	10
	E. Metode Penelitian	23
BA B	II PROSES TERBENTUKNYA PDI KABUPATEN SLEMAN....	25
	A. Terbentuknya PDI Tingkat Pusat	25
	B. Terbentuknya PDI DIY	33
	C. Terbentuknya PDI Kabupaten Sleman	37
BA B	III KONDISI SOSIO GEOGRAFIS KABUPATEN SLEMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PDI KABU- TEN SLEMAN	43
	A. Letak Dan Luas Wilayah	43
	B. Keadaan Tanah	47
	C. Kondisi Iklim	52
	D. Keadaan Penduduk	55

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB	IV	FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN PDI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU 1982 - 1992	62
	A.	Faktor Intern	63
		1. Tokoh Idola	63
		2. Kualitas Personel Partai	68
		3. Pengorganisasian Partai	74
		4. Materi Kampanye	81
	B.	Faktor Ekstern	82
		1. Sikap Pemerintah	82
		2. Kondisi Perpol Lain	85
BAB	V	PERANAN PDI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU 1982-1992	92
	A.	Peranan PDI Dalam Bidang Politik	95
	B.	Peranan PDI Dalam Bidang Ekonomi	101
	C.	Peranan PDI Dalam Bidang Sosial Budaya.....	104
BAB	VI	PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PDI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU 1982, 1987 DAN 1992	111
	A.	Tahap Persiapan	112
	B.	Pelaksanaan Kampanye	117
	C.	Perolehan Suara Dan Hasil Pemilu	121
	D.	Evaluasi terhadap Perkembangan PDI	129
BAB	VII	KESIMPULAN	133
		DAFTAR PUSTAKA	137
		DAFTAR INFORMAN	142
		LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 HASIL PEROLEHAN SUARA OPP PADA PEMILU 1982-1992 UNTUK DPRD IK II SLEMAN	63
TABEL 2 REKAPITULASI HASIL PEMILU 1982	122
TABEL 3 REKAPITULASI HASIL PEMILU 1987	124
TABEL 4 REKAPITULASI HASIL PEMILU 1992	126
TABEL 5 HASIL PEROLEHAN SUARA PDI PER KECAMATAN PADA PEMILU 1982, 1987 DAN 1992 DI SLEMAN	128

ABSTRAK

Skripsi " Perkembangan PDI Di Kabupaten Sleman Pada Pemilu 1982-1992 " ini memuat permasalahan yaitu: bagaimana proses terbentuknya PDI Sleman ? bagaimana kondisi sosio geografis Sleman berpengaruh terhadap perkembangan PDI Sleman? faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan PDI Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 ? bagaimana peranan PDI Sleman terhadap kehidupan demokrasi di Sleman ? serta bagaimana perbandingan perkembangan PDI Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 ? .

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami perkembangan PDI Sleman pada pemilu 1982 - 1992. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh atau menemukan sumber-sumber primer . Sedangkan penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh sumber-sumber sekunder.

Melalui metode penelitian ini kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan. Pertama, proses terbentuknya PDI Sleman berlangsung melalui tiga tahap yakni: (1) Tahap pendekatan secara organisatoris. Tahap ini berlangsung antara minggu terakhir bulan Januari - minggu pertama bulan Pebruari 1973. Tujuannya untuk menciptakan suasana keakraban antar pengurus partai sebelum diadakan musyawarah fusi. (2) Musyawarah fusi, berlangsung pada pertengahan bulan Pebruari 1973 di rumah almarhum Sawabi Siswodyono di dusun Mulungan, Sendang Adi , Mlati, Sleman, Yogyakarta . Musyawarah dihadiri wakil-wakil dari PNI, Parkindo, Partai Katolik. Sedangkan IPKI dan Partai Murba tidak pernah hadir dalam proses fusi PDI Sleman. Dan tahap ke (3) secara formal pengurus PDI Sleman yang terbentuk dalam musyawarah fusi melaporkan ke Kodim 0732 Sleman dan ke pusat pada akhir bulan Pebruari 1973 .

Kedua, perkembangan PDI Sleman juga didukung oleh kondisi sosio geografis Sleman, terutama keterlibatan PDI Sleman dalam memanfaatkan potensi sosio geografis seperti: letak dan luas Kabupaten Sleman yang strategis, kondisi tanah Kabupaten

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sleman yang sebagian besar subur, pemanfaatan iklim dalam memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah demi terwujudnya kesejahteraan, serta kondisi masyarakat Sleman yang semakin tumbuh dan terbina " kebebasannya " sebagai pengaruh alami atas banyaknya lembaga pendidikan menengah maupun tinggi dan arus komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat sangat menentukan perkembangan PDI Sleman pada pemilu 1982-1992.

Ketiga, bila ditinjau dari sudut organisasinya PDI Sleman berkembang karena dua faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern seperti pemanfaatan tokoh idola yaitu " figur Sukarno " dengan memanfaatkan anggota keluarganya dalam setiap kampanye menjadi salah satu penentu perkembangan PDI Sleman. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kualitas personel partai, yakni tingkat pendidikan personel, senioritas personel dan kemampuan informal personel kenyataannya juga menentukan terhadap perkembangan PDI Sleman. Sedangkan pengorganisasian yang meliputi penggalian dana, kaderisasi dan rekrutasi serta pemeliharaan komunikasi vertikal dan horisontal yang baik ditambah materi kampanye yang mengutamakan pendekatan pada masyarakat kecil menjadi salah satu faktor berkembangnya PDI Sleman pada pemilu 1982-1992. Sedangkan faktor ekstern seperti sikap pemerintah yang semakin baik, lunak, jujur dan netral terhadap OPP serta situasi konflik intern PPP yang membawa NU keluar dari PPP tahun 1984 membawa akibat " penggembosan " terhadap partai ini pada pemilu 1987 dan naiknya PDI pada pemilu 1987 dan pemilu 1992.

Keempat, peranan PDI Sleman dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya merupakan keterlibatan PDI Sleman dalam kehidupan demokrasi di Sleman. Dan yang terakhir, yakni bila dibandingkan dari segi persiapan, pelaksanaan kampanye dan hasil pemilunya, PDI Sleman dari pemilu 1982-1992 menunjukkan adanya kemajuan. Salah satu segi yang mudah diamati yaitu naiknya jumlah suara dan kursi pada pemilu tersebut. Pemilu 1982 PDI Sleman memperoleh 58.780 suara dan 5 kursi di DPRD Sleman, pemilu 1987 memperoleh 62.345 dan 6 kursi di DPRD Sleman, pemilu 1992 memperoleh 92.466 suara dan menempatkan 8 wakilnya di DPRD Sleman. Inilah sebagian fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa PDI Sleman pada pemilu 1982-1992 mengalami perkembangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dalam proses perkembangannya Indonesia mengalami dinamika dan transformasi di semua sektor pembangunan termasuk pembangunan di bidang politik. Pembangunan politik patut mendapatkan perhatian kita, karena masyarakat terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Proses perkembangan dengan dinamikanya merupakan proses kehidupan, pendewasaan dan pengembangan identitas diri untuk merealisasikan tujuan nasional.

Pembangunan politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, yang dipandang sebagai wahana bagi aspek pembangunan lainnya.¹⁾ Secara empiris proses pembangunan biasanya dapat dilaksanakan melalui wadah sistem politik atau organisasi politik, sebab organisasi politiklah yang dianggap dapat merubah nasib atau hidup rakyat.²⁾ Sebab organisasi politik adalah alat utama untuk memperjuangkan kebebasan, mewujudkan demokrasi dan sebagai penyalur seluruh aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Di Indonesia partai politik (parpol) sebenarnya telah ada sejak masa kolonialisme. Namun baru mencapai perkembangan setelah Indonesia merdeka, yakni dengan dikeluarkannya Dekrit Pemerintah tanggal 3 November 1945 atas usul Badan Pekerja Ko-

¹ Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed), Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1988) hlm. 6

² H.Mangkubumi, Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia (Yogyakarta: Mitra Cerna Widya, 1989) hlm. 34

mite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) . Dekrit tersebut menyatakan bahwa pemerintah beruntung dengan berdirinya partai-partai politik, sebab dengan adanya parpol seluruh aspirasi yang ditemukan dalam masyarakat dapat disalurkan dalam suatu saat yang teratur. Dekrit itu lebih jauh juga menuntut kepada parpol agar memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan negara.³⁾ Maka sejak dikeluarkannya dekrit tersebut berlomba-lombalah setiap kelompok mendirikan partai politik yang pada umumnya merupakan kelanjutan dari organisasi sosial-politik yang sudah terbentuk baik pada masa kolonial Belanda maupun masa pendudukan Jepang.

Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai salah satu organisasi kekuatan sosial-politik yang lahir dari proses pembaharuan struktur politik Orde Baru (Orba) pasca "66" tidak terlepas dari hasil refleksi pengalaman masa lampau yang diwarnai oleh berbagai gejolak politik. Selama Indonesia merdeka (1945) sampai dengan periode pemerintahan Orde Lama atau Orla (1967) tidak kurang dari 25 buah kabinet yang memerintah di Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Kemudian terdapat 12 kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan dan 6 buah kabinet yang hanya dapat bertahan diantara 1 sampai 4 bulan.⁴⁾ Demikianlah salah satu gambaran dari ketidakstabilan politik pra-Orba, yakni dilihat dari kesempatan yang tersedia bagi setiap

³ Soedjatnoko, " The Role of Political Parties In Indonesia ", dalam: P.W. Tayer (ed), Nationalism and Progress in Free Asia (Baltimore: The John Hopkin Press, 1956) hlm. 130

⁴ Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1981) hlm. 1

pemerintah (kabinet) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dike lupinya.

Masa Demokrasi Liberali dengan sisten pemerintahan yang berlaku saat itu, yakni sisten pemerintahan parlementer, memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh suburnya partai-partai politik di Indonesia. Sebagai akibat dari besarnya jumlah perpol pada waktu itu sering kali timbul konflik diantara perpol-perpol itu, yang pada dasarnya sebagai perwujudan dari adanya pertentangan ideologi yang diwakili oleh golongan yang mendukung ideologi golongan agama, golongan yang mendukung ideologi kebangsaan dan golongan yang mendukung ideologi Marxisme. Herbert Feith menggolongkan kedalam pertentangan yang diakibatkan oleh adanya lima aliran politik yang ada pada waktu itu, yakni aliran politik yang diwakili oleh agama Islam, paham Nasionalisme Radikal, Komunisme, Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokretis.⁵⁾

Pertumbuhan sisten kepartaian liberali dengan peran parlemen yang sangat penting (parlemen menentukan nasib pemerintahan, dengan demikian menentukan pula hidup matinya kabinet) tampaknya ikut serta mendorong berkerbangnya proses perbedaan pandangan ideologis, terutama karena kehidupan partai amat tergantung atau ditentukan oleh tokoh-tokoh dan aliran ideologinya. Dengan demikian tumbuh kecenderungan untuk mengembangkan orientasi kepada ideologi masing-masing yang dapat bersifat keagamaan, kebangsaan dan Marxisme.

Dengan demikian, sisten multi partai yang ada pada masa

⁵ Herbert Feith, " Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar ", dalam: Miriam Rudianjo (ed), Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta : Gramedia, 1981) hlm. 215

Demokrasi Liberal mempunyai implikasi yang kuat bagi kehidupan politik Indonesia. Parpol menjadi pusat aktivitas politik terpenting dan eksekutif hanya merupakan perpanjangan tangan dari parpol sebagai akibat dari penerapan sistem parlementer. Benturan kepentingan dan ideologi diantara partai-partai politik menyebabkan rapuhnya eksekutif oleh karena kabinet tidak mampu menyelesaikan programnya.⁶⁾ Instabilitas politik itu menyebabkan rapuhnya sistem politik dan menyebabkan munculnya keyakinan diantara pemimpin Indonesia untuk mengadakan strukturisasi politik. Kenyataan ini terbukti dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang sekaligus menandai berlangsungnya sistem demokrasi terpimpin.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terbukalah jalan bagi Presiden Sukarno untuk merealisasikan idenya menolak Demokrasi Liberal yang dinilai tidak sesuai dengan sifat dan jiwa bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik dan tidak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan untuk membangun.⁷⁾ Sebagaimana dutarakan Donald Wilhelm bahwa dalam kritiknya terhadap Demokrasi Terpimpin, Sukarno menyatakan bahwa demokrasi yang didambakan Indonesia bukanlah Demokrasi Liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat, namun yang diinginkan Indonesia adalah suatu Demokrasi Terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan.⁸⁾ Atas

⁶ Lihat Herbert Feith, dalam " Dialog " Prisma, No. 7 Agustus 1973, hlm. 46

⁷ Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm. 140. Lihat juga John D. Legge, Sukarno Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hlm. 325

⁸ Rusli Karim, ibid., hlm. 141

dasar itu periode ini lazim disebut sebagai periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Penerapan sistem Demokrasi Terpimpin secara ideal ditujukan untuk membenahi berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal, dan menurut Herbert Feith paling tidak dapat membenahi 50% dari masalah yang terdapat pada masa itu. Sekalipun demikian, sistem ini gagal mengadakan restrukturisasi politik, terutama sejak munculnya polarisasi baru sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sukarno atau PKI.⁹⁾

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno menyampaikan pidato kenegaraan. Pidato itu disebut sebagai penjelasan resmi yang lebih terurai mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kemudian dinyatakan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia, yang didalamnya diuraikan lima kebijaksanaan: kembali ke UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Manifesto Politik dengan lima kebijaksanaan ini kemudian dikenal dengan MANIPOL - USDEK.¹⁰⁾

Presiden Sukarno kemudian membentuk Front Nasional pada tanggal 31 Desember 1959, dan dengan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 Front Nasional diwujudkan.¹¹⁾ Berkaitan dengan itu dikembangkan pemikiran Presiden Sukarno mengenai Nasakom, yakni terhimpunnya Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Gagasan me-

⁹ Herbert Feith, op.cit. hlm. 42-43

¹⁰ Sekretariat Negara, 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid II, hlm. 149

¹¹ Ibid. hlm. 15

ngenan Nasakom itu memberi peluang yang besar bagi PKI untuk mengembangkan diri secara pesat. Titik balik perkembangan PKI terjadi ketika mereka gagal mengadakan cup melalui gerakan 30 September 1965, setelah pada tanggal 1 Oktober 1965 Letnan Jendral Suharto berhasil mencausainya. Titik balik itu men - capai bentuknya yang radikal ketika rakyat melakukan pemben - taian terhadap pengikut PKI.

Hancurnya PKI tahun 1965 dan berakhirnya kekuasaan Pre - siden Sukarno secara konstitusional pada tahun 1967, serta me - rosotnya perpol-perpol pada masa pemerintahan Demokrasi Ter - pimpin menempatkan Angkatan Bersenjata (Angkatan Darat) se - bagai kekuatan politik utama.¹²⁾ Anggepan di kalangan militer yang berlaku terhadap partai politik pada awal terbentuknya pemerintahan Orde adalah bahwa partai merupakan perwujudan da - ri mesin pelindung kepentingan segolongan masyarakat dan oleh karena itu mengesampingkan kepentingan nasional serta sulit untuk melaksanakan tujuan-tujuan nasional, yakni orientasi pa - da pembangunan dan modernisasi.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa di satu sisi nada sejarah yang telah dilakukan oleh partai politik dimasa lalu telah memperkuat keyakinan elite baru pasca " 66 " untuk mengadakan restrukturisasi politik. Di sisi lain pilih - an strategi pembangunan nasional untuk merebut legitimsi mengharuskan elite Orde untuk mengadakan restrukturisasi poli - tik guna mencapai stabilitas politik. Dalam konteks seperti inilah dilaksanakan kebijaksanaan penyederhanaan sitem kepar -

¹² Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm. 449

taian. Salah satu partai politik yang dibentuk pemerintah Orde adaleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973 yang merupakan partai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (INI), Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Dalam perkembangannya ternyata PDI selama Milenium konflik intern. Hal ini menyebabkan rusaknya mekanisme kehidupan partai. Salah satu akibat yang dirasakan adalah lemahnya koordinasi mekanisme kepemimpinan pengurus pusat terhadap nasib perkembangan partai itu di daerah-daerah, karena pengurus pusat selalu disibukan oleh kemelut antar mereka sendiri. Dalam konteks demikian, bagaimana nasib perkembangan partai itu di daerah-daerah?. Skripsi ini berusaha menelusuri perkembangan partai itu di tingkat daerah, dalam hal ini adalah PDI di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

B. Araasan Masalah Dan Sistematika Pembahasan

Masalah utama yang menjadi pokok pembahasan uraian ini adalah perkembangan PDI di Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 1982-1992. Masalah ini dibagi dalam masalah-masalah khusus yaitu :

1. Bagaimana proses terbentuknya PDI Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman berpengaruh terhadap perkembangan PDI Kabupaten Sleman ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 ?

4. Bagaimana peranan PDI Kabupaten Sleman terhadap kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992 ?
5. Bagaimana perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 ?

Jawaban atas masalah-masalah tersebut dibagi dalam beberapa bab berikut ini. Dalam bab II akan diuraikan bagaimana terbentuknya PDI Kabupaten Sleman. Dalam uraian ini dibagi dalam tiga sub bab yakni: terbentuknya PDI tingkat pusat, terbentuknya PDI DIY dan terbentuknya PDI Kabupaten Sleman.

Dalam bab III akan diuraikan bagaimana kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman seperti: letak dan luas wilayah, keadaan tanah, kondisi iklim dan keadaan penduduk, berpengaruh terhadap perkembangan PDI di Kabupaten Sleman.

Dalam bab IV akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu tahun 1982 - 1992. Dalam uraian ini akan dijelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan PDI Kabupaten Sleman yaitu: faktor intern yang meliputi tokoh idola, kualitas personal partai, pengorganisasian partai serta materi kampanye. Sedangkan faktor eksternnya meliputi: sikap pemerintah pada pemilu 1982-1992 serta kondisi partai lain saat itu.

Dalam bab V akan membahas bagaimana peranan PDI dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman. Uraian bab ini dibagi dalam beberapa sub bab berikut ini yaitu: peranan PDI dalam bidang politik, peranan PDI dalam bidang ekonomi, peranan PDI dalam bidang sosial budaya.

Dalam bab VI akan membahas perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman antara pemilu 1982, pemilu 1987 dan pe-

milu 1992. Hal itu untuk mengetahui apakah dalam pemilu itu terjadi perbedaan yang menyolok apabila dilihat dari segi persiapan, kampanye dan hasil pemilu itu sendiri. Semua itu apakah mengalami peningkatan atau penurunan sehingga dapat memberi gambaran apabila diadakan evaluasi terhadap PDI. Sedangkan bab VII sebagai bab yang terakhir adalah berisi kesimpulan.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perkembangan atau dinamika PDI di Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, pemilu 1987 dan pemilu 1992.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana PDI Kabupaten Sleman terbentuk.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman berpengaruh terhadap perkembangan PDI.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan PDI di Kabupaten Sleman dalam pemilu tahun 1982-1992.
- 4) Untuk mengetahui peranan apa yang diberikan PDI Kabupaten Sleman terhadap kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman.
- 5) Untuk mengetahui perbandingan perkembangan PDI di Kabupaten Sleman pada pemilu tahun 1982, tahun 1987 dan pemilu tahun 1992.

D. Landsan Teori

Pembahasan mengenai suatu peristiwa atau masalah yang terjadi di tingkat nasional yang selanjutnya mengkhususkan pada suatu peristiwa atau masalah di tingkat lokal, mungkin sudah banyak orang yang meneliti dan menuliskannya. Tetapi melihat realitas yang ada hingga sekarang, belum ada studi yang mendalam tentang keikutsertaan masyarakat Kabupaten Sleman dalam bidang politik pada pemilu tahun 1982-1992. Untuk itu saya mencoba memberanikan diri melakukan penelitian mengenai perkembangan PDI di Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992. Hal ini diilhami pendapat Harry Benda yang menyarankan mahasiswa-mahasiswinya untuk banyak mempelajari sejarah lokal dalam rangka memahami sejarah yang lebih besar atau luas.¹³⁾ Atau menurut Sartono Kartodirdjo penulisan sejarah lokal merupakan langkah yang strategis untuk menuju kepenulisan sejarah nasional.¹⁴⁾

Sebelum sampai pada pembahasan maka ada baiknya kalau penulis sampaikan terlebih dahulu arti perkembangan, arti partai politik dan arti organisasi. Menurut W.J.S.Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti perkembangan adalah sejajar dengan arti pertumbuhan. Oleh sebab itu karena keterbatasan penulis dalam mengartikan kata perkembangan dalam konteks politik, penulis meminjam arti perkembangan yang terdapat dalam kamus itu baru kemudian penulis

¹³ P. William Liddle, Pemilu Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta: LP3ES, 1992) hlm. 1

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, Metode dan Didaktik Sejarah, dalam: Lembaran Sejarah No. 9 (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM, 1974) hlm. 17

terapkan dalam konteks politik. Menurut beliau perkembangan adalah identik dengan pertumbuhan dimana arti pertumbuhan itu sendiri adalah suatu kemajuan atau hal keadaan tumbuh atau sesuatu yang menjadi sempurna.¹⁵⁾ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perkembangan adalah suatu proses dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik, seperti menjadi lebih besar, lebih banyak, lebih luas, lebih maju atau bahkan menuju kesempurnaan.

Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok itu adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum.¹⁶⁾ Sementara itu Undang-Undang No.3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya mengartikan partai politik adalah organisasi kekuatan sosial-politik yang merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia yaitu : (1) Dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. (2) Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini bernama Golongan Karya.¹⁷⁾

Partai politik lahir sebagai akibat meluasnya gagasan,

¹⁵ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka , 1967) hlm. 473 dan hlm. 1100

¹⁶ Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia , 1982) hlm. 160

¹⁷ " Undang-Undang No.3 Tahun 1985 Tentang Parpol Dan Golkar " , dalam: Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Undang-Undang Parpol dan Golkar (Yogyakarta: PDI DIY, tanpa tahun) hlm. 73

bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung diantara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Dengan demikian partai politik adalah menjadi penyalur dan tempat mengolah semua aspirasi yang ada dalam masyarakat menuju terciptanya tujuan yang dicita-citakan bersama.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik, seperti partai, kelompok penekan, duduk dalam lembaga politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dan lain-lain.

Menurut Soedjatmoko, pilihan seseorang terhadap partai politik diantara ketiga partai atau ide utama yang ada sekarang secara umum ditentukan oleh kondisi mental dan psikologis yang ada dalam suatu partai tertentu. Pilihan tertentu terhadap suatu partai melebihi lainnya dalam satu kategori partai sering ditentukan oleh simpati atau kesetiaan pribadi seseorang terhadap seorang pemimpin tertentu. Pada umumnya pemilihan ditentukan atau didasarkan pada dasar-dasar posisi khusus yang telah diambil oleh partai pada isu-isu politik tertentu.¹⁸⁾ Pendapat tersebut masih relevan juga pada sebagian masyarakat, namun sekarang lebih ditentukan untuk mencari kekuasaan dan prestise.

¹⁸ Soedjatmoko, op.cit., hlm. 133

Partisipasi politik seseorang / kelompok orang melalui parpol atau organisasi politik yang dipilihnya merupakan indikator adanya kesadaran dan kepercayaan seseorang atau kelompok orang terhadap parpol atau organisasi politik tertentu dalam menyalurkan dan mewujudkan aspirasi politiknya. Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi politik atau parpol sangat ditentukan oleh keberadaan organisasi politik atau partai politik yang ada.

Karena partai politik yang bernama PDI merupakan salah satu wujud organisasi, maka disini perlu juga dimengerti apa arti organisasi itu. Organisasi adalah suatu sistem saling mempengaruhi antar orang dalam bentuk kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹⁾ Dapat juga dikatakan suatu bentuk kerja sama dari anggota-anggotanya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama secara teratur dan kontinyu untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah tujuan bersama yang telah disepakati seluruh anggota dan biasanya dirumuskan serta dituangkan dalam peraturan-peraturan organisasi (AD dan ART).²⁰⁾

Sebagai suatu sistem yang mempunyai unsur yang saling berkeaitan, organisasi sesungguhnya merupakan suatu sistem yang terbuka. Organisasi memasukan sumber energi dari lingkungan sekitarnya berupa modal, material, informasi, sumber tenaga manusia (input). Masukan tadi diolah menjadi suatu hasil

¹⁹ Soetarto, Dasar Dasar Organisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981) hlm. 36

²⁰ Sukses Organisasi, dalam : Laporan BPP , Jakarta, tahun 1972, hlm. 1

produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (output) berupa barang atau jasa untuk digunakan oleh para konsumen. Para konsumen itu nantinya akan memberikan umpan balik yang berperan sebagai masukan dalam proses selanjutnya.²¹⁾

Mengacu pada pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa FDI Kabupaten Sleman yang hendak dibahas merupakan suatu " sistem ". Sistem adalah keterpaduan berbagai faktor (unsur) yang saling berhubungan dan saling tergantung yang terikat oleh asas-asas tertentu dalam pencapaian tujuan.²²⁾ Karena organisasi merupakan suatu sistem maka sistem tersebut selalu mengandung input, pengolahan (proses), output dan umpan balik. Input yaitu merupakan berbagai unsur yang dimasukkan untuk diolah. Dalam konteks politik input itu bisa berupa tuntutan maupun dukungan. Misalnya dalam suatu sistem politik berdasarkan perwakilan, dimana perwakilan merupakan norma politik yang penting, mungkin timbul tuntutan menyeimbangkan perwakilan diantara distrik-distrik pemilihan kota dan desa, tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin politik formal. Sedangkan yang berupa dukungan misalnya: memberikan suara yang mendukung pencalonan seseorang pemimpin dalam pemilu, mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang atau bisa juga berupa tingkah laku batiniah, sikapnya sikap setia. Pengolahan yaitu kegiatan mengubah input menjadi output. Output yaitu hasil yang diperoleh

²¹ Adem I. Indrawijaya, Perubahan dan Pengembangan Organisasi (Bandung: Sinar Baru, 1989) hlm. 22

²² Soetanto, op.cit., hlm. 303

dari pengolahan. Output dari sistem politik adalah berujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Dan umpan balik yaitu reaksi yang timbul dari lingkungan terhadap input, pengolahan atau output.²³⁾

Disamping harus dipahami sebagai suatu sistem, organisasi yang bernama PDI Kabupaten Sleman dalam pembahasannya juga dipahami sebagai organisme yang hidup. Berdasarkan pendekatan biologis, organisasi memiliki sifat-sifat umum yang sama dengan organisme hidup. Organisasi lahir, kemudian tumbuh, berkembang, mencapai puncak, mundur dan akhirnya mati serta bereaksi terhadap lingkungan. Demikian pula seperti manusia hidup, bagian-bagian dalam organisasi itu saling pengaruh satu sama lain. Apabila ada bagian yang tidak sehat akan dapat mempengaruhi ketidakehatan seluruh organisasi. Atas dasar pendekatan biologis Nochter Mas'ood dan Colin Mac Andrew menekankan bahwa hidup dan berkembangnya organisme sebagian adalah tergantung pada upayanya menanggapi keseluruhan lingkungannya yang berupa lingkungan sosial, biologis dan fisik.²⁴⁾ Oleh karena itu dalam tulisan ini pada bab tertentu akan ditonjolkan pembahasan bagaimana organisasi (PDI Kabupaten Sleman) menanggapi lingkungannya dalam hal ini kondisi sosio geografis setempat, demi perkembangan organisasi itu sendiri.

Suatu organisasi akan berhasil apabila manusia sebagai unsur pokok organisasi mampu menerapkan prinsip-prinsip organisasi sebagai sarana untuk dapat menciptakan keadaan yang dici-

²³ Nochter Mas'ood dan Colin Mac Andrew, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982) hlm. 9-11

²⁴ Ibid., hlm. 5

ta-citakan yaitu tujuan organisasi. Salah satu prinsip agar organisasi tetap eksis adalah terdapatnya tujuan yang jelas. Seperti dapat kita lihat pada Anggaran Dasar FDI Bab III, pasal 4 dikemukakan bahwa tujuan FDI adalah mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu: (1) Tegaknya kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis. (2) Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (3) Mengembangkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Demokrasi Pancasila,²⁵⁾ yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat memegang peranan yang menentukan atas dasar nilai-nilai Pancasila.

Telah dikemukakan di atas bahwa organisasi pada prinsipnya, merupakan kumpulan sekelompok orang yang saling bekerjasama (berkaitan) untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pada konsep itu maka Adam I. Indrawijaya mengemukakan bahwa persyaratan pokok dalam pengembangan organisasi adalah terletak pada manusianya, yaitu: (1) Kemampuan atau mutu manusia yang berorganisasi, (2) Kontinuitas koordinasi organisasi dan (3) Interaksi terhadap perubahan dan aktivitas dari dalam maupun luar.²⁶⁾ Berdasarkan pendapat Adam I. Indrawijaya tersebut, maka dapat ditelusuri bahwa ada dua faktor yang menentukan perkembangan organisasi, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor

²⁵ " Anggaran Dasar FDI ", dalam: Pancasila, UUD 1945 , Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FDI, Undang-Undang Parpol dan Golkar (Yogyakarta: FDI DIT, tanpa tahun) hlm. 17

²⁶ Adam I. Indrawijaya. op.cit., hlm. 24 - 25

interan dalam hal ini berupa kualitas atau mutu manusia yang berorganisasi dan koordinasi organisasi. Sedangkan faktor eksteralnya berupa interaksi atau tanggapan organisasi terhadap perubahan dan aktivitas dari luar organisasi.

Sementara itu menurut Sundarso, efektif tidaknya dan tercapai tidaknya tujuan organisasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti : (1) ciri organisasi, (2) ciri atau sifat lingkungannya, (3) ciri pekerja atau manusianya dan (4) kebijakan dan praktik manajemennya.²⁷⁾ Agar tujuan PDI Kabupaten Sleman dapat direalisasikan maka faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi harus dijabarkan, diseleksi dan diolah terus menerus sehingga memberikan hasil yang mendukung perkembangan PDI. Oleh karena itu untuk mengukur suatu perkembangan organisasi tertentu kita tidak bisa meninggalkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau terlibat dalam proses realisasi tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut ini dapat dikategorikan lagi menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi dan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar organisasi.

Berdasarkan konsep di atas faktor intern terdiri dari: ciri organisasi, ciri-pekerja (manusianya), kebijakan dan praktik manajemennya. Sedangkan faktor eksteralnya adalah ciri lingkungan atau kondisi lingkungan dimana organisasi tersebut hidup. Organisasi yang bernama PDI adalah organisasi yang bersifat terbuka dan merupakan salah satu organisasi sosial politik

²⁷⁾ Sundarso, Dasar-dasar Penelitian Kerja Ilmiah dan Metodologi Penelitian Administrasi dan Skripsi (Semarang: Pustaka Universitas Diponegoro, 1992) hlm. 7

yang hidup di Indonesia hingga sekarang. Disamping itu organisasi tersebut merupakan suatu kelompok manusia yang terorganisir dalam suatu sistem dan mempunyai tujuan yang jelas. Dimana kondisi manusia yang ada didalamnya sangat menentukan terhadap perkembangan maupun pencapaian tujuan organisasi. Seperti : tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, jabatan dalam organisasi serta dari unsur mana (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI atau Partai Murba) manusia yang terorganisir dalam PDI tersebut. Termasuk didalamnya bagaimana kondisi dana dan program kerja organisasi yang bersangkutan dikelola.

Dengan melihat faktor intern tersebut maka faktor-faktor ekstern seperti: kondisi geografis, komposisi penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, dukungan pemerintah, kehidupan partai pada umumnya, kondisi ekonomi masyarakat dan kebudayaan yang ada diperkirakan mampu mempengaruhi perkembangan atau kemajuan mundurnya suatu organisasi.

Keberhasilan PDI juga tidak bisa lepas dari sejumlah kondisi atau faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi keberhasilan tersebut, baik itu faktor intern atau faktor ekstern yang juga turut mempengaruhi performance dari partai itu sendiri. Faktor intern misalnya bagaimana kualitas personel, program politik, kepemimpinan serta pengorganisasian partai tersebut. Menurut banyak pengamat sejak kelahirannya, PDI pada umumnya dikenal sebagai partai yang selalu diandalkan kendati intern yang nampaknya tidak pernah terputus.²⁸⁾

²⁸ Genewati Wuryandari, "PDI dan Pemilu 1993", dalam : Jurnal Ilmu Politik No. 2 (AIFI - LIPI - Gramedia) tahun 1991, hlm. 57

Terjadi konflik di tingkat pimpinan, kemandirian partai, permasalahan identitas partai, konflik antar unsur dalam FDI dan lain sebagainya.

Namun senanjuk FDI dibawah kepemimpinan Suryadi ternyata membawa dampak yang positif bagi partai yang bersembangton kepala bentang ini. Citra partai dan kepercayaan rakyat terhadap partai ini pulih kembali, sebab dalam kepemimpinannya Suryadi mulai mengadakan pembenahan-pembenahan mengenai sebagian mekanisme organisasinya, misalnya dengan reorganisasinya FDI telah berhasil mengeluarkan peraturan baru yang dinilai dapat menaikkan citra "pendemokrasian" partai ini. Peraturan tersebut antara lain: (1) Penghapusan jabatan rangkap di lingkungan partai dimana seorang ketua dan sekretaris DPD FDI tidak diperkenankan menjadi anggota DPR. (2) Ketua dan sekretaris DPC FDI tidak diperbolehkan menjadi anggota DPR D. (3) Jabatan anggota DPR dibatasi maksimal dua periode yang berlaku surut terhitung sejak hasil pemilu tahun 1977.²⁰

Segera setelah melaksanakan konsolidasi, FDI mulai membuat strategi-strategi baru yang bersifat eksternal seperti rekrutmen terhadap kaum wanita, kaum muda, mahasiswa, pelajar, golongan ekonomi lemah, pengusaha, warganegara keturunan asing (Cina), perbaikan tema dan materi kampanye, mengadakan kursus-kursus kader dan lain sebagainya. Faktor eksternal inilah yang sangat melibatkan hasilnya hingga mampu membuat bentuk terhadap penampilan partai itu sendiri.

²⁰ Ibid., hlm. 50

Disamping itu masih perlu dicatat bahwa keberhasilan PDI juga sebagai akibat adanya kondisi sedemikian rupa di Kabupaten Sleman yang mendukung PDI Kabupaten Sleman berkembang. Misalnya semakin meratanya tingkat pendidikan, meningkatnya taraf hidup rakyat, sikap pemerintah, kehidupan parpol di Kabupaten Sleman yang semakin baik, mulai menjaknya cendekiawan dan kaum rohani campur dalam politik praktis. Sebagaimana dikemukakan Durhan Magenda bahwa parpol yang mulai berkembang ke arah yang lebih independen akan merekrut para cendekiawan. Dari upaya rekrutmen itu terjadi proses dialogis antara cendekiawan dan parpol. Kondisinya akan lebih jelek kalau tidak ada cendekiawan yang mau masuk ke parpol, sebab kita harus mengisi posisi-posisi dimana dibutuhkan pikiran-pikiran jernih. Selain cendekiawan, ada kecenderungan para penguasa juga terjun kearah politik praktis.³⁰⁾

Selain faktor-faktor di atas faktor lingkungan dimana partai politik itu hidup setidaknya-bila-banyak juga ikut memengaruhi perkembangan / dinamika partai politik di suatu tempat, atau paling tidak lingkungan akan sanggup memberi bentuk kelompok-kelompok politik yang ada. Seperti dikemukakan Soedjatnoko bahwa: "Letak geografis Indonesia yang merupakan kesatuan kepulauan yang berjumlah sekitar 7000 pulau dengan sarana komunikasi yang belum memadai mengakibatkan perbualan yang sangat singkat politik rakyat. Letak geografis tersebut telah membawa perubahan tindakan politik antar daerah dan lembaran

³⁰ Durhan Magenda (ed), Siksp Politik Tiga Kontestan (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992) hlm. 58

juga membedakan kerangka teori".³¹⁾ Dengan demikian faktor intern maupun ekstern perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menganalisis terhadap perkembangan PDI serta peranan dan strukturnya terhadap kehidupan demokrasi di Kabupaten Siemang.

Personian seperti itu perlu dipahami oleh pemimpin-pemimpin partai, anggota partai maupun oleh simpatisannya, sebab tugas utama parpol adalah untuk memaksimalkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses politik. Untuk itu parpol harus melebarkan jaring-jaringnya di masyarakat dalam rangka untuk terus-menerus memonitor keinginan-keinginan serta kepentingan mereka. Jaring-jaring tersebut bisa berbentuk organisasi massa.

Dalam kenyataannya parpol secara tidak resmi memiliki wilayah-wilayah tertentu dimana palangannya tetapnya berkumpul. Dan ini berfungsi sebagai basis untuk sedikit demi sedikit merebut "wilayah pasar" dan secara berkesinambungan menyempitkan ruang gerak parpol yang lain untuk mendapatkan kondite politik yaitu suara dalam pemilu.³²⁾ Dengan demikian kehidupan politik yang demokratis tidak sekedar dicirikan dengan partai dan jumlah partai tertentu, tetapi yang lebih penting terdapat atau tidaknya kompetisi diantara partai yang ada.³³⁾ Hal ini mengacu pada pendapat Seymour Martin

³¹ Soedjatmoko, op.cit., hlm. 135

³² Riswanda Imawan, "Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik", dalam: Prisma, No. 4 Tahun 1992, hlm. 37

³³ Ibid.

Lipsett yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan kesempatan konstitusional secara berkala bagi pergantian pejabat pemerintah dan suatu mekanisme sosial yang memperbolehkan sebagian besar anggota masyarakat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan cara memilih orang-orang tertentu untuk jabatan politik.³⁴⁾

Berdasarkan uraian di atas kiranya disini masih perlu dicari atau ditetapkan bagaimana cara terbaik membahas partai politik tersebut. Ada beberapa cara terbuka : pertama, melihat partai sebagai unit-unit. Cara ini melihat partai sebagai suatu kesatuan yang terlepas dari kesatuan yang lain. Kedua, melihat dan membahas interaksi antara beberapa atau banyak kesatuan. Cara membahas seperti ini melihat partai dalam suatu medan interaksi satu sama lain, dengan kata lain membahas suatu sistem kepartaian, atau partisipansi politik sebagai bagian yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem.³⁵⁾ Pembahasan kepartaian menggunakan kedua pendekatan tersebut di atas. Artinya meskipun penelitian menitikberatkan pembahasannya dengan pendekatan pertama namun tetap digunakan pendekatan kedua sebagai usaha untuk menganalisis dan memberikan gambaran adanya suatu perkembangan di dalam tubuh PDI.

³⁴ Ibid.

³⁵ Daniel Dinkels, "Pemilihan Umum di Indonesia Sekali Lagi dan Surat Partai Politik", Prisma, No. 9 September 1981, hlm. 33 - 34

E. Metode Penelitian

Penulisan adalah puncak segala-galanya dalam penelitian sejarah. Semua itu merupakan kelanjutan dari hasil penelitian. Untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik diperlukan metode yang tepat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan - tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Semua bahan tertulis yang berhasil diperoleh selanjutnya diperbandingkan dengan hasil wawancara sehingga bisa saling melengkapi.

2. Interview

Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengadakan wawancara dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang tahu secara langsung mengenai perkembangan FBI di Kabupaten Sleman pada periode tahun 1982-1992.

Adapun langkah-langkahnya seperti yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk sebagai berikut:⁷⁶⁾ (1) Pemilihan subyek untuk diselidiki; (2) Menemukan sumber selengkap-lengkapnyanya ;

⁷⁶⁾ Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah : Penjenjahan
Nugroho Kotosusanto (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas
 Indonesia , 1975) hlm. 34

(3) Mengedukasi kritik sumber dengan tujuan menguji otentisitas dengan kritik intern dan eksteren ; (4) Analisa sumber keterangan ; (5) Sintesa sumber keterangan dari berbagai sumber keterangan untuk diperbandingkan; (6) Koreaborasi, membandingkan dengan sumber lain yang otentik; (7) Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh; (8) Penulisan laporan sejarah. Metode tersebut akan dipergunakan untuk menguraikan tentang masalah perkembangan FDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992.

Diteliti mengikuti uraian diatas maka dalam bab berikut ini akan mengawali pembahasan dengan menguraikan proses terbentuknya FDI di Kabupaten Sleman.



PROSES TERBENTUKNYA PDI KABUPATEN SLEMAN



Dalam menganalisis proses terbentuknya PDI Kabupaten Sleman, tidak bisa lepas dari proses terbentuknya PDI di tingkat pusat maupun proses terbentuknya PDI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka menurut kerangka penulis, tidak berlebihan bila dalam pembahasan ini pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai proses terbentuknya PDI di tingkat pusat dan proses terbentuknya PDI di Daerah Istimewa Yogyakarta dan baru membahas proses terbentuknya PDI Kabupaten Sleman.

1.1.1. Terbentuknya PDI Tingkat Pusat

Sebelum partai tahun 1971 di selenggarakan, pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Suharto menyerukan kepada para elite-partai politik yang akan bergerak di partai agar bisa para elite partai-partai tetap menjaga keadilan nasional dan kelancaran pembangunan, menghindari keterpelecehan, perpelecehan, serta menghindari kegiatan pengelompokan diri partai-partai dalam kelompok-kelompok eksklusif, di samping adanya Golongan Karya (Golkar). Di samping itu Presiden Suharto menyerukan berkolaborasi dengan partai-partai politik. Dalam kerangka ini dikehendaki agar terdapat terdapat pengelompokan partai-partai. Dalam kesempatan itu Presiden Suharto menyatakan bahwa pengelompokan yang harus dikenanya mempunyai dua tujuan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.³⁷⁾

³⁷⁾ Ali Moesoto, Strategi Politik Nasional (Jakarta: CSIS, 1974) hlm. 76

Tujuan jangka pendek yakni, untuk mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan dalam menghadapi pemilu. Sebagai tujuan jangka panjang adalah penyederhanaan kepartaian secara konstitusional sesuai dengan Ketetapan No. XXII / MPRS / 1966. Gagasan penyederhanaan partai ini tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai tetapi juga merupakan perombakan orientasi, dari orientasi ideologis menjadi orientasi pada program pembangunan.³⁸⁾

Dari gagasan di atas dengan jelas dapat dilihat adanya sinronisasi pembangunan yang mewarnai upaya penyederhanaan kepartaian di masa Orde Baru (Orba), yakni bahwa pengelompokan yang ada akan merupakan refleksi dari tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.

Dalam pertemuan itu dapat dilihat kerangka pemikiran pemerintah dalam menciptakan kondisi madakannya pengelompokan partai-partai politik, yakni didasarkan pada kebutuhan pentingnya terciptanya stabilitas politik sebagai tanggung-jawab bersama antara pemerintah dan partai-partai politik, sehingga pembangunan dapat terus dikembangkan.

Pada awalnya gagasan pengelompokan partai ini dapat diterima dengan baik dan mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh pemimpinnya. Partai yang lebih-mula memberikan dukungannya adalah PNI dan IPKI. Kemudian Parmusi melalui ketuanya, Djernawi Madikusumo, mengakui bahwa gagasan Presiden sesuai dengan rencana Kongres Umat Islam tahun 1960. Demikian

³⁸ Ibid.

pula tokoh NU Subchan Ze, menyatakan bahwa ia melihat manfaat dari usaha itu sebagai simplifikasi proses pengambilan keputusan, sehingga alternatif pendapat-pendapat dalam masyarakat dapat diperkecil.³⁹⁾

Sementara itu ada pula pendapat dari kalangan partai politik yang menyatakan bahwa bagaimanapun juga ide pengelompokan partai bukanlah berasal dari partai-partai politik tetapi dari atas (pemerintah). Oleh karena itu kemauan partai politik dapat dilihat sebagai pilihan taktis akibat tidak adanya alternatif lain bagi partai politik untuk menentukan sikap di luar yang ditawarkan oleh pemerintah melalui presiden.⁴⁰⁾

Gagasan pengelompokan partai-partai politik itu tidak hanya mendapat perhatian dari kalangan parpol, tetapi juga dari kalangan luas di Indonesia dan diliput secara luas oleh berbagai media massa yang ada. Secara umum mereka menjabarkan peringatan supaya pemilihan umum-cara yang mengarah pada pelaksanaan dan lahir gagasan itu harus dibetulkan pada batasan obyektif sistem politik yang strategis dalam menata kembali kehidupan politik Indonesia.

Sementara itu Presiden Sukarto telah menunjuk Kepala Opsus Brigadir Jendral Ali Moertopo, Aspri Presiden Soedjono Harsono, Kepala Bekin Mayor Jendral Sutopo Djuwono dan Brigadir Jendral Djokropranolo sebagai penghubung dengan partai PNI, IPKI, Partai Murba, Partai Katolik dan Parkindo di satu

³⁹⁾ Damsudin, Pemilihan Umum 1971 (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1972) hlm. 17

⁴⁰⁾ Rusli Karim, op.cit., hlm. 173

politik dan partai-partai Islam kilsin pihak.⁴¹⁾ Fungsi penghubung sebenarnya adalah sebagai jembatan antara perpolit dengan Presiden untuk lebih dapat membantu perpolit menyelesaikan persoalan-persoalan, tetapi bukan tidak mungkin bahwa kehadiran para penghubung ini dimanfaatkan sebagai upaya legitimasi untuk secara formal melibatkan diri dalam intern partai.

Ada mulanya proses pengelompokan sebagai langkah ke arah penyederhanaan partai dilakukan oleh PKI dalam bentuk kerja sama antar partai, kemudian dalam bentuk konfederasi dan baru kemudian ke tahap fusinya partai, tetapi akhirnya semua ini dibatal. Bentuk pengelompokan yang disarankan adalah bentuk yang langsung pada konfederasi yang lebih luas dan sebuah sekretariat yang mengurus pekerjaan-pekerjaan administratif.⁴²⁾

Pada tanggal 9 Maret 1973, sekretariat mengunjuk tahun anggaran 1973 Republik I pada tanggal 1 April 1973, akhirnya terdapat pengelompokan partai dengan diketuanya Kelompok Dewan-dewan Pembangunan yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Ikatan Pandukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Marha.⁴³⁾ Kerucutan dilakukan dengan terbentuknya Kelompok Persebaran Pembangunan pada tanggal 13 Maret 1973 yang terdiri dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Partai Nasionalisme (NU), dan Penggerak Darbiyah Islamiah (Perti).

⁴¹⁾ Daniel Dinkides, *op.cit.*, hlm. 74

⁴²⁾ Ali Noerhoro, *op.cit.*, hlm. 75

⁴³⁾ *Ibid.*, hlm. 76

Sebelum melangkah ke fusi, kelima partai dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP) masih berusaha mengulur-ulur waktu dengan menyatakan bahwa menurut Tap MPRS No. XXII tahun 1966 penyederhanaan struktur politik harus dilaksanakan dengan perundang-undangan, tetapi manuver ini terlalu lemah sehingga tidak menggoyahkan kehendak pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan fusi.

Bagi kelima partai yang tergabung dalam KDP hasil pemilu tahun 1971 dalam kenyataannya semakin menyudutkan mereka karena kekuatan mereka sebagai partai politik semakin melemah. PNI yang dalam pemilu pertama tahun 1955 berhasil muncul sebagai pemenang pertama dalam pemilu tahun 1971 ini hanya memperoleh 20 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parkindo memperoleh 7 kursi, Partai Katolik memperoleh 3 kursi sedangkan IPKI dan Murba tidak mampu memperoleh 400.000 suara sehingga tidak mendapat kursi di DPR. ⁴⁴⁾ Kenyataan pemfusiaan partai semakin tidak terhindar lagi, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu tahun 1971 secara tegas menyatakan bahwa, dalam pemilu tahun 1977 hanya akan ada tiga kontestan.

Akhirnya setelah secara garis besar mengalami tiga tahap dalam proses penyederhanaan partai, yakni tahap pertama tumbuhnya fraksi dalam DPR, yakni fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, dan dua fraksi parpol masing-masing fraksi Material-Spiritual dan fraksi Spiritual-Material, tahap kedua terjadinya pengelompokan partai-partai yang bersifat federatif

⁴⁴ Manuel Kaisiepo, " Dilema PDI: Perjuangan Mencari Identitas ", dalam: Seri Kumpulan Prisma, Desember 1981, hlm. 310 . Lihat juga, Daniel Dhakidae , op.cit., hlm. 34

dan talap besi, maka terbentuklah PDI. Pemfusiion ini secara resmi tertuang dalam Deklarasi Pembentukan PDI pada tanggal 13 Januari 1973. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil dari kelima partai yang berfusi yaitu: Alimud Sidarmadidjaja dan M. Soedji dari IPKI, Den Mang Reng Say dan W.S. Mignjodarsawono dari Partai Katolik, S. Harbentoko dan Ojon Faksa dari Partai Murda dan M. Isaeni serta Abdul Majid dari PNI. Sedangkan dari Partai Kristen diwakili oleh A. Menas dan Setan Sihait.⁴⁵⁾ Dengan demikian, maka deklarasi ini mewadahi lebur dan berfusinya kelima partai yang berlatar belakang sejarah, basis massa dan ideologinya ke dalam wadah wadah baru Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sekaligus secara formal menandai berakhirnya eksistensi masing-masing partai tersebut.

Deklarasi deklarasi 13 Januari 1973 pada tanggal 13 Januari kelima partai yang berfusi dalam PDI berhasi membentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) yang menurut ketentuan paruhliman Anggaran Dasar (AD) PDI pasal (c), ditugaskan sebagai pengganti Majelis Permusyawaratan Partai sampai terselenggaranya Kongres I PDI. Menurut AD PDI, pasal 13, MPP adalah ada dibawah Kongres Partai.⁴⁶⁾ MPP ini beranggotakan 25 orang, diwakili oleh lima orang dari masing-masing unsur, yaitu PNI diwakili oleh: M. Isaeni, Sunawar Sukowati, Abdul Majid, Budi Pipoyuwono dan Gowi. IPKI diwakili oleh :

⁴⁵ " Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia ", dalam: Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Undang-Undang Partai dan Golkar (Yogyakarta: PDI DKI, tanpa tahun), hlm. 1-2

⁴⁶ " Anggaran Dasar PDI ", dalam: Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Undang-Undang Partai dan Golkar (Yogyakarta: PDI DKI, tanpa tahun) hlm. 21

A. Sukarnadidjaja, Hasjia Ning, A.P. Mentril, Supangat dan W.A. Chelik. Murba diwakili oleh: S. Murbantoko, Djon Pakan, Zekenis, H. Mambian, G.D. Hadris. Parkindo diwakili oleh: A. Wenas, Sabam Sirait, J.C.T. Simorangkin, J.H.D. Tabamata, E.A.M. Simatupang. Partai Katolik diwakili oleh: F.S. Wignjosumarsone, Ben Mang Reng Say, M.B. Jamosir, R.G. Darist dan F.C. Falsan-suka. (47)

Pada saat yang bersamaan dibentuk pula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang terdiri dari wakil-wakil orang dengan komposisi berdasarkan kelas partai yang tergabung di dalamnya, PNI : IPKI; Murba : Parkindo: P. Katolik adalah 3:2:2:2:2, dengan posisi ketua umum dipegang oleh unsur PNI dan Sekjen Koordinator oleh Parkindo. Pembagian komposisi itu diambil berdasarkan perimbangan kekuatan partai dengan hasil pemilu tahun 1971. (48)

Pembentukan kedua organ partai atau perlengkapan partai ini kemudian diikuti dengan pemberian hak, wewenang serta legalitas untuk mengatur dan mengatur tata kehidupan dan gerak partai selanjutnya. Adapun susunan DPP PDI yang pertama adalah: Ketua Umum Mh. Isaeni, sedang ketua-ketua lainnya adalah: A. Sukarnadidjaja, Ben Mang Reng Say, A. Wenas, S. Murbantoko, Sunawar Sukawati. Sekjen koordinator dipegang oleh: Sabam Sirait, sedangkan sekjen-sekjen yang lain adalah: W.A. Chelik, F.S. Wignjosumarsone, Djon Pakan, Abdul Madjid. (49)

⁴⁷ Dokumen Seleksi Partai Demokrasi Indonesia, dikeluarkan oleh DPP PDI, 1973, hlm. 23

⁴⁸ Lihat, Laporan Perkembangan PDI, dikeluarkan DPP PDI, 1976, hlm. 39

⁴⁹ Dokumen Seleksi PDI, op.cit., hlm. 24

Dengan demikian maka sejak tanggal 13 Januari 1973 secara fisik organisatoris, PDI telah menampilkan diri keluar sebagai sebuah partai politik yang peripurna. PDI telah hadir sebagai partai baru yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengendalikan mekanismenya sendiri.

Setelah organ partai yakni MPP dan DPP terbentuk, maka pada tanggal 17 Januari 1973 para pengurus partai dalam EPK menghadap Presiden guna memberikan laporan mengenai terbentuknya PDI. Dalam pertemuan tersebut Presiden menyambut baik kinerja kolektif pengurus partai itu, karena telah berhasil mewujudkan gagasan yang telah dicetuskannya beberapa tahun yang lalu.⁵⁰⁾

Setelah PDI berhasil membentuk perleengkapan partainya, kemudian Presiden mengusulkan dan menganjurkan kepada partai itu guna membentuk semacam tim-tim untuk mendukung konsolidasi, dan tugasnya adalah memberikan penjelasan kepada intern partai-masing-masing daerah, masyarakat luas dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan program itu, PDI diberi bantuan oleh pemerintah (Presiden) berupa bantuan material guna membiayai kerja tim-tim tersebut. Alasan dengan Presiden ini jelas diterima oleh pihak PDI, karena bagaimanapun juga partai ini membutuhkan dana bagi pengembangannya. Dilihat pula oleh pihak PDI bahwa anjuran Presiden itu sejalan dengan kepentingan mereka, yaitu bahwa pembentukan tim-tim ke daerah-daerah adalah perlu sebagai suatu prosedur dalam rangka pemusatan mereka.

⁵⁰ Laporan Lerkonbangan PDI, op.cit., hln. 30

Melalui dukungan dari pihak pemerintah akhirnya DPP PDI berhasil membentuk tim-tim yang ditugaskan ke daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Tim tersebut terdiri dari delapan tim yang masing-masing tim diketuai oleh seorang ketua. Sumatra bagian selatan diketuai oleh Masjidi Ming, Sumatra bagian utara diketuai oleh Sunwar Sukowati, Jawa diketuai oleh Mh. Tansen, Kalimantan bagian barat diketuai oleh F.S.Paloumuko, Kalimantan timur oleh Pemudji, Sulawesi oleh A. Sukarnadidjaja, Bali dan Nusa Tenggara oleh Ben Mang Reng Say, Maluku dan Irian Jaya oleh Djon Takamata. Tetapi akhirnya tim ini berkembang menjadi sembilan tim yakni dengan dipecahnya Irian Jaya dan Maluku, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Akhirnya Maluku dipercayakan kepada Ben Mang Reng Say sedangkan Irian Jaya dipercayakan kepada Soelan Sihait.⁵¹⁾ Dengan berdirinya tim-tim tersebut menandai pula proses terbentuknya PDI di tingkat daerah.

D. Terbentuknya PDI Daerah Istimewa Yogyakarta

Proses terbentuknya PDI di tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari proses terbentuk dan berkembangnya PDI di tingkat pusat. PDI terbentuk setelah melalui proses partai yang berhasil menandatangani "Arah Kebijakan" dan "Demokrasi Pembangunan Partai Demokrasi Indonesia" pada tanggal 13 Januari 1977 pukul 24.00. Kebijakan ini mewujudkan kesepakatan diantara para pendukungnya bahwa mereka bersedia secara ber-

⁵¹ Soelan Sihait, PDI, op.cit., hlm 70

sama-sama untuk memuaskan diri ke dalam PDI, dalam rangka penyederhanaan dan pembelajaran struktur kehidupan politik di Indonesia. Dicapai pula kesepakatan bahwa PDI terbuka bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, keturunan, agama, bahasa dan bahwa landasan PDI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 52)

Di DIY ageman partai yang merasa tergabung dalam PDI segera mengambil langkah-langkah strategis setelah mendapat inyarat dari pusat, yaitu bahwa PDI di daerah itu harus segera dibentuk. Langkah pertama yang diambil oleh para pengurus partai-partai politik yang tergabung dalam PDI di DIY adalah merencanakan pembentukan sebuah wadah awal untuk menggabungkan kelima bekas partai tersebut, yakni Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP) DIY. 53)

Dengan langkah itu dapat dilihat bahwa proses fusi PDI DIY akan dilaksanakan secara bertahap, mengingat bahwa kelima bekas partai yang tergabung di dalamnya itu bagaimana pun juga memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu antara lain menyangkut latar belakang ideologis, latar belakang sejarah dan basis massa, yang tidak dapat begitu saja dengan cepat dan mudah dilebur menjadi satu.

Kelima perpol di DIY itu kemudian mengambil inisiatif mengadakan pertemuan untuk konsolidasi dengan pengurus daerah guna meminta petunjuk-petunjuk sehubungan dengan akan

52 Lihat, Laporan DPP PDI mengenai "Pembentukan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973 Kepada Kongres PDI I" dalam: Kongres I PDI, hlm. 37

53 Hasil wawancara dengan Rpk. Suharto, tanggal 27 Februari 1993 di Simas.

halukomanya penghentian kepemimpinan FDI di DI. Pertemuan itu melibatkan wakil-wakil dari PKI yang diwakili oleh Notosudirdjo, Farhindo oleh Subardjo, Partai Katolik oleh R.F.J. Dadi dan dari pihak pengusaha daerah diwakili oleh Dandim Leo Ngali.⁵⁴⁾

Proses pembentukan KDF itu terjadi dihadapkan pada permasalahan di kalangan parpol itu sendiri, yakni sulitnya menyesuaikan kepemimpinan KDF tersebut berdasarkan pada adanya kebutuhan para personal wakil-wakil parpol untuk menghadapi kepemimpinan. Karena dibentuk oleh kelompok-kelompok dengan kekuatan mereka dalam kepemimpinan, maka status mereka bagi mereka yang berpegawaikan akan terpengaruh atau berubah. Akan tetapi, adanya ketunggalan sambutan yang diberikan oleh Leo Ngali kepada mereka dan kesediaan pemerintah daerah untuk terlibat membantu pembentukan wadah itu dapat menetralkan konflik-konflik para wakil tersebut.⁵⁵⁾

Setelah mengadakan pertemuan dengan pengusaha daerah akhirnya para wakil yang tergabung dalam PKI mengadakan pertemuan mereka sendiri untuk membantu kepemimpinan KDF. Wadah itu terbentuk pada tanggal 17 Januari 1973, dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua I dipegang Notosudirdjo, Ketua II sampai IV dipegang oleh: Subardjo, Ijiplosaji - to, R.F.J. Dadi, David.S. Sekretaris I-IV masing - masing oleh Subardjo Surjoguritno, Daniel Sukemi, J.B. Wijanjono,

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Lpk. Soetjiyopidaksi dan Lpk. Ngandiyono tanggal 6 Maret 1997 di Sleman.

lan tidak dapat. Bendahara oleh Benhardjo dan nyonya A. Suwandi .⁵⁶⁾

Tugas KDP selanjutnya ialah mempersiapkan terbentuknya wadah yang lebih mapan, yang merupakan perwujudan dari telah berfusiya kalina partai kelas bawah baru PDI di DIY. Pembentukan KDP ini juga mengandung implikasi bahwa pengartian fusi semakin diperjelas, yakni partai-partai yang tergabung di dalamnya sudah tidak ada lagi dan segala kegiatan politikanya dialihkan ke dalam PDI.

Proses pembentukan PDI di DIY dipercepat dengan adanya keterlibatan pihak penguasa daerah, yakni dengan dipanggilnya oleh salah satu pimpinan pusat aka PDI ke Kodan dalam rangka pembentukan PDI di DIY. Pihak penguasa daerah ingin memodifikasi struktur hirarkis organisatoris aka PDI. Melalui mantan ketua PDI DIY yang juga sebagai ketua KDP, Notokardjo diharapkan segera mempercepat pembentukan PDI DIY.

Bagi partai-partai yang tergabung dalam PDI di DIY, keterlibatan penguasa daerah agaknya dapat dimanfaatkan sebagai pihak yang dapat membantu mempercepat proses fusi yang telah meramin melalui keterlibatannya dalam pembentukan dan penetapan komposisi kepemimpinan PDI DIY. Setelah diminta oleh KDP, pihak penguasa daerah meminta bantuan golongan anggota komposisi kepemimpinan PDI, yang segera dituliskan oleh wakil-wakil partai kelas bawah KDP tersebut. Perihalang- an komposisi kepemimpinan PDI itu diserahkan pada kekuatan partai hasil pemilu tahun 1971. Pembagian komposisi itu ada-

⁵⁶ ibid.,

lah IRI mendapat lima wakil, sedangkan Parkindo dan P. Katolik tiga wakil. Irki dan Murba masing-masing satu wakil.⁵⁷⁾

Dengan diimpaktinya keputusan mengenai perimbangan komposisi dalam kepemimpinan DPD PDI DIY oleh partai-partai yang tergabung dalam IRI, maka akhirnya melalui Surat Keputusan Pangrehda No. III / 1977 tertanggal 24 Februari 1977 dicakker pembentukan DPD PDI DIY.⁵⁸⁾

C. Pembentukannya PDI Kabupaten Sleman

Proses fusi PDI di Daerah IK I juga mengikuti corak-coraknya di Daerah IK II seperti halnya PDI di Kabupaten Sleman. Namun proses fusi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi partai serta lingkungan di luar partai, seperti: lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Kondisi partai politik khususnya partai yang tergabung dalam PDI di Kabupaten Sleman kurang menguntungkan. Sesungguhnya Golkar dalam pemilu 1974 perpolit menjadi partai minoritas, khususnya PNI. Banyak perpolit PNI, Parkindo, P. Katolik yang keluar dari perpolit, terutama perpolit yang merupakan perpolit di lingkungan kelas pemerintahan. Walaupun ketiga perpolit tersebut organisasinya kurang terurus, hampir tidak mempunyai kegiatan, namun mereka dalam anggotanya kurang lancar, bahkan diantara perpolit sendiri ada ketidak kompak. Selain kondisi intern kondisi di luar perpolit juga kurang menguntungkan. Masyarakat Kabupaten Sleman baik di desa maupun kota perpolit

⁵⁷ ibid.,

digolongkan menjadi tiga, pertama, golongan pendukung Gol = kon yang merupakan pendukung paling banyak. Kedua golongan agama khususnya agama Islam dan ketiga golongan nasionalis khususnya pendukung PNI. Golongan kedua dan ketiga ini se = sedikit pendukungnya.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sleman sudah suda = konnya. Lingkungan, kondisi dan partai mempunyai hubungan yang erat, tidak seperti masyarakat di lain daerah yang tidak menentakan kehidupan partai. Setiap partai membutuh = kan dana lebih banyak yang merupakan biaya. Dana yang diterima PDI berasal dari pemerintah dan para anggotanya terutama anggota yang ekonominya kuat. Keluarganya anggota PDI yang ekonominya kuat terutama para pengusaha menyedekahkan dana yang diterima PDI juga berkurang, sehingga ketika PDI untuk menggabungkan partai juga mengalami kesulitan. Faktor yang menyebabkan anggota PDI keluar adalah keinginan mencari ke = mudahan dan keuntungan selibangan dengan kepentingan pri = vasi. 50)

Salah satu ciri yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman adalah sifat kepatuhan warganya ter = hadap pimpinan. Apa yang dilakukan oleh pimpinannya akan ba = nyak ditiru warganya, terlepas dari apakah sifat patuh ter = sebut keluar dari hati nurutinya sekedar karena rasa takut. Berdasarkan kondisi dalam partai dan lingkungan di luar partai, dalam menggabungkan kehidupan partai maka pemerintah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Hery Setyo Efendi dan Bpk. Setriano tanggal 3 Maret 1993 di Sleman.

menganjurkan agar PNI, Iskindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba di Kabupaten Ciamis bergabung menjadi satu.

Proses fusi PDI di Kabupaten Ciamis bisa dikatakan sangat seluruhnya. Proses fusi tersebut berlangsung secara bertahap, pertama-tama melalui pendekatan secara organisatoris. Mewart Supremadi yang pada masa sebelum fusi PDI tanggal 10 Januari 1973 menjabat sebagai ketua Partai Kristen di Ciamis dan sekretaris R. Supripto Siswodiksono yang sebelum berfusi bergabung fusi menjabat sebagai Ketua Partai Katolik di Kabupaten Ciamis, proses pendekatan itu dilakukan antara minggu terakhir bulan Januari 1973 hingga minggu pertama bulan Februari 1973. Interaksi itu pertama-tama dimulai dari fungsionaris PDI Ciamis. Dalam tahap ini masing-masing pengurus partai yang aktif berfusi dalam PDI, saling mengadakan pendekatan dengan cara saling kunjung-mengunjungi ke organisasi masing-masing. Kegiatan tahap pertama ini dilakukan dengan harapan agar tercipta suasana kerukunan antara pengurus partai sebelum diadakan penyatuan peleburan partai-partai.

Tahap yang kedua, yaitu tahap masyarakat. Dalam tahap ini berlangsung musyawarah antar pimpinan partai-partai yang berfusi. Musyawarah tahap ini banyak dihadiri oleh wakil-wakil dari tiga partai, yakni: PNI, Iskindo dan Partai Katolik. Musyawarah fusi ini berlangsung di rumah almarhum Saiful Siswodiksono di Jalan Kelangka, Desa Gandangndi, Kecamatan Klisi, Kabupaten Ciamis, tepatnya Desa Indirawati Loggikanda. Musyawarah itu berlangsung pada pertengahan bulan Februari 1973. PNI diwakili oleh: Sutardjo Sarjogaritho, Saiful Siswodiksono, Sigis Manduntoro dan Subarto. Partai Ka-

telik diwakili oleh Robertus Suprpto Siewosuwirjono dan Ignatius Padiyono. Sedang Parkindo diwakili oleh Supramedi dan Suwandi.⁶⁰⁾

Gabalah pimpinan dari ketiga partai tersebut sepakat berfusi ke dalam PDI, barulah mereka secara formal, di akhir bulan Februari 1973 di hadapan Kodim 0730 Kebupaten Sleman menyatakan fusi menjadi PDI. Adapun susunan kepengurusan PDI Kabupaten Sleman saat itu sebagai berikut: Ketua I dipegang Citerdjo Surjogardho, ketua II-IV dipegang oleh: Sawabi Siewadiyono, R. Suprpto Siewosuwirjono dan Supramedi. Sekretaris I-III masing-masing: Suharto, Ignatius Padiyono dan Suwandi. Selang kemahmurnya dipuncyakan kepada Suharto dan Sabriyo Rikardo. Berulah dalam lehap yang terakhir mereka menandatangani surat pereritahuan kepada.⁶¹⁾

Nextinya marilah ada dua partai lagi yang ikut berfusi, yaitu Ikatan Perjuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba. Marilah kita diundang berdalil-dalil tidak ada selangdan panti-panti partai tersebut diulang. Selang-ke dalam kepengurusan PDI selang di ber camp i marwah yang berawal dari tiga partai yaitu : PKI, Parkindo dan Partai Katolik.⁶²⁾

Sejak berakhir hingga perkembangannya hingga ini, di-ter setiap kali pemilihan umum PDI selalu menduduki posisi bawah dengan peralihan umum yang tidak begitu banyak, maka

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Dpt. R. Suprpto S., Dpt. Su-
pramedi dan Dpt. Suharto pada tanggal 06 dan 07 Februari 1997
di Sleman.

⁶¹ Ibid.,

⁶² Hasil wawancara dengan Dpt. Supramedi pada tanggal
23 Februari 1997 di Sleman.

tidaklah mengherankan apabila banyak pengamat yang menyebut partai ini dengan istilah "I Nani Gares".⁶⁷⁾ Namun merendek pengamatan Gunawati Wuryandani dan ahli politik lainnya selama pemilu tahun 1987 dan tahun 1992 PDI berhasil membuat kejutan yaitu dengan berhasilnya menaikkan jumlah kursi di DPR. Misalnya PDI pada pemilu tahun 1982 hanya memperoleh 24 kursi di DPR, pada pemilu tahun 1987 naik menjadi 40 kursi dan untuk pemilu 1992 menjadi 56 kursi.

Fenomena seperti itu juga bisa diaksikan ke dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya fakta yang terjadi di Kabupaten Sleman. Ditinjau dari perolehan kursinya PDI di Kabupaten Sleman dari pemilu 1982-1992 dapat dikatakannya mengalami perkembangan cukup berarti. Dalam pemilu 1982 ada 40 kursi di DPRD IK II Sleman yang harus diperebutkan. Tetapi dari 40 kursi itu harus dikurangi delapan kursi untuk jajak audi, sehingga tinggal 32 kursi yang harus diperebutkan oleh ketiga DPP (Organisasi Demokrasi Pemilu) dalam pemilu. Dalam pemilu tahun 1987 PDI Sleman hanya mampu menyumbang lima kursi dari 32 kursi yang diperebutkan. Golkar mendapat 12 kursi dan PIF sembilan kursi. Sedangkan pemilu tahun 1992 PDI memperoleh lima kursi, Golkar 25 kursi dan PDI mendapat dua kursi yang jatuh pada sembilan kursi.⁶⁸⁾

⁶⁷⁾ Gunawati Wuryandani, *op.cit.*, hlm. 57

⁶⁸⁾ Revisi/Revisi Hasil Pemilu PDI Kabupaten Sleman 1982 - 1992 (Dokumen Kantor DPP PDI Sleman)

April 1933 di Kabupaten Sleman sebagaimana di-
laporkan oleh majalah triwulanan *Varia Sleman* di bawah
judul berikut : komposisi keanggotaan PKR di DI II Sleman
periode 1932 - 1933 adalah PKR delapan anggota, Golkar 20
anggota, PDI delapan anggota serta ABRI 3 anggota.
Sehingga keseluruhannya berjumlah 45 anggota.⁶⁵⁾

Demikianlah uraian mengenai proses terbentuknya PDI
Kabupaten Sleman yang keberadaannya diakhiri oleh lahirnya partai
politik terbentuknya PDI di tingkat Sleman, maka dapat dilihat
pada hal berdirinya yang akan mengarahkan bagaimana kondisi
socio geografis Kabupaten Sleman mendukung atau berpengaruh
terhadap perkembangan PDI di Kabupaten Sleman.

⁶⁵ Varia Sleman (Majalah Triwulanan), Edisi I,
tahun 1932 / 1933, 317.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAD III

KONDISI SOSIO GEOGRAFIS KABUPATEN SLEMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PDI KABUPATEN SLEMAN

PDI adalah sebuah organisasi, linier organisasi yang hidup selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotiknya. Proses interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya memperlakukan dua pihak yakni, organisasi itu dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena lingkungan tempat hidup suatu organisasi berpengaruh terhadap aktivitas organisasi, maka proses interaksi lingkungan dengan organisasi mendapat perhatian khusus dalam tulisan ini. Atas dasar pernyataan tersebut dalam uraian berikut akan dianalisis bagaimana kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman berpengaruh terhadap perkembangan PDI Kabupaten Sleman.

A. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman secara administratif meliputi wilayah administratif Daerah Tingkat II Yogyakarta yang terluas 54.100 hektar (7.74' 51" dan 7° 47' 37" lintang Selatan dan 107° 15' 37" dan 108° 00' 30" bujur timur). Luas wilayah tempatan antara 20 - 200 x dari permukaan air laut. Garis terpanjang dari kabupaten 32 km, sedang terpendek 15 km (75 km).⁽⁶⁾

⁶⁶ "Kabupaten Sleman Dalam Angka 1986, 1987", Ringkasan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Sleman.

Daerah ini dibatasi oleh Kabupaten wilayah administratif yaitu dibatasi utara dibatasi oleh Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Klontor Jawa Tengah, di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Dandak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Yogyakarta, di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Klaten Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang terletak di bagian utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wilayah seluas 574,88 km². Daerah ini terdiri dari tiga wilayah kerja Parlemen Bupati yaitu wilayah Perlebuh Bupati bagian barat, tengah dan timur. Disamping itu daerah ini terdiri dari 1.210 dusun, 36 desa dan 17 kecamatan yakni : (67)

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. Gamping | 10. Kalsasan |
| 2. Godean | 11. Ngemplak |
| 3. Moyudan | 12. Ngablak |
| 4. Minggir | 13. Sleman |
| 5. Sisyegan | 14. Turi |
| 6. Wliris | 15. Pakem |
| 7. Depok | 16. Cangkringan |
| 8. Bantul | |
| 9. Kasihan | |

Secara geografis Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang terletak di bagian utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dilalui jalan perhubungan darat antara kota-kota besar di

⁶⁷ "Kabupaten Sleman Dalam Angka 1998", Biro Pusat Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, hlm. 2

jalan Jawa bagian selatan dan banyak dibangun oleh objek-objek wisata alam yang seperti Kantor Yogyakarta, Ganti Kembang, dan Ganti Kembang pada lingkungan yang indah dan indah. Dari lingkungan jalan tersebut diharapkan diteliti dalam di Kabupaten dan siswa mempunyai minat jalan-jalan potret yang sangat penting dalam upaya masa era komunikasi dan segala kegiatan lainnya.

Salah satu kota Kabupaten Sleman (Sleman) yang merupakan pusat pemerintahan yang telah dilindungi dengan sarana perhubungan, berupa jalan-jalan beraspal dan jalan-jalan tidak beraspal (jalan tanah) yang ada pada. Di sana sarana perhubungan tersebut sangat penting dalam perkembangan era komunikasi maupun segala aktivitas lainnya. Antara kota-kota Kabupaten dan kota-kota Kecamatan di Kabupaten Sleman tersebut telah dilindungi dengan jalan-jalan yang beraspal. Demikian pula perkembangan antara kota-kota dan Kantor-kantor Kepala Desa telah dilindungi oleh jalan-jalan yang beraspal pula. Bahkan di Kabupaten Sleman ini, telah banyak jalan-jalan beraspal yang menghubungkan antara kota yang satu dengan kota yang lain. Meskipun demikian masih banyak juga jalan-jalan tanah atau jalan beraspal yang merupakan sarana atau perhubungan antar kota. Oleh karena itu diharapkan di wilayah Kabupaten Sleman ini lebih banyak berinvestasi.

Kelihat kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang demikian ini, dapatlah dikatakan bahwa letak wilayah Kabupaten Sleman sangat strategis sebab mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya masa era komunikasi dan transformasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun segala kegiatan jasa dan ekonomi.

nomi, baik dilinghap lokal atau nasional. Potensi wilayah ini dapat dipakai sebagai modal utama bagi setiap organisasi yang menginginkan hidup dalam di lingkungan Sloman.

Hal-hal yang demikian, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), apabila menginginkan berkolaborasi dengan baik, seharusnya dapat menggali elemen-elemen sebagai potensi yang tersedia guna dimanfaatkan masyarakat. Sebagai contoh organisasi yang telah dapat berkembang cukup baik di lingkungan Sloman adalah PDI. Hal itu disebabkan PDI tidak hanya memajukan lebih banyak masyarakat bahwa PDI juga mempunyai iperaktif dalam berbagai aspek kehidupan potensi wilayah kasus-paten Sloman berwujud pemerintah. Upaya yang pemanfaatan jasa dan perusahaannya, pembangunan jembatan, pembangunan sarana-sarana lain seperti bus-bus, pembangunan sarana transportasi, pembangunan sarana pabot-pabot kegiatan ekonomi, seperti pasar dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDI telah dapat PDI yang di lakukan lain.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Tingkat II Sloman dalam pembangunan sarana perhubungan telah ini pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan PDI, telah dilakukan oleh pemerintah Sloman dalam pembangunan sarana-sarana lain yang telah dimanfaatkan PDI melalui sarana perhubungan yang penting.⁶⁰ Hal demikian perhubungan sarana perhubungan ini adalah salah satu yang menguntungkan bagi perkembangan PDI di Kabupaten Sloman, karena sarana perhubungan yang baik adalah merupakan salah satu sarana bagi PDI

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Heryanto tanggal 7 Maret 1997 di Sloman.

lebih ampun dan lebih jeli daripada ke seluruh pelosok Kabupaten Siem. Atas alasan tersebut, karena Kabupaten Siem ini berada dalam perhubungan yang cukup baik maka PDI di Kabupaten Siem bisa memanfaatkannya guna mengembangkan diri. Sebagai contoh karena letak Kabupaten Siem sangat strategis dengan dilindungi sarana transportasi maupun perhubungan yang cukup memadai, maka proses komunikasi antara Dewan Pimpinan Cabang PDI Kabupaten Siem dengan Komite Kecamatan Kecamatan maupun dengan Komite Kecamatan Siemnya akan lebih lancar. Maksud dari proses komunikasi inilah yang dimaksudkan PDI cabang Siem untuk memulai program-program kerjanya dalam program perjuangan kepada masyarakat luasnya yang tidak luputkan salah.

Program kerjanya dalam program perjuangan yang dimaksudkan PDI kepada masyarakat luas ini sudah banyak mengangkat masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan lain-lain. (60) Oleh karena itu melalui program-program PDI yang banyak ini, maka diharapkan dapat mengangkat kebajikan terdapat, maka tidak mengherankan bahwa di Kabupaten Siem ini semua PDI, religius dan non-religius berlomba-lomba untuk

B. Kabupaten Siem

Kabupaten Siem terbagi menjadi 11 Kecamatan yang terdapat di bagian selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah seluas 574,00 km². Luas setengah dari luas wilayah tersebut

⁶⁰ Hal ini merupakan laporan Rpt. K. Dwi. M. tanggal 7 Mei 1997 di Siem.

tersebut adalah perkebunan yang dalam dengan diusahakan di tanah irigasi teknis di bagian barat, tengah, timur dan selatan kecamatan bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Paksi dan Cangkringan yang merupakan daerah perbukitan. Meskipun sebagian wilayah Kecamatan Paksi dan Cangkringan merupakan daerah perbukitan namun kondisinya lebih subur bila dibandingkan dengan sebagian wilayah Kecamatan Prambanan yang merupakan perbukitan, sebab ditinjau dari struktur tanahnya, perbukitan di wilayah Kecamatan Prambanan merupakan tanah berkapur sedangkan perbukitan di bagian utara Kecamatan Paksi dan Cangkringan merupakan tanah vulkanik.

Penggunaan tanah menurut luas wilayah dapat dibagi menjadi di tanah sawah dan tanah kering. Dari luas wilayah tersebut komposisi penggunaan tanahnya adalah sebagai berikut : 70)

- Sawah : 25.208 ha (74,22%)
- Perikanan : 47.644 ha (30,69%)
- Pekarangan : 5.288 ha (9,20%)
- Hutan : 1.748 ha (3,25%)
- Lahan-lain : 6.287 ha (14,84%)

Penggunaan tanah menurut pengiraannya dapat diklasifikasi ke dalam seperti berikut, irigasi teknis, irigasi sederhana dan tidak irigasi. Namun demikian di Kabupaten Sleman, tanah tidak irigasi hampir tidak terdapat di setiap kecamatan. 71)

70) Pragata Kinja Kantor Departemen Perencanaan Kabupaten Sleman Tahun 1993/1994, Departemen Perencanaan Kabupaten Sleman, 1992, hlm. 4

71) "Kabupaten Sleman Dalam Angka 1993", Biro Pusat Statistik Kabupaten Sleman, hlm. 22

bangunan tanah kering dapat diklasifikasikan berdasarkan bangunan dan balokan, tegel lebar kelang, palang rumput, kelas baru, tanah sementara tidak diusahakan, hutan negara, tanah yang digunakan untuk jalan, saluran air, lapangan dan kuburan.⁷⁰⁾

Di Kabupaten Siuruan pemilikan tanah secara individual merupakan milik pribadi yang dapat diperjual belikan dan diwariskan secara turun temurun. Masyarakat Kabupaten Siuruan pada umumnya hidup dari hasil pertanian sawah hanya sebagian kecil yang menjadi petani kaya. Dalam mengelola tanah pertanian disamping dikerjakan sendiri ada juga yang menyewakan terdapat tanah dengan jumlah kurang dari satu hektar. Bagi hasil jual beli di Kabupaten Siuruan pada umumnya seperti sawah (bagi hasil dua), kebun (bagi hasil tiga), perapatan (bagi hasil empat) dan perikanan (bagi hasil kelapal). Bagi hasil sawah dan perikanan biasanya dibagi lagi menjadi tiga bagian. Bagi hasil perikanan dan perikanan dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian perikanan, bagian perikanan, bagian perikanan. Bagi hasil perikanan dan perikanan dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian perikanan, bagian perikanan, bagian perikanan. Bagi hasil perapatan dan perapatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian perapatan, bagian perapatan, bagian perapatan. Akibatnya pada saat ini banyak masyarakat terdapat tanah yang dikelola sendiri sendiri. Untuk perikanan perikanan sendiri dikelola sendiri sendiri, untuk perikanan perikanan dikelola sendiri sendiri yang perapatan, untuk perikanan perikanan dikelola sendiri sendiri yang perapatan, untuk perikanan perikanan dikelola sendiri sendiri.

⁷⁰ ibid.,



buruk itu merupakan 2 kg padi maka ia dapat dapat dapat 4 kg. Demikian pula untuk biji padi. Bagi hasil produksi dan produksi biji yang lama adalah "dawa".

Salah satu petani di Kabupaten Siem memiliki tanah pertanian yang sempit dan sering kali hasilnyapun kurang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sama sekali dan hidupnya dengan menjual tenaga sebagai buruh tani. Para petani "dawa" petani miskin dan buruh tani pergi membantu mencari pekerjaan di hilir sebagai buruh bangunan atau buruh jalan, sedangkan pada musim - musim panen dan menanam mereka banyak bekerja di lapangan ladangnya.

Sebagai lokasi tanah di Kabupaten Siem membentang luas, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Siem berada di dataran rendah yang terdapat yang sampai saat ini masih aktif. Disamping itu wilayah Kabupaten Siem juga banyak diliri oleh sungai - sungai yang mengalir sepanjang tahun. Di antara : sungai Progo, sungai Krakak, sungai Miring, sungai Kradak, sungai Pado, sungai Manung, sungai Boyag, sungai Kuning, sungai - sungai, sungai Cawa, dan sungai Lening. Sungai - sungai ini selain digunakan untuk keperluan irigasi juga dimanfaatkan sebagai tempat membuang limbah yang mungkin dapat, untuk, dan lain - lain. Potensi yang ada di sini ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hidroelektrik (PLN), tinggal bagaimana PLN itu memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan yang dimanfaatkan hidupnya.

Salah satu hal yang mungkin juga ada pada Kabupaten Siem adalah Kabupaten Siem bisa terdapat terdapat potensi wilayah

Kelengkapan Circa 1911. Dimana bila diperlihatkan dengan sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kesajahteraan yang nyata. Maka tidak mengherankan para budak IRI di Kolopaten Siemeng selaku wakil-wakilnya yang berada di TAW B Hagit II Circa, melalui perwakilan para pemerintah dengan departemen-departemen lainnya agar lebih selektif dalam pemanfaatan tanah berkulak tanah-kasah yang ada di tanah pertanian mengingat semakin sempitnya lahan pertanian di Kolopaten Siemeng selanjutnya. ⁷³)

Selain selektif dalam pemanfaatan tanah pertanian, yang menjadi perhatian IRI orang Siemeng adalah pemanfaatan sebagian lagi-lagi yang ada di Kolopaten Siemeng yang biasanya dipakai sebagai tempat menambang bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, kerakal dan kerikil. Biasanya selektif terhadap usaha penambangan bahan-bahan bangunan tersebut dengan harapan untuk menjaga kelangkaan lingkungan setempat. Dimana bila sunggih-sungguh itu tanah yang ada adalah bahan-bahan yang juga akan dibutuhkan kondisi alam sekitarnya, misalnya bila musim hujan tiba akan rang di daerah yang rawan banjir. Maka IRI Kolopaten Siemeng tidak mengherankan mengajak pemerintah untuk mengalahkannya dengan penanaman tumbuh-tumbuhan di sekitar tempat-tempat penambangan dengan harapan untuk menanggulangi bahaya erosi maupun banjir. Sebagai contoh misalnya di sekitar sungai Kuning, sungai Lepar, sungai Bujang dan sungai Santol. Selain itu mengingat bahwa kekabupaten Siemeng merupakan daerah agraris, IRI tersebut pemerintah juga memberikan penyediaan

⁷³ Hal ini wawancara dengan Bpk. G. Harjo, Bpk. Dwidarmanto dan Bpk. Sidiyo tanggal 9 Maret 1993 di Siemeng.

cepat dilihat karena IBI dalam memberikan bantuannya sering berkaitan dengan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Siem. Pada umumnya kondisi wilayah Kabupaten Siem sangat subur dan beriklim Ulin yang sangat cocok sebagai lahan tanaman pertanian. Adanya kondisi daerah yang demikian maka pemerintah atau para petani cenderung untuk mengelola tanah pertaniannya dengan lebih baik. Hal tersebut dimungkinkan untuk dapat menghasilkan produksi pertanian yang lebih meningkat sehingga segala kebutuhan sosial masyarakat dapat terpenuhi.

Hal yang dapat R. D. Binto, sebagai pemerintah yang bertanggung jawab wilayah serta daerah iklim tertentu mempunyai melihat dan aktivitas ekonomi yang telah diteliti oleh para ahli. Hal tersebut ini berpengaruh terhadap pola kegiatan ekonomi yang mempunyai (75) Banteng dan pemerintah daerah Kabupaten Siem, Menteri Kabinet terakhir, Kabupaten Siem mempunyai berkeinginan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah dataran rendah dengan konsep yang ada di daerah. Dengan demikian iklim Kabupaten Siem dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan pemerintah. Maka karena PDI ingin mendapat manfaat dari hasil penelitian politik - pemerintah IBI pemanfaatan potensi ini.

Hal yang dapat R. D. Binto, sebagai pemerintah yang bertanggung jawab wilayah serta daerah iklim tertentu mempunyai melihat dan aktivitas ekonomi yang telah diteliti oleh para ahli.

⁷⁵ R. D. Binto, Geografi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka, 1998), hal. 98

an maini sering menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pemilik aspar hasil pertaniannya, sehingga FDI selaku aparat pemerintah perlu melindungi daerah yang mengalami kesulitan. Sebagai contohnya walaupun daerah Kabupaten Sleman di kenal sebagai sumber air tetapi bila musim kemarau yang panjang, masih banyak kesulitan dan hak pertanian yang mengalami keterlambatan. Dengan kondisi tersebut sebenarnya secara tidak langsung menimbulkan permasalahan bagi para petani yang menginginkan agar hasil usahanya selalu mendapat aliran air yang cukup. Hasilnya ketiadaan air tersebut tentunya dapat menimbulkan biaya-biaya perebutan air diantara para petani. Dalam situasi seperti ini sebenarnya FDI selaku tanggung jawab mengatasi hal ini, sepatutnya melalui aparat pemerintah atau departemen yang terkait mencari jalan keluarnya. Sebagai contoh di wilayah tertentu Desa Wedomertani telah dibuat sumur-sumur pompa yang digunakan untuk memirai air dari pada sungai. Hal ini telah dilaksanakan karena di wilayah Desa Wedomertani ada beberapa sumur-sumur yang terdapat hasil penelitian yang dapat diteliti yang di tulis FDI.⁷⁶⁾

Walaupun hasil yang terdapat pada musim hujan, tetapi biasanya pada musim kemarau panjang, maka itu sebabnya FDI harus lebih siap jika sistem pertanian atau perawalan menjadi lebih baik agar hasilnya dapat meningkat, sehingga dapat menaikkan hasil-hasil pertanian. Bagi petani-petani yang mengalami kesulitan ekonomi yang parah, pada musim kemarau lebih banyak tawaran ke-

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Tpi. Sutawan dan Tpi. Hidayat tanggal 15 April 1997 di Sleman.

pentingnya ekonomi dari pada kepentingan politik. Kepentingan politik lagi sudah dipandang kurang begitu penting oleh masyarakat karena dapat dianggap sebagai kebutuhan diliputi. Karena itulah pemerintah politik lebih sulit ditentang dan itu dianggap lebih berbahaya yang akan dapat menimbulkan krisis, maka hal tersebut dapat ditentang pada waktu krisis politik ekonomi. Akibatnya dengan cara memberikan lapangan pekerjaan pada rakyat, biaya memberikan lapangan kerja kepada rakyat itu sangat mahal.

B. Kandang Perak

1. Kandang Perak Kabupaten Siemang pada tahun 1990 menurut catatan Biro Pusat Statistik Kabupaten Siemang tahun 1990 sebanyak 674.796 jiwa.⁷⁷⁾ apabila angka ini diperhitungkan dengan luas wilayah Kabupaten Siemang yang 574,82 km², maka akan diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata per km² sebanyak ± 1.160 jiwa. Pada tahun 1997 jumlah penduduk Kabupaten Siemang berjumlah 733.241 jiwa.⁷⁸⁾ apabila angka ini diperhitungkan dengan luas wilayah Kabupaten Siemang yang menunjukkan angka 574,82 km² maka akan diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata per km² di tahun 1997 sebanyak ± 1.276 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Siemang pada tahun 1999 menurut catatan Biro Pusat Statistik Kabupaten Siemang menunjukkan angka 769.939 jiwa.⁷⁹⁾ apabila angka ini juga diperhitungkan dengan luas wilayah Kabupaten Siemang maka akan diperoleh angka

⁷⁷⁾ "Kabupaten Siemang Dalam Angka 1997", Biro Pusat Statistik Kabupaten Siemang, 1997, hal. 20

⁷⁸⁾ "Kabupaten Siemang Dalam Angka 1997", Biro Pusat Statistik Kabupaten Siemang, 1997, hal. 24

⁷⁹⁾ ibid.

... 1.200 jiwa. Untuk mendapat informasi lebih lanjut hubungi di Kantor Perwakilan Diakonik Semarang pada pukul 09.00 s.d. 15.00 s.d. pagi berikutnya pada nomor telepon...

Mula penerbitan pembagian rekening pribadi di Kabupaten. Ditinjau dari segi hukum, maka dalam hal ini, pembagian rekening pribadi ini, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, seperti halnya, perusahaan, pejabat sipil, BRI dan sebagainya. Dengan adanya rekening pribadi, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk menabung, baik melalui bank, koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Terdapat beberapa rekening pribadi pada / pribadi / yang telah dibuka rekening pribadi pada rekening pribadi. Untuk itu, rekening / pribadi / yang telah dibuka di Kabupaten Cirebon diantaranya : pabrik semen dan lain-lain di Maguwoharjo, pabrik perikanan di Badi Koror dan perikanan perikanan milik PT. Pertiwi Jaya di Lerah, pabrik tekstil di Lerah di Lerah, pabrik perikanan Perikanan Cirebon di Ngagih, pabrik perikanan di Cioy, pabrik perikanan di Ngagih, pabrik perikanan di Lerah, pabrik perikanan perikanan di Lerah, pabrik perikanan perikanan di Maguwoharjo, perikanan perikanan perikanan di Cirebon dan lain-lain, perikanan perikanan perikanan di Cirebon, pabrik perikanan CV. Maguwoharjo di Ngagih, perikanan perikanan perikanan di Ngemplak, perikanan perikanan perikanan di Ud. Lerah di Ngagih, UD. Suci Agung Perikanan di Jalan Kalitengah No. 7, dan lain-lain.

Untuk perikanan / pribadi / masyarakat lainnya di perikanan...

nya padat karya atau membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal ini merupakan / pabrik / perusahaan tersebut merupakan suatu masyarakat masyarakat sebagai juga untuk masyarakat di Luar Kabupaten Sleman, bahkan ada hasil perusahaan tertentu yang sampai di Slepon. Kegiatan perkebunan di Kabupaten Sleman bisa dilakukan cukup lama oleh penduduk sebagai sarana transportasi yang berupa jembatan yang sudah dibangun baik dari strategi. Disamping itu masih. Hal yang perlu diperhatikan adalah transportasi yang berupa jembatan yang sudah diperbaiki dengan biaya bantuan masyarakat.

Di lain sisi, produk tradisional sebagai masyarakat modern tidak dapat dipisahkan yang relatif, menurut (Sugeng, 2007: 100) bahwa, produk tradisional itu merupakan ciri yang tetap bertahan hidup setiap masyarakat yang hidup teratur. Sistem tradisional masyarakat yang hidup teratur. Sistem tradisional masyarakat dengan istilah social stratification yaitu perbedaan-perbedaan status sosial yang di Laksanakan secara bertahap. Dasar dari itu adalah masyarakat adalah suatu masyarakat yang hidup di lingkungan yang teratur, tanggung jawab nilai sosial yang masyarakat. Menurut (Sugeng, 2007: 100). Persepsi yang dalam di dalam masyarakat tradisional (Munir dan Munir, 2007)

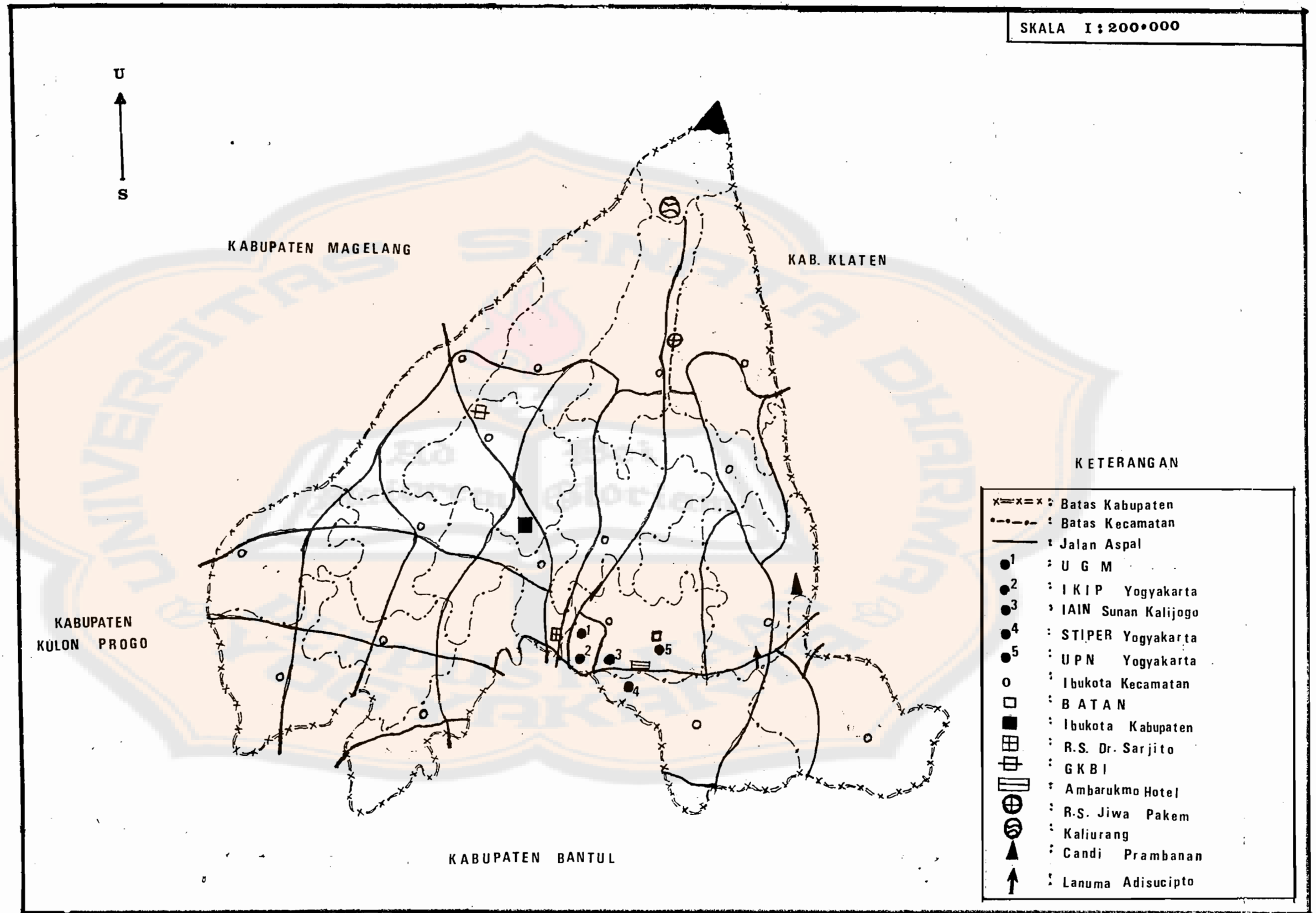
Menurut (Kusumadewi, 2010) dapat digambarkan bahwa tradisi yang ada di masyarakat, seperti tradisi dan budaya. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di samping itu tradisi adalah sosial yang tinggi,

²⁰ Sugeng Soekanto, Sociologi Suatu Pendekatan (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hlm. 124-125

bersama pemerintah mengoperasikan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) guna melatih ketrampilan bagi anak-anak putus sekolah maupun anggota masyarakat yang belum bekerja, menyalurkan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, memberikan kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya. Di sisi lain sarana pendidikan di Kabupaten Sleman cukup baik , maka secara alami penduduknya pun akan semakin dewasa dalam segala bidang kehidupan. Sehingga tanpa harus diperintah, diberi iming-iming maupun komando, masyarakat Sleman yang telah dewasa akan menentukan aktivitas yang terbaik bagi dirinya termasuk dalam menentukan wadah aspirasinya.

Demikianlah uraian mengenai pengaruh kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman terhadap perkembangan PDI cabang Sleman , maka lebih lanjut yakni dalam bab IV penulis akan mencoba menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan PDI cabang Sleman pada pemilu 1982 - 1992 baik yang bersifat intern maupun ekstern.

PETA WILAYAH KABUPATEN SLEMAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN PDI

KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU

1982 - 1992

Indikasi yang mudah ditangkap sesaat, bila suatu organisasi politik atau partai politik mengalami perkembangan adalah adanya kenaikan jumlah suara dalam setiap kali pemilu. Indikasi tersebut bukan satu-satunya alat ukur yang bersifat mutlak, sebab kenaikan jumlah suara dalam setiap kali pemilu untuk masing-masing orsospol atau OPP hanyalah merupakan salah satu alat untuk mengukur adanya perkembangan pada suatu organisasi politik peserta pemilu. Sebagai contoh dinamika PDI di Kabupaten Sleman ini.

Menilik segi perolehan suaranya, PDI di Kabupaten Sleman dalam pemilu tahun 1982 hingga pemilu 1992 dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada pemilu tahun 1982 jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat 671.796 jiwa, jumlah pemilih ada 400.703 jiwa dan PDI memperoleh 58.780 suara. Sedangkan pada pemilu tahun 1987 jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat 733.841 jiwa, jumlah pemilih ada 450.971 jiwa dan PDI memperoleh 62.345 suara. Kemudian di tahun 1992 PDI memperoleh suara 93.466 dari 502.309 pemilih, dimana jumlah penduduk Kabupaten Sleman saat itu tercatat 762.280 jiwa. Hasil perolehan suara PDI pada pemilu tahun 1982-1992 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I

HASIL PEROLEHAN SUARA OPP PADA PEMILU TAHUN 1982-1992
UNTUK DPRD TK II SLEMAN

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
				P P P	Golkar	P D I
1	1982	671.796	400.703	94.510	194.531	58.780
2	1987	733.841	450.971	58.922	276.027	62.345
3	1992	762.280	502.309	99.158	245.835	93.466

Sumber: Kantor Sospol
Kab. Sleman

Keberhasilan PDI Kabupaten Sleman dalam tiga pemilu yang lalu, sudah tentu tidak terlepas dari sejumlah kondisi ataupun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut baik itu faktor intern maupun ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi perkembangan PDI Kabupaten Sleman yang hendak di bahas dalam pembahasan berikut yaitu: Tokoh Idola, Kualitas Personal Partai, Pengorganisasian Partai dan Materi Kampanye. Sedangkan faktor eksternnya meliputi: Sikap Pemerintah dan Keadaan Parpol saat itu.

A. Faktor Intern

1. Tokoh Idola

Suasana kita sekarang sudah lebih maju dari beberapa tahun yang lalu. Masyarakat kita sudah lebih cerdas, lebih matang dan lebih dewasa dalam berfikir. Sejalan dengan itu pertimbangan-pertimbangan rasional tampak lebih banyak mewarnai sikap dan tingkah laku politik mereka kalau diban -

dingkan dengan masa lampau, dimana gejolak hati yang emosional sering memainkan peranan yang dominan. Disamping gejala-gejala kemajuan dalam berfikir secara rasional masyarakat Indonesia telah tumbuh dan hidup sifat-sifat manusiawinya. Manusiawi bukan saja dalam arti berlaku santun dan moralis terhadap sesama bangsa, tetapi juga dalam makna bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna.

Gejala lain yang menunjukkan sikap rasional dan manusiawi itu ialah kerinduan mereka, termasuk generasi muda kepada tokoh-tokoh tertentu yang sudah tiada atau tidak lagi berada di gelanggang kekuasaan politik. Para pemimpin yang berasal dari berbagai aliran, latar belakang, etnis atau agama menarik perhatian mereka karena beberapa hal. Antara lain karena pemikiran-pemikirannya yang jernih dan orisinal, karena perjuangan dan idealismenya, karena watak dan kepribadiannya, karena kebersihannya terhadap hal-hal yang koruptif, dan karena keintimannya dengan pengikutnya. Kualitas-kualitas itu menunjukkan kepada mereka bahwa para tokoh itu bukan hanya hebat, tetapi juga manusiawi. Bukan hanya bersih tetapi juga berwatak.⁸⁴⁾

Kehadiran tokoh idola selain diharapkan oleh masyarakat umum, nampaknya juga sangat dibutuhkan oleh organisasi sosial politik yang masih eksis hingga sekarang. Atau setidaknya - tidaknya mereka membutuhkan tokoh idola untuk keperluan tertentu. Organisasi sosial politik seperti halnya PDI,

⁸⁴ Alfian, Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm. 225

Golkar atau PPP, sangat membutuhkan kehadiran tokoh idola terutama untuk keperluan rekrut massa. Sebab kita ketahui bahwa tugas utama partai politik adalah untuk memaksimalkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses-proses politik.

Satu-satunya tokoh yang sudah tiada tetapi mempunyai hubungan dan pengaruh sangat besar terhadap PDI adalah Sukarno. Beliau adalah sosok manusia yang memiliki banyak kemampuan dan kelebihan yang sulit ditemukan pada manusia (tokoh) masa sekarang. Beliau adalah salah satu tokoh pendiri PNI, dimana partai itu pada masa Orde Lama (Orla) menjadi partai yang paling besar di Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau akhirnya pada masa Orde Baru (Orba) dalam setiap kali pemilu "figur Sukarno" diklaim sebagai tokoh milik PDI. Karena kita tahu bahwa setelah pemerintah Orba melakukan restrukturisasi politik khususnya terhadap sistem kepartaian di Indonesia, PNI bersama IPKI, Parkindo, Partai Katolik dan Murba telah memfusikan diri dalam PDI tanggal 10 Januari 1973, dimana kalau kita perhatikan hingga sekarang unsur PNI adalah merupakan unsur yang paling kuat dan berpengaruh dalam tubuh PDI. Maka dalam setiap kali pemilu PDI selalu memanfaatkan nama besar Sukarno untuk merebut hati masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dimengerti bila setiap OPP berusaha mempergunakan berbagai cara agar dalam setiap pemilu mendapat dukungan massa dalam jumlah yang besar. Caranya antara lain dengan menampilkan tokoh-tokoh yang

formal maupun informal, yang dikenal masyarakat luas sebagai juru kampanye bagi OPP yang bersangkutan. Juga dengan menampilkan artis - artis yang terkenal seperti Roy Martin, Ucok Harahap, Sophan Shopian, Rano Karno, Dany Malik dan lain-lain.

Dalam hal ini, PDI berusaha memanfaatkan nama besar Sukarno, yaitu dengan melibatkan anggota keluarga Sukarno, baik dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun pada masa-masa kampanye. Meskipun demikian, ada dua anggota keluarga Sukarno yang terlibat langsung dalam kampanye PDI yaitu Megawati Sukarno Putri dan Guruh Sukarno Putro dan dari keduanya, Megawati yang sangat aktif berkampanye ke berbagai daerah.⁸⁵⁾ Lalu kehadiran mereka menjadi faktor utama dari jumlah massa yang besar untuk mendukung kampanye PDI. Dimanapun kampanye yang menampilkan Megawati sebagai jurkam selalu dikunjungi massa yang cukup melimpah. Anggota keluarga Sukarno yang ditampilkan agaknya dimaksudkan juga sebagai salah satu cara untuk menarik kembali para pendukung PDI dan untuk membangkitkan lagi nostalgia kebesaran partai yang pernah berjaya pada masa Orla. Sebagaimana diketahui, sejak kemenangan Orba banyak warga PNI yang hijrah ke Golkar.

Pemanfaatan tokoh idola oleh PDI untuk menarik simpati massa, memang telah berulang-ulang dilakukan dalam setiap kali pemilu oleh para fungsionaris PDI baik di pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya fungsionaris PDI di Ka-

⁸⁵ Adriana Elisabeth Sukanto, dkk., PDI Dan Prospek Pembangunan Politik (Jakarta: Grasindo, 1991) hlm. 5

bupaten Sleman juga menjalankan pola seperti itu. Namun di sini perlu ditambahkan bahwa fungsionaris PDI di Kabupaten Sleman karena kejeliannya dalam menangkap fenomena-fenomena yang ada terhadap pola tersebut, akhirnya mampu mengembangkan pola yang lebih khusus dalam usaha rekrut massa. Mereka menggunakan tokoh-tokoh setempat untuk mempengaruhi massa. Biasanya tokoh-tokoh lokal ini adalah merupakan tokoh panutan dari masyarakat sekitarnya. Mereka menjadi panutan masyarakat antara lain karena watak dan kepribadiannya kepandaian dan kedudukan sosialnya serta ketokohan dan kepeloporannya. Misalnya: tokoh-tokoh PDI setempat, guru agama, kyai, ketua pemuda, ketua karang taruna, pemimpin perkumpulan olah raga, pengusaha dan lain-lain.

Taktik tersebut sangat menguntungkan untuk rekrut massa kalangan bawah, sebab secara informal tokoh-tokoh lokal tersebut apabila telah tumbuh sifat loyalnya, mereka dapat digunakan sebagai tokoh-tokoh "tandingan" terhadap tokoh-tokoh dari PPP maupun Golkar yang langsung berhubungan dengan masyarakat lapisan bawah. Disamping itu juga sebagai salah satu terobosan terhadap diberlakukannya sistem "floating mass" sejak tahun 1970-an yang menjadi salah satu penghambat dalam proses rekrut massa.⁸⁶⁾

Yang menjadi saingan berat PDI dalam memanfaatkan "tokoh" untuk kepentingan politis adalah Golkar. Sebagaimana digambarkan oleh Kompas bahwa, Golkar selain memana-

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Hardiman dan Bpk. RA. Barjono tanggal 9 Mei 1993 di Sleman.

atkan tokoh dan pemimpin agama, Golkar juga banyak menampilkan tokoh dan pemimpin formal (fungsionaris) dalam setiap kesempatan kampanyenya. Di satu pihak tampilnya fungsionaris ini pasti membawa keuntungan khususnya dalam menggaet pendukung di daerah - daerah pedalaman atau pedesaan sebab karakteristik dari kecenderungan pola dan sikap memilih lingkungan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh pola dan sikap memilih pemimpin dan tokoh formal.⁸⁷⁾ Sedangkan daya saing PPP tidak seberat Golkar, sebab PPP sendiri selain harus berjuang menghadapi dua rekannya PDI dan Golkar, PPP juga masih berjuang untuk menemukan wahana yang tepat untuk pengembangan dirinya.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa, tokoh idola baik yang berkualitas nasional maupun regional (lokal) mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan PDI baik secara regional maupun nasional. Tetapi faktor tersebut bukan satu-satunya faktor yang mampu mempengaruhi perkembangan PDI sebab masih banyak faktor yang juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan dan perkembangan partai berlambangkan kepala banteng ini.

2. Kualitas Personel Partai

Pertama tama perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan kelaziman suatu demokrasi, dukungan masyarakat yang sebanyak-banyaknya merupakan hal yang sangat penting dan diper-

⁸⁷ Lihat, Kompas, 6 Maret 1987; juga lihat Tempo, 28 Maret 1987, hlm. 22

lukan oleh parpol atau orsospol yang bersangkutan agar dapat menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya secara lebih leluasa. Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa, PDI Kabupaten Sleman dalam pemilu 1982-1992 yang lalu tampaknya juga berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Keberhasilan parpol atau orsospol untuk mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh kualitas (mutu) personel yang hidup di dalamnya. Yang dimaksud personel dalam pembahasan ini adalah tokoh partai , pemangku jabatan struktural partai, maupun anggota partai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa fungsionaris PDI Kabupaten Sleman, dapatlah penulis katakan bahwa personel PDI Kabupaten Sleman dianggap berkualitas oleh partainya karena faktor pendidikan formalnya, loyalitas dan senioritasnya, serta kemampuan informalnya seperti, ketekunannya dalam " ngelmu kejawen " atau semacamnya. Menurut mereka apabila PDI Kabupaten Sleman itu memiliki personel partai yang ditempati oleh tiga faktor di atas , pasti PDI akan lebih eksis pada masa yang akan datang, sebab pada umumnya tokoh yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya mempunyai pengaruh yang sangat baik di masyarakat.⁸⁸⁾ Namun sayangnya orang-orang PDI baik itu tokoh partai, pemangku jabatan struktural partai maupun anggota partai jarang mempunyai kemampuan yang bersifat terpadu, seperti tersebut di atas karena kriteria semacam itu cukup

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Suharto, Bpk. Sutrisno, Bpk. Herusetyo Efendi dan Bpk. Sugito Harun, tanggal 28 Maret 1993 di Sleman.

ideal.

Bertolak dari pendapat di atas dapat diutarakan bahwa indikasi penilaian terhadap mutu tidaknya personal PDI dalam konteks ini adalah latar belakang pendidikan, loyalitas dan senioritas serta kemampuan informalnya. Kemampuan informal disini mengandung pengertian bahwa orang-orang tertentu dari PDI menjadi berkualitas bukan karena pendidikan formalnya melainkan karena mereka mempunyai "ngelmu" atau ilmu kejawan, seperti: "ngelmu kanoman" atau "ngelmu kanuragan" dan "ngelmu kasepuhan". Ngelmu kanuragan atau ngelmu kanoman adalah ilmu untuk mengembangkan kekuatan badani. Kekuatan badani itu dikembangkan melalui latihan seperti dalam ilmu bela diri (misalnya pencak silat). Disamping itu, juga dikembangkan tenaga dalam atau tenaga rohani yang tersimpan dalam diri setiap orang.⁸⁹⁾

Adapun ngelmu kasepuhan lebih menekankan pengembangan rohani, olah pikir dan rasa. Ngelmu ini biasanya dipelajari dan dipraktikkan oleh mereka yang telah cukup umur dan tidak terlalu banyak memikirkan kebutuhan hidup yang bersifat duniawi sehingga dapat secara khusuk menyerap dan menerapkan berbagai ilmu kasepuhan. Berbagai ilmu kasepuhan ini antara lain ilmu "katuranggan", yaitu ilmu tentang wujud fisik binatang dan manusia (uda wedana) yang berkaitan dengan perilakunya. "Petungan" yaitu ilmu tentang perhitungan hari, "mistik" atau ilmu ketuhanan. Bagi mereka yang menja-

⁸⁹ Sartono Kartodirdjo (ed), Pesta Demokrasi Di Pedesaan : Studi Kasus Pilkades di Jateng dan DIY (Yogyakarta : Aditya Media, 1992) hlm. 264

lankan ilmu kasepuhan ini diharapkan untuk menjadi obor bagi orang yang kegelapan dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan dengan tanpa pamrih.⁹⁰⁾

Dalam masyarakat pedusunan Jawa, bagi mereka yang menguasai "ngelmu", misalnya ngelmu kanuragan maupun ngelmu kasepuhan sering dianggap mempunyai kekuatan supra natural (doyo linuwih) sehingga mereka disegani, berkharisma dan mempunyai otoritas. Penguasaan terhadap sumber kekuatan supra natural oleh personal partai, biasanya dilakukan hanya sebagai kompensasi atas rendahnya kemampuan profesional, dimana kemampuan profesional tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi modern saat ini. Meskipun masyarakat Kabupaten Sleman dapat dikatakan telah maju tetapi warisan budaya semacam itu masih banyak hidup di pedusunan-pedusunan. Oleh karena itu personel PDI yang mempunyai otoritas semacam itu dapat mempengaruhi dan menggerakkan massa pedusunan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas partai.

PDI Kabupaten Sleman selain memiliki personel partai seperti tersebut di atas, juga mempunyai personel yang cukup berkualitas karena faktor pendidikan formal, loyalitas dan senioritasnya. Mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi menjadi personel PDI pada umumnya dikarenakan oleh tumbuhnya kesadaran pada diri mereka sendiri. Sedangkan mereka yang belum menjadi personel dan pendukung PDI, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan formal yang cukup baik menja-

⁹⁰ Ibid.

di salah satu incaran PDI dalam proses rekrutmennya. Oleh kelompoknya mereka sering disebut sebagai kaum intelektual atau kaum cendekiawan.

Kaum cendekiawan yang telah menjadi personel PDI, kenyataannya sangat menguntungkan terhadap kemandirian, demokratisasi, rekrutasi dan perkembangan organisasinya, sebab karena kemampuan nalar dan kebebasan berfikirnya mereka mampu memandang jauh ke depan serta mampu memberikan gambaran kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Dengan kemampuan tersebut mereka dapat melihat, memahami tentang sesuatu hal melebihi orang kebanyakan. Untuk mendapatkan kemampuan ini disamping harus ada dasar, juga memerlukan persiapan, latihan dalam mempelajari suatu masalah.⁹¹⁾ Dengan demikian mereka lebih profesional dalam melakukan aktivitas-aktivitas organisasi.

Potensi kaum cendekiawan tersebut, kemudian banyak dibutuhkan oleh partai, misalnya untuk kebutuhan "Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)", yang mana hasil penelitian dari Balitbang tersebut sangat berguna bagi perkembangan partai. Pada umumnya dan kenyataannya PDI di tingkat cabang (kabupaten) secara khusus belum memiliki badan penelitian sebagai anak cabang Balitbang pusat. Atau dengan perkataan lain PDI di tingkat cabang belum terkondisikan dengan badan penelitian semacam itu. Tetapi karena

⁹¹ Selo Soemardjan, "Peranan Cendekiawan Dalam Pembangunan Nasional", dalam: Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed), Cendekiawan Dan Politik (Jakarta: LP3ES, 1983) hlm. 51-53. Juga lihat, Jarmanto, Kepemimpinan Sebagai Ilmu dan Seni (Yogyakarta: Liberty, 1983) hlm. 47

PDI di tingkat cabang mempunyai personel dari kalangan cendekiawan, maka tugas dan fungsi Badan Penelitian setempat, biasanya di jalankan oleh personel dari kalangan cendekiawan, sebab secara teoritis mereka telah terkondisikan dengan bidang tersebut. Inilah salah satu keuntungan partai apabila personalnya berlatar belakang pendidikan tinggi. Untuk itu di sini perlu diberi gambaran bagaimana kondisi pendidikan personel PDI Sleman. Menurut keterangan Ngadiyono yang pada periode 1989-1994 menjabat sebagai sekretaris I DPC PDI Sleman menerangkan bahwa: kepengurusan PDI Sleman periode 1979-1984 ada 15 pengurus, dari jumlah tersebut 1 berpendidikan Sarjana, 4 Sarjana Muda, 2 jebolan Perguruan Tinggi, 6 SMTA, dan 2 berpendidikan Scaakelschool. Pada periode 1984 - 1989, dari 15 pengurus terdiri 2 Sarjana, 6 Sarjana Muda, 2 jebolan Perguruan Tinggi, 5 SMTA. Sedangkan pada periode 1989 - 1994 dari 16 pengurus, terdiri 4 Sarjana, 6 Sarjana Muda, 3 jebolan Perguruan Tinggi dan 3 SMTA.⁹²⁾

Meskipun PDI Kabupaten Sleman telah memiliki personel yang berkualitas bila ditinjau dari segi pendidikan formalnya, namun partai ini tetap membutuhkan personal yang setia dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang kepartaian atau politik. Mereka ditempatkan pada posisi yang cukup baik karena umur, pengalaman, lama serta prestasi kerja. Personel yang demikian biasanya dimanfaatkan oleh personel yang lebih "muda" sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan untuk keperluan pengembangan partai, seperti misalnya: bagai -

⁹² Hasil wawancara dengan Bpk. Ngadiyono tanggal 25 Maret 1994 di Sleman.

mana mereka pada masa yang lalu menggunakan taktik untuk menarik anggota baru, menghimpun dana, berkomunikasi dengan birokrat, berkomunikasi dengan orsospol lain, berkomunikasi dengan massa pendukungnya dan lain sebagainya.

3. Pengorganisasian Partai

Seperti telah dijelaskan pada bab yang terdahulu bahwa organisasi adalah suatu bentuk kerjasama dari anggota-anggotanya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama secara teratur dan kontinyu untuk mencapai tujuan tertentu. Bertolak dari pendapat tersebut pengorganisasian di sini mengandung pengertian bagaimana organ PDI terutama organ yang mempunyai otoritas, mengelola anggota-anggotanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas demi tercapainya suatu tujuan. Di Kabupaten Sleman organ PDI yang mempunyai otoritas untuk mengelola partai adalah ketua beserta stafnya (pengurus).

Ada tiga hal pokok yang selalu dilakukan oleh pengurus partai dalam rangka pengorganisasian, dimana tiga hal pokok pengorganisasian berikut menurut pendapat para fungsionaris PDI Kabupaten Sleman sangat menentukan terhadap eksistensi PDI di Kabupaten Sleman. Pertama, yaitu pengorganisasian dana. Kedua, rekrutasi dan kaderisasi, serta ketiga yaitu komunikasi vertikal dan horisontal yang baik.

Pengorganisasian dana adalah merupakan salah satu aktivitas organisasi yang sangat penting, sebab dana adalah ibarat darahnya suatu organisasi. Oleh karena itu organisasi akan berjalan lancar apabila didukung dana yang memadai, namun sebaliknya organisasi tidak akan mencapai tujuan yang

diharapkan apabila tidak didukung dana yang cukup baik. Karena dana merupakan sarana vital organisasi, maka pengorganisasian dana ditempatkan pada posisi pertama dalam pengorganisasian partai.

Pengorganisasian dana disini meliputi kegiatan penggalan dana dan pemanfaatannya. Secara formal atau berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PDI Bab XVII pasal 45 sumber dana PDI diperoleh dari: uang pangkal dan iuran anggota partai, iuran wajib dari anggota yang bertugas dalam lembaga-lembaga kenegaraan serta sumbangan dan pendapatan lain yang sah. Namun khusus untuk PDI Kabupaten Sleman, ketentuan tersebut tidak semuanya bisa berjalan, sebab tanpa uang pun PDI Kabupaten Sleman masih kesulitan memperoleh anggota yang benar-benar bisa loyal. Oleh karena itu penggalan dana PDI Kabupaten Sleman disesuaikan dengan kondisi setempat. Menurut beberapa fungsionaris PDI Kabupaten Sleman, dana PDI Kabupaten Sleman dari tahun 1982-1993 pada umumnya hanya diperoleh dari iuran wajib dari anggota yang duduk di DPRD, bantuan tahunan dari pemerintah, uang pangkal yang bersifat suka rela dari anggota baru, donatur dari anggota partai (biasanya bagi anggota yang ekonominya baik) dan donatur dari masyarakat. Iuran wajib bagi anggota PDI yang duduk di DPRD pun sifatnya sukarela. Maksudnya besar-kecilnya iuran wajib bagi anggota PDI yang duduk di DPRD tidak dipukul rata tetapi disesuaikan dengan kondisi personelnya.

Berdasarkan keterangan H. Herusetyo Efendi, kondisi dana PDI Kabupaten Sleman tahun 1982 ± Rp. 12 juta berasal dari bantuan tahunan dari pemerintah Rp. 3,5 juta, iuran dari ang-

gota yang duduk di DPRD TK II Sleman Rp. 5 juta, iuran sukarela fungsionaris PDI ± Rp. 1,5 juta, donatur dari masyarakat dan anggota partai yang ekonominya baik ± Rp. 2 juta. Pada tahun 1987 kondisi dana PDI Kabupaten Sleman ± Rp. 16 juta, Rp. 4,5 juta bantuan tahunan dari pemerintah, Rp. 6 juta dari anggota yang duduk di DPRD dan yang 5,5 juta berasal dari iuran sukarela fungsionaris PDI, bantuan dari DPD serta donatur dari anggota yang ekonominya baik. Sedangkan kondisi dana tahun 1992, beliau hanya mau menerangkan (memberitahu) ada ± Rp. 25 juta, dimana antara lain dana itu diperoleh dari bantuan tahunan pemerintah Rp. 6 juta, bantuan dana transportasi penunjang pemilu dari pemerintah Rp. 2,5 juta dan iuran dari anggota yang duduk di DPRD Rp. 8 juta.⁹³⁾ Dana itu kemudian dimanfaatkan untuk semua kegiatan partai, misalnya: kampanye, pergantian pengurus, rapat-rapat, peringatan hari ulang tahun partai, bantuan terhadap anggota atau partisipan yang kena musibah, dan lain-lain.

Pengorganisasian partai yang tidak kalah pentingnya dengan pengelolaan dana yaitu rekrutasi dan kaderisasi. Menurut keterangan Dwiswanto dan Ngadiyono, proses rekrutasi dan kaderisasi PDI Kabupaten Sleman berjalan lambat. Menjelang pemilu 1982 jumlah anggota PDI baru ± 2.227. Pada tahun 1987 bertambah menjadi ± 2.632, dan pada tahun 1992 berjumlah ± 3.164.⁹⁴⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

⁹³ Hasil wawancara dengan Bpk. H. Herusetyo Efendi tanggal 19 Maret 1994 di Sleman.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Dwiswanto dan Bpk. Ngadiyono pada tanggal 9 Maret 1994 di Sleman.

secara formal anggota PDI Kabupaten Sleman dari tahun 1982-1992 masih sangat sedikit. Namun berkat pengorganisasian pengurus terhadap jumlah anggota yang relatif masih sedikit ini, PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982 mampu memperoleh 58.780 suara, pemilu 1987 memperoleh 62.345 suara dan pemilu 1992 memperoleh 93.466 suara. Berdasarkan fakta itu dapatlah kita pahami bahwa kenyataannya anggota PDI Kabupaten Sleman tidak sekedar menjadi anggota biasa tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai penggerak atau kader.

Mengacu pada pendapat Miriam Budiardjo, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu mencari anggota-anggota yang baru dan mengajak mereka yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini rekrutasi atau rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.⁹⁵⁾ Dengan demikian, berarti masalah rekrutasi atau rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kaderisasi dan partisipasi politik.

Secara umum, bila rekrutasi menyangkut soal proses pencarian anggota-anggota yang baru dari suatu partai politik, maka kaderisasi atau sering juga disebut sebagai rekrutasi elite politik, lebih menitik beratkan pada masalah proses mencari dan mempersiapkan mereka yang akan tampil sebagai pemimpin (elite) politik, termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin partai politik.

⁹⁵ Miriam Budiardjo, " Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar ", dalam: Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Gramedia, 1981) hlm. 16

Sementara itu, partisipasi politik seperti di uraiakan oleh Miriam Budiardjo adalah:

" kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public polcy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat atau anggota parlemen, dan sebayanya ".⁹⁶⁾

Pada hakekatnya perihal rekrutasi dan kaderisasi setiap parpol dan organisasi-organisasi yang lain mempunyai cara dan pola tersendiri. Selama ini, PDI dapat dikatakan tidak mempunyai pola-pola yang khusus guna mencetak kader. Rekrutasi dan kaderisasi yang berlaku di PDI berlangsung melalui bekas unsur-unsur pendukungnya. Kader - kader atau calon-calon pemimpin PDI diajukan oleh unsur-unsur dan / atau ormas-ormas yang semula merupakan onderbouw (organisasi yang bernaung di bawah partai politik) unsur-unsur yang bersangkutan.

Pola rekrutasi dan kaderisasi melalui bekas unsur dan ormas onderbouw biasanya dilakukan oleh partai-partai politik yang menganut sistem keanggotaan tidak langsung. Sedangkan sistem keanggotaan langsung dianut oleh partai-partai yang tidak mempunyai ormas onderbow. Dengan kata lain, keanggotaan parpol bersifat perorangan.⁹⁷⁾ Menurut sistem keanggotaan tidak langsung maka ormas yang berfungsi merekrut anggota dan mencetak kader-kader, kemudian menyalurkannya

⁹⁶ Ibid., hlm. 1

⁹⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, PNI Dan Kepoliticannya (Jakarta : Rajawali, 1984) hlm. 1 - 3

ke partai politik. Sementara itu pada sistem keanggotaan langsung, partai menggunakan ranting - ranting dan cabang -cabangnya sebagai unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antara anggota dan partai yang sekaligus berfungsi melaksanakan rekrutasi dan kaderisasi.

Selama ini partai-partai politik di Indonesia pada umumnya menganut gabungan antara sistem keanggotaan lang - sung dan tidak langsung. Namun yang lebih menonjol adalah sistem keanggotaan yang tidak langsung, dalam hal ini kader -kader parpol berasal dari ormas-ormas onderbouwnya. Partai Demokrasi Indonesia pun seperti telah diuraikan, menganut keanggotaan tidak langsung. Misalnya mereka yang menduduki jabatan puncak (ketua umum) selalu berasal dari PNI, dan bila ditelusuri lebih jauh ia berasal dari ormas onderbouw PNI.⁹⁸⁾ Sistem seperti ini berlaku juga di Kabupaten Sleman. Kalau kita amati dari fusinya hingga sekarang Ketua DPC PDI Kabupaten Sleman selalu berasal dari PNI atau ormas onder- bownya. Sebagai contoh Bapak Soetardjo Soerjoguritno, Bapak Sawabi Siswadiyono dan Bapak Sutrisno.

Mekanisme yang dipilih oleh pengurus PDI Kabupaten Sleman dalam proses rekrutasi dan kaderisasi ini, bisa di- katakan merupakan pilihan yang tepat dan dapat mendatangkan keuntungan bagi perkembangan PDI di Kabupaten Sleman, sebab antara lain banyak anggota PNI atau ormas onderbouwnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman. Mereka ada yang te- tap setia terhadap partai ormas masa lalunya, namun ada ju - ga yang mengalihkan aspirasinya ke partai atau organisasi

⁹⁸ Adriana Elisabeth Sukanto, dkk. op.cit., hlm. 79

politik yang lain. Bahkan mereka ada yang berhasil menduduki jabatan dalam pemerintahan, menjadi penguasa dan lain sebagainya. Dari mereka yang secara ekonomis berhasil dan masih loyal inilah PDI Kabupaten Sleman mendapatkan bantuan moril atau materiil yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup partai.

Disamping rekrutasi dan kaderisasi, komunikasi vertikal dan horisontal yang baik perlu diciptakan dalam proses pengorganisasian partai. Kelancaran komunikasi antara pengurus (pejabat partai) dengan anggota partai (partisipan partai) maupun antara sesama anggota partai (partisipan partai) akan menciptakan suatu kekompakan, kemantapan dalam segala aktivitas partai. Dengan demikian partai akan terhindar dari konflik baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan komunikasi vertikal dan horisontal yang baik , PDI Kabupaten Sleman secara rutin empat bulan sekali mengadakan pertemuan pengurus dan minimal satu tahun sekali diadakan pertemuan antara anggota partai dengan pengurusnya, yakni biasanya bertemu dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI. Usaha ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara pengurus partai dengan anggotanya atau pendukungnya maupun antar anggota partai itu sendiri, sehingga konflik internal yang selalu mewarnai kehidupan kepemimpinan di pusat tidak diwariskan ke kepengurusan daerah khususnya kepengurusan PDI di Kabupaten Sleman.

4. Materi Kampanye

Dalam setiap memasuki pemilu DPP PDI biasanya telah menyiapkan tema dan materi kampanye yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap Jurkam yang akan tampil dalam kampanye. Tema dan materi tersebut kemudian disampaikan ke instansi dibawahnya, yakni kepada semua DPD maupun DPC. Butir-butir tema dan materi kampanye ini sifatnya merupakan pedoman bagi Jurkam, dimana baik buruknya pesan yang disampaikan sangat tergantung pada berbagai faktor seperti: kemampuan Jurkam baik dalam penguasaan materi maupun kemampuan oratoriknya, kondisi daerah dalam pengertian peta politik daerah, permasalahan daerah maupun keberadaan PDI di daerah tersebut serta kondisi audiens yang hadir dalam kampanye, seperti misalnya heterogenitas audiens, masyarakat perkotaan atau pedesaan, generasi muda, wanita dan lain-lain. Oleh karena itu Jurkam diharapkan mampu menseleksi materi dan tema kampanye yang dianggap tepat untuk suatu daerah sehingga sasaran kampanye yaitu peningkatan perolehan suara dapat dicapai.

Tema dan materi kampanye tersebut disusun atas dasar landasan Pancasila dan UUD 1945, GBHN, Undang-Undang, Piagam perjuangan PDI, yang kesemuanya akan bermuara pada semangat kebangsaan Indonesia, demokrasi Indonesia dan keadilan sosial.⁹⁹⁾

PDI yang dalam penampilannya pada setiap pemilu se-

⁹⁹ Lihat, Butir Butir Tema Dan Materi Kampanye PDI Dalam Pemilihan Umum 1992, dikeluarkan oleh DPC PDI Sleman, 1992, hlm. 1

lalu mengidentikan sebagai partainya orang muda , petani , nelayan , buruh, dan lain-lain, memang bijaksana kalau dalam pemilihan terhadap tema dan materi kampanyenya selalu menyelaraskan dengan pendukungnya. Adanya keselarasan tema dan materi kampanye PDI dengan pendukungnya tersebut dapat disaksikan dalam setiap kali Jurkam-Jurkam PDI tampil dalam kampanye pemilu. Misalnya dalam pemilu tahun 1982-1992 yang lalu materi yang disampaikan Jurkam kepada masyarakat pada prinsipnya banyak mencerminkan program-program perjuangan partai. Sebagai contoh: PDI menentang korupsi; PDI berusaha meningkatkan taraf hidup nelayan, tukang becak serta berjuang menghapuskan segala beaya pendidikan; PDI menolak segala bentuk monopoli; PDI adalah partai miskin; PDI akan berjuang membela rakyat dari pergusuran rumah dan proses pembebasan tanah yang sewenang-wenang dan tidak adil ; PDI bertekad memperjuangkan hak - hak asasi manusia baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Keselaran isu dan materi kampanye yang disampaikan para Jurkam PDI inilah, yang memungkinkan PDI selalu dipercaya oleh pendukungnya. Karena adanya kepercayaan yang besar dari masyarakat pendukung terhadap PDI, maka tidak mengherankan apabila dikemudian hari kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada PDI semakin bertambah.

B. Faktor Ekstern

1. Sikap Pemerintah

Sikap pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap

parpol atau organisasi politik yang hidup di dalam wilayah kekuasaannya memang mampu mewarnai kehidupan parpol atau organisasi politik tertentu. Sikap pemerintah yang "lunak" terhadap parpol atau organisasi politik di wilayah kekuasaannya tentunya akan menguntungkan terhadap proses perkembangan parpol atau organisasi politik yang ada. Tetapi sebaliknya sikap pemerintah yang "keras" terhadap aktivitas parpol atau organisasi politik, pada umumnya dirasakan oleh parpol atau organisasi politik tertentu menghambat atau merugikan proses perkembangannya. Sebagai contoh sikap pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992.

Sikap pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PDI setempat berbeda antara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Menurut Sutrisno, yang pada periode 1989-1994 memegang jabatan sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Sleman dan sekaligus sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sleman periode 1992-1997, menilai bahwa sikap atau perlakuan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada PDI dari awal pemilu 1982 hingga pemilu 1992 mengalami perkembangan cukup baik. Artinya sikap pemerintah yang pada pemilu 1982 dirasakan PDI cukup keras dengan tekanan-tekanan dan tindakan intimidatif, pada pemilu berikutnya yakni pemilu 1987 sikapnya semakin lunak, bahkan pada pemilu 1992 yang lalu sikap pemerintah cukup baik dan terbuka.¹⁰⁰⁾

Secara formal pemerintah memang memberikan kesempatan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Sutrisno pada tanggal 5 Maret 1993 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman.

yang sama kepada parpol atau organisasi politik untuk mengembangkan organisasinya termasuk di dalamnya untuk mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dalam setiap pemilu. Tapi kenyataannya banyak hal yang dirasakan oleh pihak PDI yang kurang menguntungkan terhadap proses perkembangan partainya. Sebagaimana diutarakan Hardiman dan Sugito Harun bahwa pada pemilu 1982 dan 1987 masih banyak oknum-oknum tertentu pemerintah yang sering melakukan tekanan-tekanan serta tindakan-tindakan yang bersifat intimidatif, misalnya dengan cara menakut-nakuti masyarakat yang hendak masuk PDI atau bahkan hanya ingin menjadi partisipan PDI. Sebagai contoh oknum-oknum tertentu dari pemerintah tersebut mengatakan bahwa mereka yang mau masuk PDI akan sulit mencari pekerjaan atau surat-surat pada instansi pemerintah. Oleh karena itu logis bila pada pemilu 1982 dan pemilu 1987 untuk memperoleh saksi dari pihak PDI untuk TPS - TPS tertentu sangat sulit.¹⁰¹) Disamping itu dari segi keamanan, pada pemilu 1982 petugas keamanan terutama ABRI masih kentara sekali kalau memihak terhadap partai pemerintah. Sedangkan untuk pemilu 1987 dan pemilu 1992 pihak petugas keamanan terutama ABRI mulai bersikap lebih netral. Maka dalam pemilu 1987 dan pemilu 1992 di Kabupaten Sleman, justru berjalan cukup lancar dan lebih demokratis.

Kebaikan sikap pemerintah terhadap PDI maupun organisasi politik lain, selain dengan cara menghilangkan sikapnya yang berbau intimidatif juga diwujudkan dalam pemberian

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Hardiman dan Bpk. Sugito Harun pada tanggal 21 Maret 1993 di Sleman.

bantuan dana yang semakin adil . Sebagai contoh misalnya pemberian dana transportasi untuk ketiga OPP dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilu 1992, masing-masing OPP sama yaitu Rp. 2,5 juta. Selain itu bantuan pemerintah setiap tahunnya untuk PDI juga semakin ditambah . Misalnya untuk bantuan tahun 1982 berjumlah Rp. 3,5 juta, pada tahun 1987 dinaikkan menjadi Rp. 4,5 juta dan tahun 1992 berjumlah sebesar Rp. 6 juta .¹⁰²⁾ Dengan demikian sikap pemerintah Kabupaten Sleman yang semakin baik ini menjadi motivasi bagi partai berlambangkan kepala banteng ini untuk semakin menampakkan jati diri yang sesungguhnya dalam percaturan politik di Kabupaten Sleman.

2. Kondisi Parpol Lain

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap perkembangan PDI di Kabupaten Sleman, khususnya dalam perolehan jumlah suara pada pemilu yang diselenggarakan antara tahun 1982-1992 adalah situasi kehidupan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cabang Sleman pada periode tersebut, terutama situasi kehidupan PPP menjelang pemilu 1982 dan pemilu 1987.

Menurut keterangan H. Wardhani yang pada periode 1982-1987 menjabat sebagai anggota DPRD TK II Sleman dari FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan), kondisi kehidupan PPP cabang Sleman menjelang pemilu 1982 cukup baik. Maksudnya meskipun pada saat itu unsur-unsur yang tergabung dalam PPP

¹⁰² Lihat, Jurnal Pemilu 1992 Kabupaten Sleman No.25, dikeluarkan Deppen Kabupaten Sleman, 1992, hlm. 2

di tingkat pusat dalam kondisi konflik, namun untuk PPP cabang Sleman dalam kondisi utuh dan stabil serta belum terpengaruh oleh ulah pimpinan-pimpinan tingkat atasnya. Maka dari itu pada pemilu 1982 PPP cabang Sleman masih mampu memperoleh 94.510 suara dan menempatkan 9 wakilnya di DPR D TK II Sleman.¹⁰³⁾ Dengan demikian pada pemilu kali ini PPP cabang Sleman masih diatas PDI, yang hanya meraih 5 kursi di DPRD .

Berbeda dengan situasi menjelang pemilu 1987. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arifin, yang pada periode 1992 - 1997 menjabat sebagai anggota DPRD TK II Sleman dari FPP, beliau menerangkan bahwa secara psikologis PPP cabang Sleman dalam pemilu 1987 sangat terpengaruh oleh kondisi kehidupan PPP di pusat, yakni keluarnya NU (Nahdlatul Ulama) dari PPP secara resmi tahun 1984.¹⁰⁴⁾ Keluarnya NU dari PPP tersebut membawa akibat merosotnya dukungan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap PPP pada pemilu 1987. Berdasarkan catatan dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Sleman, pada pemilu 1987 PPP cabang Sleman mengalami penurunan 35.588 suara. Dengan demikian PPP cabang Sleman harus menerima kenyataan atas lepasnya 4 kursi DPRD TK II Sleman yang diraih dari pemilu 1982 .

Berdasarkan fakta tersebut, maka kiranya tidak berlebihan apabila dalam sub pembahasan ini juga diutarakan situ-

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bpk.H. Wardhani pada tanggal 5 Maret 1994 di Maguwoharjo.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Arifin pada tanggal 5 Maret 1994 di Selomartani.

asi konflik PPP pusat yang mengakibatkan keluarnya NU dari PPP. Menjelang pemilu 1982 konflik di dalam tubuh PPP pusat mulai kelihatan ke permukaan. Konflik tersebut secara terbuka bermula dari sikap keras kelompok atau unsur NU dalam FPP di DPR tatkala pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) atas Undang Undang Pemilu, 29 Februari 1980. Lalu sebelum RUU disahkan menjadi Undang Undang (UU) terjadi perdebatan yang sengit dengan fraksi-fraksi di DPR, khususnya antara FKP (Fraksi Karya Pembangunan), FPP dan FPDI (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia).¹⁰⁵⁾

Perdebatan itu berlangsung " alot " dan memerlukan waktu yang lama. Namun hasilnya ternyata tidak dapat mempertemukan perbedaan pendapat antara FPP dan pemerintah. Materi yang benar-benar diperjuangkan dengan sengit oleh FPP dan ditolak pemerintah berkaitan dengan duduknya parpol dan Golkar dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik selaku anggota maupun sebagai wakil ketua. Pemerintah hanya menyetujui kedudukan parpol dan Golkar sebagai pengawas dalam KPPS.¹⁰⁶⁾

Dalam peristiwa itu kelompok NU di FPP menganggap kehilangan peluang untuk memperjuangkan RUU pemilu, apalagi setelah penolakan pemerintah terhadap keinginan parpol dan Golkar agar duduk di dalam KPPS. Materi yang diperjuangkan bagi NU menjadi masalah-masalah yang dianggap prinsipil sehingga sulit untuk menerima dengan begitu saja RUU agar disahkan

¹⁰⁵ Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru (Jakarta: Grasindo, 1991) hlm. 54

¹⁰⁶ Basit Adnan, Kemelut di NU: Antara Kyai dan Politik (Solo: CV. Mayasari, 1982) hlm. 70-71

menjadi UU. Oleh karena itu, anggota FPP dari unsur NU memutuskan tidak menghadiri sidang pada waktu RUU itu disahkan.¹⁰⁷⁾ Sedangkan unsur-unsur PPP yang ikut mengesahkan RUU yaitu MI (Muslimin Indonesia), SI (Serikat Islam) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mulai saat itu terjadilah keretakan hubungan antara NU dengan unsur-unsur lain yang berfusi dalam PPP.

Kondisi tersebut diperburuk dengan tidak diperhatikannya usulan NU atas perimbangan keanggotaan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada pemilu 1982 oleh DPP PPP serta ditolakannya surat protes NU kepada LPU (Lembaga Pemilihan Umum) pada tanggal 6 November 1981 yang dinilai tidak adil. Sementara itu NU sebenarnya menginginkan agar perimbangan antar unsur hasil pemilu 1977 (NU 56, MI 25, SI 14 dan Perti 4).¹⁰⁸⁾ Oleh sebab itu menjelang pemilu 1982 tokoh penting NU seperti: Abdurahman Wahid, Saifudin Zuhri, Jusuf Nasjim, Chalik Ali dan Imron Rosadi mengancam akan keluar dan melepaskan diri dari PPP.

Kekecewaan tokoh-tokoh NU terhadap perimbangan keanggotaan pada pemilu 1982 dan tergesernya orang-orang NU dalam kepengurusan partai merupakan sumber lahirnya keputusan NU pada tahun 1984 keluar dari PPP. Keluarnya NU dari PPP menjelang pemilu 1987 ini, membawa konsekwensi negatif bagi partai ini, yakni suatu " pengembosan " terhadap PPP dalam pemilu 1987 secara nasional maupun lokal. Pengembosan ini

¹⁰⁷ Syamsuddin Harris, op.cit., hlm. 54 . Lihat juga, Kompas, 1 Maret 1980.

¹⁰⁸ Syamsuddin Harris, Ibid., hlm. 56

menurut R. William Liddle disebabkan karena dilarangnya pemimpin-pemimpin NU menduduki jabatan dalam partai politik serta adanya tindakan dari tokoh-tokoh terkemuka NU yang menjelajah seluruh pelosok negeri menyiarkan kepada anggota dan pendukungnya bahwa " tak wajib nyoblos PPP, tak haram nyoblos Golkar, tak jahat nyoblos PDI " .¹⁰⁹⁾

Menurut pendapat Rusli Karim , tiadanya harmonisme hubungan antara elite pimpinan partai PPP menyebabkan persiapan partai ini tampak kurang begitu serius dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung. Perpecahan diantara kedua unsur di tingkat pimpinan pusat tersebut, mau tidak mau mempengaruhi pimpinan di tingkat bawahnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan pernyataan tokoh-tokoh NU tersebut di atas. Dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan kurangnya dana yang memadai, maka partai ini tidak sempat melakukan semacam santi aji, kursus kilat, penataran atau sebagainya bagi orang-orang yang akan diterjunkan dalam pelaksanaan pemilu sejak dari tingkat pusat sampai ke desa-desa.¹¹⁰⁾

Berkaitan dengan kejadian perpecahan yang berlarut - larut di dalam tubuh PPP terutama peristiwa NU yang keluar dari PPP, serta kekecewaan warga PPP yang meluas terhadap kepemimpinannya akibatnya sebagian " bekas " pendukung dan simpatisan PPP di Kabupaten Sleman mencari tempat penyaluran aspirasi politik ke PDI atau Golkar. Secara demikian muncullah " perlombaan " antara PDI dan Golkar di Kabupaten Sleman

¹⁰⁹ R. William Liddle, op.cit., hlm. 94 - 95

¹¹⁰ Rusli Karim, Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992) hlm.2-3

untuk saling beradu kecepatan menggaet suara dari warga NU yang pada mulanya merupakan pendukung PPP.

Diakui oleh H.Wardhani dan Arifin, bahwa secara formal warga NU Sleman belum pernah menyatakan keluar dari PPP cabang Sleman. Namun kenyataannya pada pemilu 1987, PPP cabang Sleman terpaksa kehilangan 4 kursi di DPRD TK II Sleman, serta penyusutan suara bila dibandingkan perolehan suara pemilu 1982. Menyusutnya jumlah dukungan masyarakat Sleman terhadap PPP mengakibatkan kenaikan jumlah suara PDI Sleman pada pemilu 1987. Berdasarkan catatan hasil pemilu 1982-1992 dari Kantor Sosial Politik Sleman tercatat bahwa pemilu 1982 PDI Sleman meraih 58.780 suara, pada pemilu 1987 meraih 62.345 suara dan pemilu 1992 meraih 93.466 suara. Tetapi perlu diakui bahwa dalam "perlombaan" merekrut massa pendukung PPP pada pemilu 1987, PDI sangat tertinggal dengan Golkar, sebab secara fisik atau non fisik Golkar mempunyai sarana dan prasarana yang sangat baik untuk keperluan tersebut.

Sedangkan kondisi kehidupan Golkar yang pada setiap waktu kelihatan berjalan baik, rapi, tanpa pernah ada konflik yang berarti, atau pendek kata kondisi kehidupan Golkar jauh lebih baik dari OPP yang lain, maka secara psikologis menimbulkan perasaan "iri hati" bagi PDI. Perasaan iri hati terhadap kestabilan, kedinamisan, kematangan dan keberhasilannya dalam setiap pemilu memicu semangat perjuangan PDI Kabupaten Sleman dalam merealisasikan cita-citanya. Hal ini sesuai benar dengan lambang partai yaitu kepala banteng yang bisa diupamakan sebagai manifestasi perjuangan yang tak terpadamkan.

Demikianlah uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan PDI Kabupaten Sleman, maka pada bab berikutnya akan diuraikan bagaimana peranan PDI Kabupaten Sleman dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

PERANAN PDI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI

DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU

1982-1992

Sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat, maka Negara Republik Indonesia mempunyai lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga-lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana dari kedaulatan rakyat tersebut. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa, konsekwensinya jika rakyat mendelegasikan kedaulatannya, berarti mereka itu mundur. Rakyat tidak lagi memerintah dirinya tetapi mereka diperintah. ¹¹¹⁾

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang ber " Kedaulatan Rakyat " atau " Negara Demokrasi " (demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat). Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Majelis itu terdiri dari anggota-anggota DPR di-

¹¹¹ Roerth Michels, Partai Politik Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi (Jakarta: Rajawali, 1984) hlm. 41

tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil-wakil golongan fungsionaris.¹¹²⁾ Sedangkan anggota DPR baik pusat maupun daerah terdiri atas wakil-wakil dari OPP yang dipilih dalam pemilu dan golongan ABRI yang diangkat.

Dengan konsepsi yang demikian itu diharapkan MPR benar-benar mencerminkan pengejawantahan seluruh golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Ini sangat penting artinya, karena MPR merupakan penjelmaan pemegang kedaulatan rakyat. Sehingga dengan demikian rakyatlah yang berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Uraian di atas menunjukkan betapa penting arti kedudukan dan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam negara Indonesia, dengan harapan lembaga-lembaga tersebut berperanan memperhatikan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya, sebagai realitas pelaksanaan sistem demokrasi.

Pada hakekatnya, asumsi pokok dari suatu sistem demokrasi adalah bahwa mesti ada peluang untuk berbagai-bagai pandangan, dan bahwa pendapat-pendapat yang saling berten-tangan dapat dikemukakan dengan bebas, sehingga semua anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintah lewat wakil-wakilnya di DPR sebagaimana yang diajarkan demokrasi itu sendiri. Maka salah satu kewajiban DPR baik di pusat maupun daerah adalah memperhatikan, memperjuangkan dan berusaha mewujudkan aspirasi rakyat yang diembannya

¹¹² C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Jakarta: Ind Hill Co, 1986) hlm. 1 - 2

sejauh tidak bertentangan dengan sistem demokrasi yang berlaku.

Dalam sistem demokrasi Pancasila musyawarah untuk mufakat adalah menjadi ciri khasnya. Adapun hakekat dari musyawarah-mufakat adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan Hikmat Kebijaksanaan yang tiada lain pikiran (ratio) yang sehat, yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan Negara termaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil / utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk men - capai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab. ¹¹³⁾

Pemahaman terhadap konsep-konsep di atas akan digunakan sebagai acuan terhadap pembahasan mengenai peranan PDI terhadap kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992. Dalam hal ini PDI dengan wakil-wakilnya yang duduk di DPRD TK II Sleman, dipahami sebagai keterlibatan wakil masyarakat dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintah. Pendek kata sebagai wujud sebagian

¹¹³ C.S.T.Kansil, Pancasila dan UUD 1945 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981) hlm. 54 . Lihat juga G.Moedjanto. dkk., Pancasila (Jakarta : APTIK , 1988) hlm. 222-223

peranan PDI dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman . Oleh karena itu dalam pembahasan ini sebenarnya hanya akan bertumpu pada satu pertanyaan " bagaimana peranan PDI Kabupaten Sleman dalam menyalurkan aspirasi rakyat, sebagai wujud peranannya dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman ? .

A. Peranan PDI Dalam Bidang Politik

Peranan PDI Kabupaten Sleman dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman dapat ditelusuri melalui, pertanyaan bagaimana partai tersebut menyalurkan aspirasi rakyat serta bagaimana peranan partai dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat pada umumnya. Menilik " warna " aspirasi yang harus diemban PDI Kabupaten Sleman tersebut meliputi berbagai macam bidang kehidupan, seperti: bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Untuk itu pada pembahasan yang pertama ini akan dimulai dari bidang politik.

Berdasarkan UU RI No.5 Thn. 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah pasal 29 ayat (1), DPRD mempunyai hak: anggaran, mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat, prakarsa dan penyelidikan.¹¹⁴⁾ Maka PDI Sleman sebagai salah satu unsur sistem demokrasi, mempunyai fungsi antara lain menyalurkan, memperjuangkan dan berusaha mewujudkan aspirasi rakyat yang diembannya. Aspirasi rakyat yang di-

¹¹⁴ Lihat, UU RI No.5 Thn. 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No.5 Thn. 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah (Semarang: Aneka Ilmu, 1983) hlm. 49

salurkan lewat PDI yakni melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD TK II Sleman, akan dikomunikasikan dengan wakil-wakil dari unsur-unsur yang lain maupun kepada pemerintah untuk mendapatkan persetujuan atau jawaban.

Melihat tugas yang diemban wakil-wakil rakyat sangat berat, maka DPC PDI Kabupaten Sleman bersama wakil-wakilnya yang duduk di DPRD setiap satu tahun sekali melakukan pembinaan kesadaran berpolitik bagi anggota-anggotanya dengan mendatangkan nara sumber dari kalangan perguruan tinggi maupun dari DPD PDI DIY. Dari kalangan perguruan tinggi misalnya: G.Aryadi SH, Drs.A.Suryadi SW sedangkan dari DPD PDI DIY misalnya: Sutardjo Suryoguritno, Drs. Markus Sumantri, Drs.Suharto, Drs. Suhardjo Tjitrokusumo. Aktivitas ini secara teoritis memang memberi bekal berpolitik praktis bagi warga PDI Kabupaten Sleman, sebab hampir sebagian besar warganya bisa dikatakan tidak berlatar belakang pendidikan dari disiplin ilmu politik atau sebangsanya. Bekal tersebut tentunya sangat berguna bagi warga PDI terutama bagi wakil-wakil PDI yang duduk di DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Ada beberapa hal yang pernah diperjuangkan PDI Kabupaten Sleman melalui wakil-wakilnya di DPRD Sleman dalam bidang politik. Perjuangan PDI dalam bidang politik ini pada hakekatnya juga diselaraskan dengan program perjuangan PDI yang pernah dilontarkan di dalam setiap kali pemilu, misalnya PDI akan memelopori keterbukaan politik, PDI bertekad memperjuangkan hak-hak asasi manusia baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. PDI Sleman juga berusaha untuk menepati janji-janji tersebut lewat perjuangan wakil-wakilnya

yang duduk di DPRD Sleman.

Perjuangan dan kiprah PDI di bidang politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD Sleman dapat kita lihat pada contoh-contoh / uraian berikut ini. Kiprah dan perjuangan PDI Sleman yang hendak dipaparkan berikut sebenarnya hanya merupakan sebagian contoh kepedulian PDI terhadap masalah-masalah politik di Kabupaten Sleman, yang berhasil penulis himpun dari hasil wawancara serta pandangan-pandangan umum fraksi tersebut dalam musyawarah-musyawarah di DPRD TK II Sleman pada periode 1982-1992.

Pada tahun 1982 PDI Kabupaten Sleman melihat bahwa warganya yang berdomisili di Ngemplak ada yang ingin mencalonkan menjadi Perangkat Desa (Kaur Kesra), namun karena warga tersebut (Bingar Sutopo) di kalangan Ngemplak dikenal sebagai aktivis PDI, bahkan pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Kecamatan maka proses pencalonannya secara administratif mengalami banyak hambatan. Seperti di utarakan Hardiman dan Herusetyo Efendi bahwa salah satu hambatannya adalah untuk mendapatkan kartu Golkar. Pada hal kita tahu bahwa syarat tersebut merupakan salah satu syarat bagi calon. Oleh sebab itu warga tersebut nyaris tidak jadi mencalonkan diri, pada hal pendukungnya cukup besar.¹¹⁵⁾ Melihat kenyataan yang demikian maka wakil-wakil PDI Kabupaten Sleman menilai sebagai sesuatu yang tidak adil. Wakil-wakil tersebut kemudian berusaha agar warga tersebut bisa memenuhi sya-

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Hardiman dan Bpk. Herusetyo Efendi pada tanggal 15 Maret 1993 di Sleman.

rat sebagai calon. Akhirnya berkat dukungan masyarakat dan bantuan dari wakil-wakil rakyat tersebut, beliau berhasil menjabat Kaur Kesra.

Seperti halnya diutarakan Suharto, bahwa sebenarnya perjuangan PDI lebih condong kalau Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun dipilih oleh rakyat, sehingga yang lahir bukan hanya pegawai yang bertugas sebagai aparat Pemerintah Desa tetapi betul-betul sebagai pimpinan-pimpinan Desa. Disamping itu beliau menilai bahwa bila ditinjau dari segi keterbukaan, kejujuran dan keadilan terhadap proses pemilihan Perangkat Desa masih belum baik. Sandungan di sana sini bagi calon yang tidak dekat dengan birokrasi sangat banyak. ¹¹⁶⁾

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan masa lalu maka dalam proses pembahasan Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 1986 / 1987 Kabupaten TK II Sleman, PDI dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh R. Suprpto, SW kiranya dapat dikatakan menggugat terhadap proses pemilihan Pamong Desa di Kabupaten Sleman yang berjalan kurang demokratis serta masih terjadi kebiasaan-kebiasaan lama yang dinilai merugikan pihak tertentu. ¹¹⁷⁾ Pernyataan senada diulang kembali oleh fraksi PDI Kabupaten Sleman dalam proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 1991/1992. Namun kali ini sifatnya hanya menyelipkan usulan terhadap pemerintah mengingat pada tahun

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Suharto tanggal 15 Maret 1993 di Sleman.

¹¹⁷ Lihat, Pandangan Umum Babak I Fraksi PDI DPRD TK II Sleman Terhadap RAPBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 1986 / 1987, dikeluarkan DPRD Kabupaten Daerah TK II Sleman, 1987, hlm. 5

1993 akan diselenggarakan pemilihan Perangkat Desa di beberapa Desa di Kabupaten Sleman.

Sorotan dan perjuangan PDI Kabupaten Sleman tidak berhenti pada masalah itu saja. Berdasarkan hasil tour-to-urnya ke desa-desa, PDI menemukan bahwa pada umumnya LMD (Lembaga Musyawarah Desa) di Kabupaten Sleman belum bisa dikatakan mewakili rakyat. Berdasarkan UU RI No.5 Thn. 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa LMD adalah lembaga permusyawaratan / permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan. Apabila pasal tersebut benar-benar menjadi patokan dan dilaksanakan dalam pembentukan LMD maka dapatlah dipahami bahwa LMD adalah merupakan perwujudan wakil seluruh lapisan masyarakat di tingkat Desa. Dengan demikian selaras apabila dalam kehidupan demokrasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan LMD, seperti tertulis dalam UU RI No.5 Thn. 1979 pasal 3 ayat (1).

Ketentuan seperti tersebut di atas ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan. Menurut pendapat Suharto dan Sudiyo, LMD di Kabupaten Sleman itu pada umumnya belum mewakili seluruh lapisan masyarakat karena proses pembentukannya belum digali dari bawah melalui suatu pemilihan, namun pada umumnya dengan cara ditunjuk oleh aparat. Maka wajar bila hasil musyawarah LMD justru sering bertentangan dengan aspirasi rakyat. Sebagai contoh peristiwa unjuk rasa masyarakat Wedomartani tahun 1989 terhadap rencana penutupan sumber air Umbul Pajangan. " Peristiwa Umbul Pajangan "



ini pada dasarnya merupakan protes kaum tani wedomartani, yang secara turun-temurun menggunakan aliran air Umbul Panjang sebagai satu-satunya sumber irigasi. Namun karena potensi airnya yang cukup besar dan bersih maka Pemda Sleman akan menjadikan sebagai Proyek Air Minum (PAM) untuk lokasi Condong Catur. Sementara itu hasil musyawarah LMD setempat pun menyetujui terhadap rencana proyek tersebut. Sedangkan alternatif pengganti sumber irigasi itu belum diberikan kepada masyarakat, maka terjadilah unjuk rasa di depan Kantor Kepala Desa Wedomartani. Atas peristiwa itu maka wakil - wakil PDI di DPRD TK II Sleman tidak segan-segan mengajak pemerintah untuk benar-benar merealisasikan UU RI No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa khususnya pasal 17 ayat (1).

Di sisi lain untuk mencoba mengatasi diberlakukannya sistem " floating mass " oleh pemerintah yang dirasa merugikan, PDI pernah mengusulkan kepada Pemda Sleman agar PDI Kabupaten Sleman diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat Kecamatan atau Desa di luar kegiatan pada masa-masa pemilu. Tetapi perjuangan ini belum berhasil karena masih menjadi pertimbangan pemerintah.

Sedangkan bila ditinjau dari keikutsertaan dalam proses pemilu, PDI Kabupaten Sleman dari pemilu tahun 1982-1992 bisa dikatakan sangat aktif. Selain aktif dalam kampanye-kampanye yang telah dijadwalkan, PDI Kabupaten Sleman juga aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan. Misalnya selalu mengirimkan warganya menjadi anggota Panwaslak TK II (Panitia Pengawas Pelaksana) di Kabupaten, menjadi Panwaslakcam (Panitia Pengawas Pelaksana Kecamatan), menjadi PPD TK II (Pa-

nitia Pemilihan Daerah) mengirinkan saksi, maupun mengirinkan warganya untuk menjadi anggota Satuan Tugas Keamanan (SATGASKAM).

B. Peranan PDI Dalam Bidang Ekonomi

Tidak jauh berbeda dengan peranannya dalam bidang politik, PDI Kabupaten Sleman juga aktif menyalurkan aspirasi rakyat di bidang ekonomi. Perjuangan PDI dalam bidang ekonomi juga dilakukan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD Sleman dengan jalan mengajukan usul, saran, pendapat atau bahkan memperjuangkan agar mendapatkan persetujuan dari unsur-unsur yang ada di DPRD maupun dari pihak pemerintah. Pada kenyataannya bahan usulan, saran, atau pendapat yang diperjuangkan PDI merupakan hasil pengamatan dan penyelidikan yang dilakukan melalui tour-tour yang bersifat formal maupun non-formal terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Seperti misalnya pengamatan dan penyelidikan mereka terhadap kehidupan koperasi, perdagangan, pertanian, perkebunan, pungutan berbagai macam pajak dan lain-lainnya.

Ada beberapa hal yang pernah diperjuangkan PDI Kabupaten Sleman yang merupakan wujud peranan PDI dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman bila ditinjau dari bidang yang diperjuangkan yakni ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satriyo Pidekso dan Sudiyo, menerangkan bahwa kurang lebih antara tahun 1980-1983 ada wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan Godean yang dijadikan areal pertanian Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Namun karena areal yang digunakan, lebih cocok ditanami padi serta bila diperhitungkan hasilnya lebih baik bila ditanami padi maka hasil tebu dirasakan

merugikan rakyat. Oleh karena itu atas kepedulian wakil-wakil rakyat dari FPDI saat itu, mengusulkan kepada departemen yang terkait lewat pemerintah agar budi daya tebu dialihkan ke lokasi lain yang lebih cocok misalnya di wilayah Turi. Atas hasil usulan tersebut pemerintah kemudian menurunkan penyuluh-penyuluh pertaniannya untuk memberi penerangan agar setelah panen tebu usai diganti dengan tanaman padi atau polowijo. 118)

Pengamatan PDI terhadap kehidupan pertanian di Kabupaten Sleman juga menjadi bahan usulan PDI kepada Pemerintah Daerah TK II Sleman. Partai ini melalui fraksinya antara lain tahun 1987 mengusulkan agar pemberantasan hama pertanian lebih ditingkatkan, dengan harapan ada alokasi dana yang lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya mengingat bahaya hama padi yakni wereng dan tikus semakin besar. Namun usulan ini belum membuahkan hasil, justru dana untuk pemberantasan hama kali ini lebih diperkecil dari anggaran sebelumnya, dengan alasan karena keterbatasan dan kecilnya dana yang ada.

Perhatian PDI yang lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi ialah penghijauan. Untuk mewujudkan kondisi alam yang ideal, Kabupaten Sleman senantiasa menggalakkan program penghijauan dengan fokus perhatian pada lahan kritis lereng Merapi dan lahan pekarangan. Dinyatakan pula bahwa upaya penghijauan telah dilaksanakan di Sleman tidak hanya untuk menghijaukan alam semesta. Tetapi diharapkan dapat memecahkan permasalahan daerah yakni meningkatkan taraf hidup rak-

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Satriyo Pidekso dan Bpk. Sudiyo tanggal 12 Maret 1993 di Sleman.

yat, mencukupi air bersih dan sekaligus menata lingkungan. Oleh karena itu usulan PDI kepada pemerintah untuk penghijauan lahan harus diarahkan dengan penanaman tanaman produktif.

Usulan tersebut ternyata sejalan dengan program penghijauan Pemerintah Kabupaten Sleman. Maka untuk mendukung penghijauan itu Pemda Sleman sejak tahun 1982 telah melaksanakan gerakan peningkatan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah-buahan, seperti Rambutan, Mangga, Kelengkeng, Durian, Manggis dan Salak Pondoh.

Pola wilayah pengembangan buah-buahan juga telah dilaksanakan. Untuk Sleman bagian tengah dan sebagian Sleman bagian timur diarahkan sebagai pusat tanaman Rambutan. Untuk Sleman bagian barat menjadi pusat pertanaman Mangga. Sementara Sleman timur yang berlahan kritis diarahkan untuk pusat penanaman Mangga dan Sukun. Sedangkan untuk kawasan lereng Merapi khususnya di Kawasan Kecamatan Cangkringan untuk pengembangan tanaman kopi Arabica. Kecamatan Turi dan Tempel untuk pengembangan Salak Pondoh dan Kecamatan Pakem untuk pengembangan Kelengkeng dengan tanaman pendukung Pisang Mas, Durian dan Adfokat.

Perhatian PDI yang tidak kalah pentingnya dengan hal tersebut di atas adalah bidang koperasi. Dalam pembahasan Rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang RAPBD tahun 1983 / 1984, FPDI meminta agar Pemda Sleman tidak jemu-jemu-nya membina kehidupan koperasi di Kabupaten Sleman. Pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada, tidak sekedar hanya

memberi bantuan dana tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memonitor penggunaan dana tersebut. Dengan demikian diharapkan koperasi akan menjadi soko guru ekonomi kita. 119)

Sementara itu dalam proses pembahasan RAPERDA tentang RAPBD tahun anggaran 1991 / 1992 FPDI berusaha memperjuangkan dua gagasannya mengenai : satu, pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian bantuan sebagian pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa. Dua, pemberian bantuan penyisihan pajak bangunan kepada Pemerintah Desa. 120) Atau dengan perkataan lain PDI kali ini memperjuangkan gagasannya mengenai " bagi hasil pajak dan retribusi " antara Pemerintah Desa dengan instansi di atasnya. Perjuangan-perjuangan semacam itu selain merupakan peran serta PDI dalam kehidupan demokrasi, juga merupakan usaha PDI Kabupaten Sleman untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang diemban.

C. Peranan PDI Dalam Bidang Sosial Budaya

Pada hakekatnya dalam setiap kali pemilu program utama PDI dalam bidang sosial budaya adalah berusaha meningkatkan peranan wanita, pemuda dan penciptaan lapangan kerja yang baru, serta meningkatkan harkat kemanusiaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejumlah kampanye yang dilaksanakan pada pemilu 1982, 1987 dan 1992, maka dapat digambarkan bahwa ada empat (4) program PDI dalam setiap kali pemilu yang se-

¹¹⁹ Lihat, Pandangan Umum Babak I FPDI DPRD TK II Sleman Terhadap RAPBD Kab. Sleman 1983/1984, dikeluarkan DPRD Sleman, 1983, hlm. 1-2

¹²⁰ Lihat, Pandangan Umum Babak I FPDI DPRD TK II Sleman Terhadap RAPBD Kab. Sleman 1991/1992, dikeluarkan DPRD Sleman, 1992, hlm. 5

lalu diulang-ulang yang tergolong dalam bidang sosial budaya yang relatif sama. Pertama, mengangkat peranan kaum wanita Indonesia dalam pembangunan nasional. Kedua, meningkatkan kualitas dan potensi kaum muda Indonesia. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Keempat, mengangkat rakyat dari kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan.

Dalam hal ini PDI berusaha mengidentikkan dirinya sebagai "partai rakyat kecil" atau "partai orang miskin". Citra ini juga diwujudkan dalam bentuk dibukanya dompet sumbangan dari masyarakat untuk keperluan kampanye. Penonjolan citra "partai miskin" cukup berhasil menarik simpati lapisan masyarakat "kelas bawah", khususnya para tukang becak, pekerja kecil dan para penganggur, kelihatan cukup menonjol dalam setiap kampanye PDI di berbagai daerah.

Program-program tersebut tentunya tidak musnah begitu saja setelah pemilu berakhir. Namun tugas berat yang harus diemban PDI adalah bagaimana mewujudkan program tersebut atau setidaknya bagaimana PDI berjuang untuk mendekati program-program tersebut menjadi kenyataan. Sebab kita tahu fokus perhatian PDI tidak pernah lepas dari usaha memperjuangkan perbaikan terhadap masyarakat kecil.

Salah satu cara yang ditempuh PDI untuk mewujudkan program-programnya adalah melalui perjuangan Wakil-wakilnya di DPRD. Perjuangan PDI Kabupaten Sleman melalui wakil-wakilnya pada prinsipnya hanya sebatas usulan, mengajukan pernyataan pendapat, prakarsa dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dengan demikian PDI tidak dicap sebagai partai yang mandul.

Perjuangan dan kiprah PDI Kabupaten Sleman yang pernah dilakukan dalam rangka merealisasikan program-programnya di bidang sosial budaya selama periode 1982-1992, yang hendak dipaparkan berikut ini, pada prinsipnya merupakan kepedulian PDI Sleman terhadap masalah sosial budaya di Kabupaten Sleman.

Kepedulian PDI Kabupaten Sleman terhadap rakyat kecil misalnya dapat kita lihat ketika membantu kesulitan masyarakat di Sambirejo, Prambanan tahun 1983. Pada waktu itu di wilayah Sambirejo akan dibangun Dam, tetapi proyek tersebut melibatkan sebagian sawah dari penduduk setempat. Sedangkan menurut keterangan penduduk setempat ganti rugi tanah dirasakan masih belum pas atau masih merugikan rakyat. Melihat kenyataan seperti itu maka **kesulitan** dan keluhan masyarakat setempat kemudian ditampung oleh wakil-wakil PDI (Y.Dwiyadi, Hardiman, Paulus Riyanto dan Wagiman Trisnomujiharto) yang kebetulan berdomisili dekat dengan tempat kejadian dan kemudian disampaikan kepada Pemda Sleman agar proyek tersebut ditinjau kembali. Hasil perjuangan tersebut akhirnya membawa hasil yakni ganti rugi sesuai tuntutan rakyat.¹²¹⁾

Perjuangan yang dilakukan PDI tidak semuanya berjalan lancar atau mendapat perhatian dan tanggapan dari pemerintah. Bahkan usulan, saran atau pendapat dari wakil PDI yang sebenarnya merupakan hasil survei justru sering menjadi bumerang bagi wakil yang mengemukakannya. Sebagai contoh pengalaman Hardiman ketika menjabat anggota DPRD Sleman tahun 1987-1992.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Y.Dwiyadi dan Bpk. Hardiman pada tanggal 6 Maret 1994 di Sleman.

Ketika menjabat anggota DPRD Sleman beliau pada tahun 1987 pernah ditugaskan mengikuti tour di Catur Tunggal, ternyata disitu terdapat kasus " diskriminasi " PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Dimana di situ didapati petani miskin yang terpaksa menyewakan tanahnya (menjual tahunan) hanya untuk membayar PBB. Sementara di pihak lain didapati Perangkat Desa yang justru tidak membayar PBB. Kejadian tersebut secara diam-diam direnungkan dan kemudian diungkap dalam musyawarah komisi di DPRD dengan harapan agar kasus itu menjadi perhatian komisi khususnya dan pemerintah pada umumnya. Tetapi apa hasilnya ? ternyata beliau justru ditentang oleh anggota yang lain, pada hal dalam komisi tersebut beliau adalah satu-satunya wakil dari PDI .¹²²⁾

Atas peristiwa tersebut tidak mengurangi semangat PDI Kabupaten Sleman untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang harus diemban. Pada tahun 1992 masyarakat Berbah khususnya masyarakat Kalitirto sempat digelisahkan oleh sebuah perusahaan penyamakan kulit (PT. Progo Budi Jaya) yang disana - lir membuang limbah industrinya ke sungai di sekitar perusahaan tersebut. Akibatnya air sungai di sekitar perusahaan berbau busuk. Disamping itu pada malam hari masyarakat sekitar merasa terganggu oleh bau yang kurang sedap. Maka terjadilah kasus-kasus seperti mengirim surat kaleng ke perusahaan tersebut, bahkan sering ada sekelompok warga masyarakat yang datang ke perusahaan tersebut untuk minta pertanggung - jawaban. Tetapi ada juga sebagian warga yang menyampaikan

¹²² Hasil wawancara dengan Bpk. Hardiman pada tanggal 6 Maret 1994 di Sleman.

permasalahannya ke anggota DPRD yang terdekat. Karena Hardiman merupakan anggota DPRD yang terdekat dengan tempat kejadian dan kebetulan juga dikenal oleh sebagian masyarakat Kalitirto, maka sebagian warga itu menyampaikannya kepada Hardiman. Beliau pun berjanji akan menyampaikannya kepada peme-
tah setempat atau ke Pemda Sleman. Masukan ini kemudian dibawa ke fraksi dan kemudian dikomunikasikan dengan fraksi lain. Atas dasar pertimbangan semua fraksi diadakanlah pe-
ninjauan oleh DPRD Sleman ke tempat kejadian. Atas dasar penyelidikannya maka DPRD mengajak pemerintah untuk segera menangani masalah itu. Akhirnya perusahaan itu pun diperi-
ngatkan oleh pemerintah dan akan dicabut ijin usahanya apa-
bila tidak segera melakukan pembenahan-pembenahan. Karena perusahaan tersebut tetap ingin hidup maka dilakukanlah pe-
ngepakan-pengepakan dan pengeringan limbah. Limbah itu kemudian berguna untuk pupuk tanaman.

Nasib para pedagang kecil di Kabupaten Sleman juga tidak lepas dari perhatian PDI Sleman. Sebagai contoh kepe-
dulian PDI Sleman terhadap pembongkaran gubuk-gubuk peda-
gang Salak Pondoh di sepanjang Jalan Magelang, Margorejo ,
Kecamatan Tempel tanggal 2 Januari 1992 , oleh aparat
Muspika setempat guna menghadapi Lomba Adipura. Pembongkar-
an tersebut dilakukan karena dinilai tidak mendukung kein-
dahan sepanjang Jalan Magelang. Akibat pembongkaran itu,
keesokan harinya muncul aksi corat-coret di sepanjang lo-
kasi gubuk yang dibongkar. Corat-coret tersebut berisi ce-
moohan dan caci maki terhadap kepemimpinan penguasa setem-
pat. Maka munculah penilaian Dwi Siswanto (Sekretaris FPDI

Sleman) yang dikemukakan lewat " Bernas " mengatakan bahwa, pengrusakan yang dilakukan aparat Muspika Tempel tersebut sebagai satu hal yang kurang manusiawi, karena pembongkaran itu otomatis mematikan penghasilan pedagang kecil tersebut. Pada hal mereka rata-rata mampu menambah penghasilan antara Rp.2000 - Rp. 5000 per hari. Kalau sekedar alasan untuk meraih piala Adipura, mestinya tidak perlu dengan pembongkaran. Tetapi ditata sehingga kelihatan bersih dan rapi, sekaligus untuk memperlihatkan spesifikasi berjualan masyarakat kita. Ini secara tidak langsung mendukung program agrowisata Salak Pondoh yang akan dikembangkan.¹²³⁾

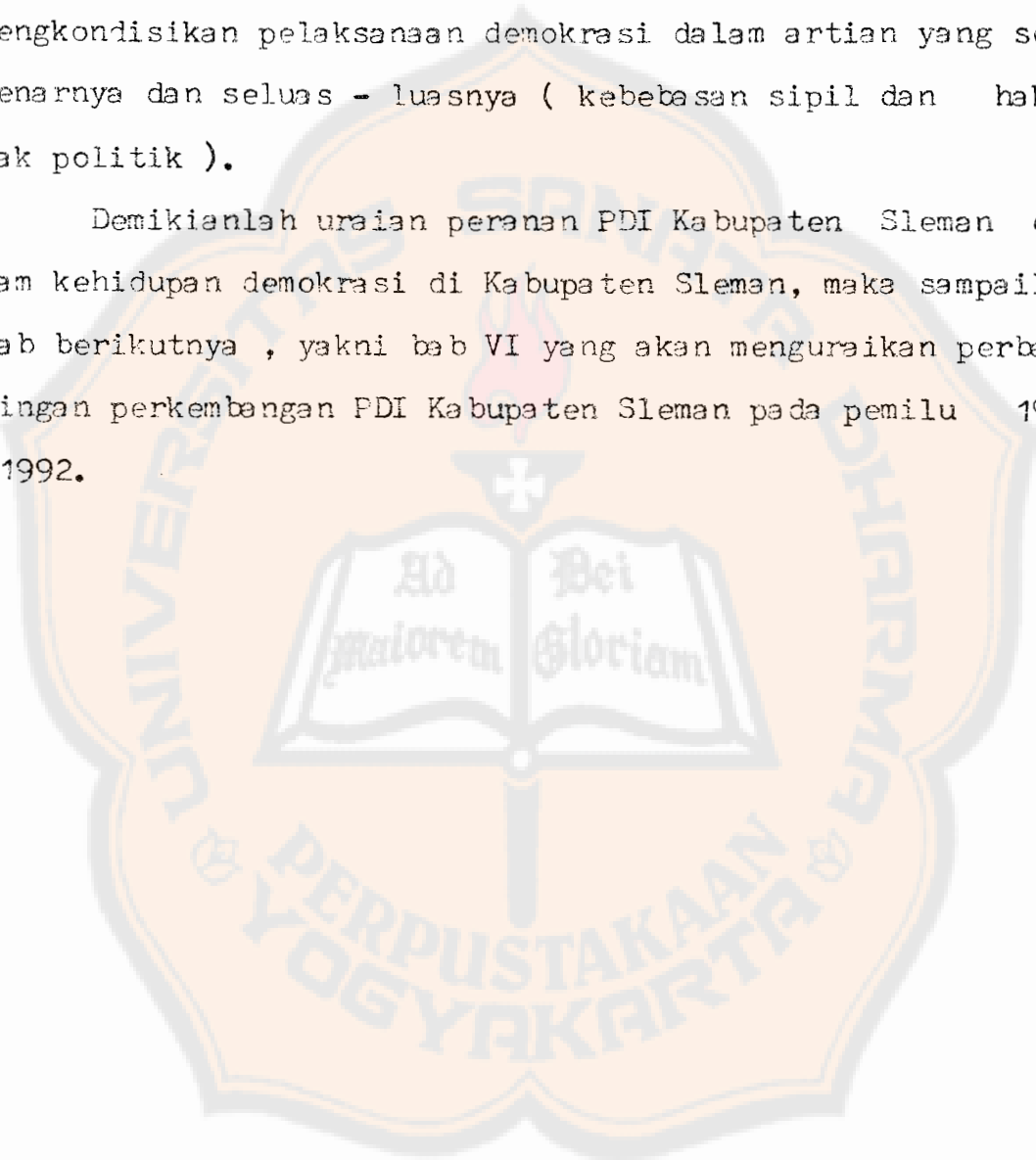
Sebagai partai yang menghargai hasil karya pendahulunya, maka dalam bidang kebudayaan khususnya seni, dari PDI Sleman juga pernah mengusulkan kepada Pemda Sleman agar dilakukan pembinaan terhadap kesenian tradisional yang masih hidup di Kabupaten Sleman, seperti: Reog, Jathilan, Ketoprak, Wayang, Baduwi, Slawatan dan lain-lain. Usulan tersebut ternyata sejalan dengan program kerja Departemen Kesenian setempat. Maka dari itu hasil pembinaan tersebut kemudian secara rutin dalam setiap bulan Oktober, yakni bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari ABRI, digelar pameran pembangunan di Kabupaten Sleman yang antara lain juga mementaskan kesenian-kesenian tradisional hasil binaan Departemen Kesenian tersebut.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa , PDI Kabupaten Sleman tidak sekedar berperanan sebagai

¹²³ Lihat, Bernas , 12 Januari 1992

alat kontrol terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerin - tah dan hanya sekedar sebagai salah satu unsur dalam meka - nisme demokrasi di Kabupaten Sleman, tetapi peranan yang **lebih** penting adalah sebagai lembaga yang selalu berjuang mengkondisikan pelaksanaan demokrasi dalam artian yang se - benarnya dan seluas - luasnya (kebebasan sipil dan hak - hak politik).

Demikianlah uraian peranan PDI Kabupaten Sleman da - lam kehidupan demokrasi di Kabupaten Sleman, maka sampailah bab berikutnya , yakni bab VI yang akan menguraikan perben - dingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982 -1992.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PDI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILU 1982 , 1987 DAN 1992

Dalam pemilu yang diadakan pada tahun 1982, 1987 dan 1992 di Kabupaten Sleman, tampak PDI Kabupaten Sleman mengalami suatu perkembangan khususnya kalau dilihat dari segi perolehan jumlah suaranya. Hal itu disebabkan karena dalam setiap kali pemilu pendekatan yang digunakan PDI untuk menggaet massa adalah mengidentikkan dirinya sebagai partainya anak muda , petani, nelayan, tukang becak, buruh dan lain sebagainya. Maka logis kalau PDI kabupaten Sleman ini pendukungnya kebanyakan berasal dari masyarakat lapisan bawah.

Perbedaan yang nampak antara pelaksanaan pemilu 1982 dengan pemilu 1987 dan 1992 adalah adanya Pancasila diteapkannya sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada pemilu 1982, partai politik dan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu masih mencerminkan asas ciri khas mereka. Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, ketiga kekuatan sosial politik disamping memakai asas Pancasila, juga dibenarkan untuk memakai asas ciri khas, seperti asas Islam untuk PPP, asas demokrasi, kebangsaan (nasionalisme) dan keadilan sosial (sosialisme Indonesia) bagi PDI; kekaryaan rohaniyah dan jasmaniah untuk ke-

sejahteraan bangsa dan keadilan sosial dalam rangka Pancasila bagi Golkar. Pemakaian asas ciri khas ini dimaksudkan agar ketiga kekuatan sosial politik itu tidak kehilangan tanda atau jatidiri atau kepribadian golongannya.

Undang-Undang No.3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar mengharuskan setiap organisasi kekuatan sosial politik mencantumkan Pancasila sebagai satu - satunya asas dalam anggaran dasar atau rumah tangga organisasi. Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berakibat dalam pelaksanaan pemilu 1987 dan 1992 setiap organisasi kekuatan sosial politik harus meninggalkan asas ciri khasnya. PPP harus meninggalkan asas ciri agama, dan tanda gambar Ka'bah diubah menjadi tanda gambar Bintang, sedangkan PDI juga melakukan perubahan tanda gambar dengan hanya menyisakan gambar Banteng di tengah segi lima.

Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan PDI Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan perolehan suaranya dalam pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 adalah sama, hanya saja pada pemilu 1987 dan 1992 lebih diintensifkan lagi penggalangannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga berpengaruh terhadap hasil pemilu yang kenyataannya meningkat. Dengan demikian untuk lebih jelasnya akan dikaji mengenai bagaimana perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan 1992.

A. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan PDI Kabupaten Sleman untuk

menghadapai setiap kali pemilu adalah berbeda antara persiapan pemilu yang satu dengan pemilu-pemilu yang lain. Kesiapan PDI Kabupaten Sleman dalam melakukan persiapan-persiapan menghadapi pemilu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi partai baik di pusat maupun daerah serta situasi dan kondisi lingkungan setempat. Sebagaimana yang dialami PDI Kabupaten Sleman dalam persiapan menghadapi pemilu 1982, 1987 dan 1992.

Sejak kelahirannya hingga sekarang, PDI pada umumnya dikenal sebagai partai yang selalu dirundung kemelut intern yang nampaknya tidak pernah terputus. Tidak jauh berbeda dengan keadaan yang diderita PPP, PDI pun menjelang pemilu 1982 dilanda konflik yang tidak berkesudahan. Pada hakekatnya konflik yang terjadi dalam tubuh PDI disebabkan oleh benturan kepentingan yang bermotif kepentingan pribadi. PDI Sleman dalam periode 1982-1992 secara terbuka memang tidak dilihat adanya konflik. Tetapi secara **psikologis** sebenarnya juga didapati saingan antar unsur dalam mendapatkan kursi yang terhormat. Namun karena tradisi yang diwariskan sejak fusi, unsur PNI selalu menduduki papan terhormat maka unsur yang lain harus menerima dengan lapang dada tradisi yang belum pudar itu.¹²⁴⁾

Perpecahan antara kelompok Isnaeni dan kelompok Sanusi Hardjadinata, yang sama-sama dari unsur PNI, diakhiri dengan pemecatan dan recalling terhadap pengurus dan anggota DPR oleh kelompok Isnaeni.¹²⁵⁾ Perpecahan menyolok antara kedua

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk.R. Barjono pada tanggal 11 Maret 1993 di Sleman.

¹²⁵ Rusli Kerim, op.cit., hlm. 4

kelompok ini telah menyebabkan partai ini hampir tak mempunyai waktu untuk berkiprah dalam menjalankan program partai, kecuali usaha-usaha untuk melakukan konsolidasi antar pengurus, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Bahkan selama beberapa bulan di tahun 1980, kunci kantor DPP PDI berada di tangan pihak keamanan. Hal itu terpaksa dilakukan mengingat konflik antar pimpinan pusat demikian meruncing.

Keadaannya semakin parah, terutama menjelang kongres yang semula direncanakan pada tahun 1980. Kenyataan itu ditandai dengan dibentuknya pimpinan-pimpinan tandingan, terutama dari tingkat cabang. Dan dalam kenyataannya kongres PDI diawal tahun 1981 diwarnai oleh kecaman yang demikian keras dari utusan daerah terhadap DPP yang tidak pernah beranjak dari perpecahan dan perebutan kursi pimpinan. Kongres ini juga ditandai dengan gejala yang sama, yaitu adanya saingan yang keras untuk memperebutkan kursi pimpinan dari kedua kubu yang bersengketa. Karena adanya campur tangan pihak keamanan dan pemerintah maka Soenawar Soekawati terpilih sebagai ketua umum, dengan menyingkirkan Usep Ranuwidjaja yang menjadi pilihan sebagian besar peserta kongres.

Persiapan yang dilakukan PDI Kabupaten Sleman menghadapi pemilu 1982 tidak begitu mantap. Hal itu antara lain terpengaruh oleh situasi konflik di pusat. Akibatnya banyak tokoh, pendukung maupun partisipan PDI di Kabupaten Sleman yang terganggu atau bahkan menghentikan aktivitas politiknya. Ditambah lagi pada saat itu koordinasi kepengurusan kurang baik dan kepengurusan PDI Kabupaten Sleman belum lengkap, terutama untuk Komisariss Kecamatan (Komcam) maupun Kom-

des-nya (Komisariss Desa). Misalnya Komcam Turi, Tempel , Moyudan, Cangkringan dan Komdes Wedomartani, Sidomoyo dan Madurejo. Dengan demikian pendekatan dan komunikasi PDI dengan masyarakat tidak mendapat tekanan pada persiapan pemilu kali ini, pada hal kita tahu basis massa PDI adalah berada pada masyarakat kebanyakan.

Disamping itu suhu intimidatif dari oknum-oknum tertentu terhadap tokoh, pendukung maupun partisipan PDI masih sangat terasa. Sebagai contoh dipanggilnya Hardiman (Komcam Berbah saat itu) oleh Danramil Kalasan, Bpk. Simrangkir pada pemilu 1982 , dimana beliau diperingatkan agar bisa mengendalikan massanya dalam pemilu 1982. Dana yang ada pada saat itu juga sangat minim. Maka pada pemilu kali ini masih banyak poster atau tanda gambar PDI yang terbuat dari bahan-bahan ala kadarnya, seperti " Kepang " atau " Gedhek " bekas. Oleh karena itu pada pemilu 1982 di Kabupaten Sleman, dari pemilih yang berjumlah 400.703 jiwa hanya mampu mengantongi 58.780 suara, dan 5 (lima) kursi di DPRD TK II Sleman.

Ada sedikit peningkatan yang terjadi di dalam tubuh PDI Kabupaten Sleman dalam persiapan menghadapi pemilu 1987. Meskipun menjelang pemilu (April 1986) kepengurusan PDI di tingkat pusat mengalami kemelut, yaitu perebutan ketua umum DPP PDI antara kubu Achmad Subagio dan Hardjanto, yang akhirnya karena kesepakatan bersama, kongres meminta bantuan pemerintah untuk turun tangan, maka akhirnya Mendagri Soepardjo Rustam selaku wakil pemerintah menunjuk Suryadi sebagai pucuk pimpinan PDI.¹²⁶⁾ Tetapi kali ini PDI Kabupaten

¹²⁶ Ganewati Wuryandari, op.cit., hlm. 58

Sleman tidak begitu terpengaruh oleh kemelut tersebut.

Persiapan PDI Kabupaten Sleman menghadapi pemilu 1987 lebih baik. Konsolidasi organisasi segera dilakukan, misalnya dengan melengkapi kepengurusan partai di tingkat kecamatan dan desa, yakni pembentukan Komcam dan Komdes. Menjelang pemilu 1987 yakni tahun 1984 dibentuk Komcam Cangkringan, Tempel, Turi, Moyudan dan Komdes Widodomartani, Madurejo dan Sidomoyo. Setelah Komcam dan Komdes dilengkapi maka jauh-jauh sebelum kampanye telah dilakukan komunikasi antara pengurus cabang dengan Komcam-Komcam dan Komdes-Komdes dalam bentuk rapat-rapat. Disamping itu pengkaderan juga sudah mulai digiatkan yaitu dengan kursus-kursus kader yang dilaksanakan di komplek kantor DPC PDI Sleman. Pada kali ini yang diutamakan mendapat kursus adalah para Komcam dan pengurus partai, dengan harapan setelah kursus selesai mereka mampu menjadi aktivis PDI yang baik dalam kampanye maupun konsolidasi organisasi. Karena persiapan yang dilakukan lebih baik maka dalam pemilu kali ini PDI Sleman mampu menambah satu (1) kursi di DPRD TK II Sleman.

Berdasarkan hasil pengalaman pada pemilu 1982 dan 1987 maka persiapan PDI Kabupaten Sleman menghadapi pemilu 1992, semakin ditingkatkan. Persiapan-persiapan sebagaimana persiapan pemilu 1987 juga dilakukan dalam persiapan pemilu kali ini. Hanya bedanya kalau dalam persiapan pemilu 1987 komunikasi politik hanya ditekankan pada pengurus dengan Komcam dan Komdesnya, maka pada persiapan pemilu kali ini lebih ditekankan dengan masyarakat. Misalnya dengan mengikuti pameran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten

Sleman setiap satu tahun sekali, tanggal 1 - 5 Oktober dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari ABRI. Bila dalam persiapan pemilu 1987 kursus kader hanya diutamakan bagi pengurus dan Komcam, maka untuk persiapan pemilu kali ini lebih diperluas, misalnya bagi Komdes dan anggota partai yang berminat terutama dari angkatan muda baik pria maupun wanita.

Selain persiapan di atas PDI Kabupaten Sleman juga mengadakan pendekatan dengan angkatan tua yang dulu merupakan anggota atau simpatisan dari partai yang berfusi dalam PDI: PNI, Parkindo, Partai Katolik. Pendekatan ini berguna terutama untuk mendapatkan tambahan bantuan dana maupun dukungan moril. Bahkan pada pemilu kali ini mulai diaktifkan lagi fungsi Regu Penggerak Desa (Gurades) dan Regu Penggerak Dusun (Guradus) yang " mlemem " pada pemilu 1987 dan 1982 . Dimana tugas Gurades dan Guradus adalah sangat berat sebab harus mencari pendukung dari masyarakat dengan jalan " door to door " .¹²⁷⁾ Oleh sebab itu wajar kalau dalam pemilu 1992 PDI Sleman mampu menambah dua (2) kursi di DPRD TK II Sleman.

B. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye pemilu 1982, 1987 dan 1992 telah berlangsung dengan baik. Dibandingkan pemilu 1982, pemilu 1987 dan pemilu 1992 dalam menjalani masa-masa kampanye tampak secara re-

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Hardiman tanggal 21 April 1993 di Sleman.

latif lebih tenang. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat pasif atau acuh tak acuh terhadap politik, melainkan mereka telah menanggapi kampanye dengan lebih dewasa, baik dalam sikap, wawasan maupun perilakunya.

Salah satu perubahan dasar antara pemilu 1987 dan 1992 adalah menyangkut soal tema kampanye pemilu. Dalam kampanye pemilu 1982 partai politik dan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu boleh mengemukakan tema-tema kampanye yang mencerminkan asas ciri khas mereka. Di dalam kampanye pemilu 1987 dan 1992, OPP harus memanfaatkan tema kampanye yang mencerminkan program-program pembangunan seperti : Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila Yang Bertumpu Pada Trilogi Pembangunan terutama Pemerataan Pembangunan Dan Hasil - Hasilnya, yang sebagai Pengamalan Pancasila; Dengan Semangat Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial PDI Siap Mengantar Bangsa dan Negara Indonesia Menuju Kemajuan dan Kesejahteraan Dalam Kobersamaan, Kemandirian dan Keterbukaan.

Kampanye pemilu 1987 dan 1992 di Kabupaten Sleman berlangsung dengan menarik. Ketiga OPP secara mufakat mengatur kampanye pemilu secara bergiliran, sehingga masing-masing OPP akan mempunyai kesempatan yang relatif seimbang dalam berkampanye. Sebagai contoh kampanye pemilu tahun 1987 yang diselenggarakan antara tanggal 24 Maret - 17 April 1987, masing-masing OPP mendapat kesempatan antara 7 (tujuh) sampai delapan (8) kampanye. Pemilu 1992 yang berlangsung antara 10 Mei sampai dengan 3 Juni 1992, masing-masing OPP di Kabupaten Sleman mendapat jatah enam (6) kali kesempatan berkampanye. Sedangkan pemilu 1982 belum memakai sistem giliran maupun

sistem blok, maka akibatnya pada pemilu 1982 sering terjadi bentrokan antar OPP yang berkampanye. Sebagai contoh misalnya insiden yang terjadi di Jln. Solo, wilayah Bogem, Kalasan, Yogyakarta, tanggal 23 Maret 1982.¹²⁸⁾

Pengaturan kampanye dengan sistem bergiliran ini pada dasarnya sangat menguntungkan banyak pihak serta memperkecil kemungkinan terjadinya bentrokan atau benturan-benturan fisik antar massa kampanye. Disamping itu meringankan biaya, kampanye bergilir juga membantu mengembangkan suasana kompetisi yang sehat diantara masing-masing OPP dan melahirkan pula kreativitas baru.

Pada prinsipnya kampanye pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, antara lain: rapat umum, pawai, pesta umum, penyiaran melalui RRI / TVRI, segala macam dan bentuk pertunjukan umum, serta penyebaran kepada umum: poster, surat selebaran, brosur, spanduk, slide, film, dan lain - lain. Pengamatan atas kampanye PDI dalam pemilu 1992 masih memperlihatkan persamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu sebelumnya. Dari segi cara dan bentuk kampanye, PDI masih menggunakan cara-cara seperti rapat umum, pawai, kampanye lewat RRI atau TVRI.

Ditinjau dari segi ketepatan peserta kampanye PDI terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kali kampanye, pada umumnya sama antara pemilu yang satu dengan pemilu yang

¹²⁸ Penyelenggaraan Pemilu 1987 dan 1992 di Kabupaten Sleman, dikeluarkan : Panitia Pemilihan Daerah TK II Sleman, 1992, hlm. 77 - 78

lain. Hanya frekwensinya saja yang berbeda. Berdasarkan pendapat umum, setiap kali massa PDI melakukan kampanye yang berbentuk pawai atau sebangsanya biasanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Seperti melecehkan petugas keamanan, merusak gambar OPP pesaingnya, penggunaan kendaraan yang tidak sewajarnya, ucapan atau kata-kata atau yel - yel yang menyinggung kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Hal itu memang wajar, sebab sebagian besar pendukung PDI pada kampanye pemilu 1982, 1987 dan 1992 adalah merupakan generasi muda, dimana secara psikologis kondisi emosionalnya masih labil. Disamping itu banyak pula pendukung PDI yang berasal dari kalangan buruh, petani, nelayan, tukang becak, pengangguran, yang pada umumnya minim pengetahuan tentang hukum atau politik.

Hanya perlu dicatat yang membedakan pelaksanaan kampanye pemilu 1992 dengan pemilu sebelumnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk di dalamnya wilayah Kabupaten Sleman, adalah terjadinya peristiwa 20 Mei 1992 yang sering disebut " Peristiwa Yogya ". Peristiwa ini pada prinsipnya merupakan aksi protes dari massa PDI dan PPP atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY No.042. L / Kpts / DPD I / 1992 tentang pelarangan kendaraan bermotor roda dua untuk kampanye, yang diberlakukan mulai tanggal 20 Mei 1992 pukul 20.00 WIB .¹²⁹⁾ Atas peristiwa tersebut maka mulai

¹²⁹ Budi Susanto, Pristiwa Yogya 1992 (Yogyakarta : Kanisius, 1993) hlm. 9. Lihat, Editor No.37 / Thn.V / 30 Mei 1992, hlm. 16-17. Lihat juga " Hasil wawancara RRI Nusantara II Yogyakarta dengan Bupati Sleman tanggal 30 Mei 1992 " dalam: Jurnal Pemilu 1992 Kab. Sleman No. 32, Deppen. Kabupaten Sleman , 1992, hlm. 1 - 5

hari Kamis tanggal 21 Mei 1992 pukul 21.00 WIB sejumlah simpatisan PDI dan PPP di DIY menurunkan baliho, bendera serta tanda gambar Banteng dan Bintang, untuk selanjutnya diganti kain-kain putih sambil meneriakkan yel " Kami kecewa dan siap Golput " . Mulai saat itulah yel-yel Golput ikut mewarnai situasi kampanye pemilu di Yogyakarta tahun 1992.

Sikap ABRI yang ditampilkan pada waktu pemilu 1987 dan pemilu 1992 sebagai aparat keamanan tampak lebih netral apabila dibandingkan waktu pemilu 1982. Hal ini terlihat bahwa ABRI betul-betul ingin memainkan peranan sebagai dinamisator dan stabilisator secara baik dan konsekwen dalam kehidupan politik, sehingga citra ABRI pada umumnya semakin dipercaya oleh masyarakat.

C. Perolehan Suara Dan Hasil Pemilu

Perolehan suara masing-masing OPP dalam pemilu tahun 1982, 1987 dan 1992 di Kabupaten Sleman memang berbeda-beda. Dilihat dari segi perolehan suara, ada OPP yang dari pemilu tahun 1982-1992 selalu naik. Namun ada yang bervariasi, misalnya dari pemilu 1982 ke pemilu 1987 mengalami kenaikan, tetapi dari pemilu 1987 ke pemilu 1992 mengalami penurunan. Ada juga OPP yang dari pemilu 1982 ke pemilu 1987 mengalami penurunan yang cukup dratis, namun dari pemilu tahun 1987 ke pemilu 1992 mengalami kenaikan jumlah suara yang begitu besar. Perolehan suara yang demikian ini berpengaruh pula terhadap perolehan kursi bagi masing-masing OPP di DPRD Kabupaten Sleman.

Perolehan suara dan kursi PDI Kabupaten Sleman pada

pemilu 1982 sebesar 58.780 suara. Dari jumlah suara tersebut PDI mampu menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan Golkar yang merupakan partai terkuat dan terbesar di Kabupaten Sleman, pada pemilu 1982 memperoleh 194.531 suara dan menduduki 18 kursi di DPRD Sleman. Sementara PPP pada pemilu yang sama mampu menduduki 9 kursi DPRD Sleman, karena pada pemilu tersebut memperoleh 94.510 suara. Dengan demikian pada pemilu kali ini satu (1) kursi PDI di DPRD Sleman mewakili kurang lebih 11.756 warga. Rekapitulasi hasil pemilu masing-masing OPP pada pemilu 1982 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL : 2

REKAPITULASI HASIL PEMILU 1982

Nama O P P	Suara	%	Kursi
P D I	58.780	17	5
GOLKAR	194.531	55,9	18
P P P	94.510	27,1	9

Sumber: Kantor DPC PDI Sleman

Sedangkan perhitungan untuk menentukan jumlah kursi di DPRD TK II Sleman untuk masing-masing OPP pada pemilu tahun 1982 adalah sebagai berikut. Sebagaimana diketahui jumlah DPRD TK II Sleman pada pemilu 1982 ada 40 orang atau pada pemilu kali ini jumlah kursi yang tersedia di DPRD TK II Sleman ada 40 kursi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 yang berjumlah

45 orang. Dari jumlah tersebut 1/5 diantaranya diangkat dari unsur ABRI 8 orang. Dengan demikian maka ada 32 kursi yang diperebutkan OPP melalui pemilu. Atas dasar perhitungan suara pada pemilu 1982 dapat diketahui perolehan suara masing-masing OPP. Berdasarkan jumlah suara yang syah dari ketiga OPP pada pemilu kali ini berjumlah sebanyak 347.821, angka ini kemudian dibagi jumlah kursi yang diperebutkan yaitu 32, maka akan diperoleh Bilangan Pembagian Pemilih (BPP) yaitu 10.869. BPP inilah yang akan menjadi pembagi perolehan suara OPP.

Dengan demikian maka perhitungan perolehan kursi masing-masing OPP adalah berlaku rumus:

$$\text{Kursi} = \frac{\text{Suara yang diperoleh}}{\text{B P P}}$$

Maka perolehan kursi masing-masing OPP sebagai berikut :

$$\text{P D I} = \frac{58.780}{10.869} = 5,40 \text{ (dibulatkan = 5)}$$

$$\text{Golkar} = \frac{194.531}{10.869} = 17,89 \text{ (dibulatkan = 18)}$$

$$\text{P P P} = \frac{94.510}{10.869} = 8,69 \text{ (dibulatkan = 9)}$$

Pada pemilu tahun 1987, PDI mengalami kenaikan jumlah suara begitu tipis (3.565 suara). Golkar mengalami kenaikan begitu besar yakni 81.496 suara dari pemilu sebelumnya. Sedangkan PPP, mengalami kemerosotan suara sejumlah 35.588 dari pemilu sebelumnya. Perolehan suara dan kursi masing-masing OPP pada pemilu kali ini adalah: PDI memperoleh sua-

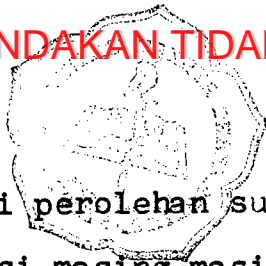
ra 62.345, dan menduduki 6 kursi DPRD TK II Sleman, Golkar memperoleh 276.027 suara dan menduduki 25 kursi DPRD TK II Sleman, sedangkan PFP memperoleh 58.922 suara dan hanya menduduki 5 kursi DPRD TK II Sleman. Dengan demikian maka pada pemilu kali ini, 1 kursi PDI di DPRD TK II Sleman mewakili kurang lebih 10.390 warga. Rekapitulasi hasil pemilu 1987 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL : 3
REKAPITULASI HASIL PEMILU 1987

Nama OPP	Suara	%	Kursi
P D I	62.345	15,7	6
Golkar	276.027	69,4	25
P P P	58.922	14,9	5

Sumber: Kantor DPC PDI Sleman

Perhitungan perolehan kursi masing-masing OPP pada pemilu 1987 di Kabupaten Sleman pada prinsipnya menggunakan rumus yang sama dengan rumus perhitungan sebelumnya. Hanya perlu diketahui bahwa BPP-nya berbeda, sebab pada pemilu kali ini jumlah DPRD TK II Sleman ada 45 orang. Dari jumlah tersebut 1/5 diantaranya diangkat dari unsur ABRI 9 orang. Dengan demikian ada 36 kursi yang diperebutkan OPP melalui pemilu. Oleh karena itu pada pemilu kali ini dapat ditentukan BPP-nya. Berdasarkan jumlah suara yang syah dari ketiga OPP pada pemilu 1987 terjumlah sebanyak 397.294. Angka ini kemudian dibagi jumlah kursi yang diperebutkan yaitu 36, maka akan diperoleh BPP untuk pemilu 1987 = 11.035. PFP



inilah yang akan menjadi pembagi perolehan suara OPP.

Perhitungan perolehan kursi masing-masing OPP pada pemilu 1987 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{P D I} &= \frac{62.345}{11.035} = 5,64 \text{ (dibulatkan = 6)} \\
 \text{Golkar} &= \frac{276.027}{11.035} = 25 \\
 \text{P P P} &= \frac{58.922}{11.035} = 5,33 \text{ (dibulatkan = 5)}
 \end{aligned}$$

Pada pemilu tahun 1992 PDI dan PPP mengalami kenaikan jumlah perolehan suara bila dibandingkan pemilu sebelumnya . PDI kali ini menambah perolehan suara sejumlah 31.122 dan PPP menambah perolehan 40.236 suara . Sedangkan Golkar untuk pemilu kali ini turun 30.192 suara. Kenaikkan jumlah suara PDI tersebut antara lain sebagai akibat Komcam - Komcam PDI Sleman telah dilengkapi dan telah berfungsi sebagai tokoh penggerak di wilayah " kekuasaannya " . Disamping itu komunikasi atas-bawah menjelang pemilu 1992 sangat baik . Tetapi ada juga kemungkinan , masyarakat mulai jenuh menyalurkan aspirasinya ke OPP yang selalu menang dalam pemilu Orba.

Perolehan suara dan kursi masing-masing OPP pada pemilu kali ini adalah : PDI memperoleh suara sebanyak 93.466 suara dan meraih 8 kursi DPRD TK II Sleman, Golkar memperoleh sebanyak 246.835 suara dan meraih 20 kursi DPRD TK II Sleman. Jadi perolehan kursi antara PPP dan PDI untuk pemilu 1992 sama yaitu masing-masing 8 kursi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa satu kursi yang diraih PDI pada pemilu kali

ini kurang lebih 11.683 warga atau anggota masyarakat. Rekapitulasi hasil pemilu 1992 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL : 4
REKAPITULASI HASIL PEMILU 1992

Nama OPP	Suara	%	Kursi
P D I	93.466	21,4	8
Golkar	245.835	56	20
P P P	99.158	22,6	8

Sumber: Kantor DPC PDI Sleman

Perhitungan perolehan kursi masing-masing OPP pada pemilu 1992 pada prinsipnya menggunakan ketentuan yang berlaku pada pemilu sebelumnya. Pada periode 1992-1997 jumlah DPRD TK II Sleman ada 45 orang. dari jumlah tersebut 1/5 diangkat dari unsur ABRI 9 orang, dan 36 kursi lainnya diperebutkan OPP dalam pemilu. Berdasarkan jumlah suara yang syah dari ketiga OPP pada pemilu kali ini terjumlah 438.459, maka BPP-nya = 12.179. Angka inilah yang akan dijadikan pembagi perolehan suara OPP. Maka perhitungan suaranya sebagai berikut :

$$P D I = \frac{93.466}{12.179} = 7,82 \text{ (dibulatkan =8)}$$

$$Golkar = \frac{245.835}{12.179} = 20,18 \text{ (dibulatkan = 20)}$$

$$P P P = \frac{99.158}{12.179} = 8,14 \text{ (dibulatkan = 8)}$$

Ditinjau dari segi perolehan suara dan jumlah kursi

yang diperoleh PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992 dapat dikatakan mengalami perkembangan cukup baik. Sementara itu bila kita tinjau perkembangan massa PDI di setiap kecamatan menunjukkan bahwa, pada umumnya massa PDI di setiap kecamatan dari pemilu 1987 ke pemilu 1992 seluruhnya mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut sebagai akibat mulai berfungsinya Komcam dan Komdes terutama sebagai tokoh penggerak terhadap basis massa. Sedangkan dari pemilu 1982 ke pemilu 1987 massa PDI di kecamatan tertentu (Minggir, Ngeplek, Kalasan, Prambanan, dan Cangkringan) mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan Komcam-Komcam di kecamatan tersebut belum lama terbentuk dan belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk kecamatan - kecamatan tertentu seperti Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik dalam setiap kali pemilu selalu memperoleh suara yang relatif besar bila dibandingkan perolehan kecamatan - kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan antara lain kondisi penduduk atau masyarakat pada kecamatan-kecamatan itu relatif lebih maju serta jumlah penduduknya lebih besar dan padat. Apalagi untuk kecamatan Depok dan Mlati banyak penduduk yang merupakan pelajar atau mahasiswa (penduduk golongan usia muda). Ditambah lagi, di kecamatan Depok dan Mlati banyak berdomisili tokoh-tokoh PDI. Kondisi seperti ini baik langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil pemilu di kecamatan yang bersangkutan. Secara keseluruhan bila ditinjau persentasenya, massa PDI di masing-masing kecamatan sulit untuk mencapai

25 % dari keseluruhan hasil suara di tiap kecamatan, kecuali di Depok, Mlati dan Gamping pada pemilu 1992.

TABEL : 5
HASIL PEROLEHAN SUARA PDI PER KECAMATAN
PADA PEMILU 1982, 1987, 1992 DI SLEMAN

No	Kecamatan	Pemilu 1982	%	Pemilu 1987	%	Pemilu 1992	%
1	Sleman	4.100	18	3.856	15	5.960	20,9
2	Mlati	5.752	23,3	6.308	21,3	8.919	25,8
3	Gamping	5.287	21,2	6.132	21,4	8.444	25
4	Godean	4.201	17,7	5.210	19,2	6.653	22,7
5	Moyudan	2.084	12,2	1.853	10,1	2.810	15
6	Minggir	2.690	15,9	2.196	12	3.314	18
7	Seyegan	2.686	14,9	3.520	16,5	4.670	21
8	Tempel	1.625	7,3	2.143	9,3	4.001	15,8
9	Turi	1.192	8,9	1.250	8,4	2.253	14,1
10	Pakem	2.029	14,5	1.964	12,7	2.950	18,2
11	Cangkringan	1.174	9	650	4,7	1.685	12
12	Ngemplak	2.995	16,6	2.825	13,9	4.698	20,9
13	Ngaglik	4.797	21,8	4.789	17,5	7.390	23,6
14	Depok	8.384	21,9	10.474	21,5	15.550	27,3
15	Kalasan	4.259	19,5	3.907	15,7	5.744	20,8
16	Berbah	2.859	17,5	3.042	16,5	4.552	22,7
17	Prambanan	2.263	11,4	2.015	9,4	3.873	17,4
	Jumlah	58.780	17	62.345	15,7	93.466	21,4

Sumber : Kantor DFC PDI Sleman

D. Evaluasi Terhadap Perkembangan PDI

Sejak terbentuknya PDI tanggal 10 Januari 1973 hingga sekarang, PDI telah mengikuti empat (4) kali pemilu dalam pemerintahan Orde Baru. Keikutsertaan PDI dalam pemilu tersebut turut mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. Ditinjau dari segi perolehan suara dan jumlah kursi yang diraih PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987, dan pemilu 1992, menunjukkan adanya perkembangan di dalam tubuh partai tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

Pertama, konsolidasi organisasi PDI Kabupaten Sleman semakin mantap. Hal ini menandai pula semakin mandirinya PDI Kabupaten Sleman dalam menghadapi pengaruh yang bersifat internal atau eksternal yang merugikan partai. Sebagai contoh kemandirian partai ini dalam menanggapi kemelut yang terjadi di pusat menjelang pemilu 1982 dan pemilu 1987. Kebijakan PDI Kabupaten Sleman dalam berpolitik, terhadap kemelut yang selalu terjadi di tingkat pimpinan pusat, setidak-tidaknya, tidak membawa kerugian yang begitu berarti bagi PDI Kabupaten Sleman. Bahkan setelah adanya konsolidasi organisasi yang baik dalam pemilu 1987 dan pemilu 1992, PDI Kabupaten Sleman mampu menunjukkan jatidirinya dalam pelaksanaan politik di Kabupaten Sleman.

Kedua, pendekatan yang digunakan PDI dalam setiap kali pemilu masih sesuai dengan sasarannya. Pendekatan yang digunakan PDI dalam setiap kali pemilu, guna menggaet massa yang sebanyak-banyaknya adalah mengidentikkan dirinya sebagai partainya " orang kecil " dan partainya orang muda. Hal ini di-

lakukan karena pendekatan yang berbau agama atau pembangunan sudah diklaim oleh OPP yang lain, meskipun kita tahu bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas telah diberlakukan dalam pemilu 1987 dan 1992. Pendekatan yang dilakukan PDI tersebut sebenarnya membawa pengaruh yang positif terhadap perkembangan partainya, sebab diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu sebagian besar tidak berada dalam birokrasi pemerintah.

Ketiga, sikap pemerintah yang semakin jujur, netral, dan terbuka terhadap aktivitas-aktivitas pemilu. Perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987, dan 1992, memang banyak dipengaruhi oleh sikap pemerintah. Sikap pemerintah yang adil, jujur, netral dan terbuka terhadap masing-masing OPP akan membangkitkan suasana kompetitif diantara OPP yang bersaing.

Keayaannya pada pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992, sikap Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap OPP berkembang semakin adil, netral, jujur dan terbuka. Hal ini bisa dilihat antara lain dalam segi pemberian dana yang semakin adil, semakin terbukanya kesempatan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota salah satu partai politik, semakin menghilangnya praktek-praktek dari oknum-oknum tertentu yang bersifat intimidatif. Bahkan dari pihak ABRI semakin kelihatan sikap netralnya terhadap masing-masing OPP. Hal ini menunjukkan bahwa ABRI benar-benar ingin mewujudkan peranannya sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan politik di Kabupaten Sleman.

Keempat, situasi konflik di dalam tubuh PPP menjelang pemilu 1982 dan 1987. Situasi konflik di dalam tubuh partai berlambangkan Bintang saat itu memang memberi angin baru bagi PDI, terutama setelah NU secara resmi keluar dari PPP di bulan Desember 1984. Keluarnya NU dari PPP dan konflik di tingkat pusat yang berkelanjutan membawa akibat pindahnya massa PPP (terutama yang tadinya sebagai pendukung NU baik di pusat maupun daerah) dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Kesempatan ini secepatnya digunakan pihak PDI untuk menggaet massa PPP tersebut.

Kelima, adanya jalinan yang baik antara PDI Kabupaten Sleman dengan generasi tua yang pernah menjadi salah satu unsur partai yang berfusi dalam PDI. Hal ini menguntungkan PDI sebab selain mereka selalu memberi dorongan moral, kadang kala mereka juga menjadi donatur tetap partai berlambangkan kepala Banteng ini. Meskipun ada diantara mereka yang sekarang menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah.

Keenam, kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman yang mendukung terhadap perkembangan PDI Sleman, terutama karena letak Kabupaten Sleman yang strategis serta kondisi masyarakatnya yang secara alami telah maju pola berfikirnya. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan hal-hal tersebut di atas adalah pemanfaatan figur Sukarno (Presiden RI yang pertama) dengan melibatkan anggota keluarganya dalam setiap kampanye pemilu ke seluruh pelosok tanah air.

Namun kenyataannya masih ada hambatan yang membuat perkembangan PDI Kabupaten Sleman masih lambat. Hal ini an-

tara lain disebabkan oleh: selalu terjadinya konflik antar pimpinan di tingkat pusat; kurangnya dana, karena PDI Kabupaten Sleman tidak mempunyai sumber dana lain yang bersifat tetap kecuali: uang pangkal dan iuran anggota partai yang bertugas di lembaga-lembaga kenegaraan, sumbangan dari pemerintah, sponsor, donatur dari anggota yang mampu; serta belum ditemukannya wahana yang tepat sebagai manuver sentral penggalangan massa PDI.

Kita baru saja melihat perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, 1987 dan 1992 dari segi persiapan, pelaksanaan kampanye, perolehan suara dan hasil pemilu serta sedikit evaluasi mengenai perkembangan partai tersebut. Dengan demikian sampailah pada bab VII sebagai bab yang terakhir yaitu kesimpulan secara keseluruhan mengenai pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan.

BAB VII

K E S I M P U L A N

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, akan disajikan kesimpulan tentang apa yang telah diuraikan dalam bab pertama sampai bab VI. Pertama, restrukturisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, khususnya terhadap sistem kepartaian di Indonesia telah melahirkan partai politik berlambangkan kepala banteng yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI terbentuk sebagai akibat merger (penggabungan) yang terjadi antara Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Murba yang memfusikan diri bersama-sama tanggal 10 Januari 1973. Proses fusi PDI di tingkat pusat juga diikuti oleh cabang-cabangnya di daerah, baik di daerah TK I maupun daerah TK II. Namun fusi PDI di daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi partai maupun lingkungan dimana partai tersebut hidup. Sebagai contoh PDI di Kabupaten Sleman baru melaksanakan musyawarah fusi pada pertengahan bulan Februari 1973. Proses fusi PDI Kabupaten Sleman berlangsung melalui tiga tahap yakni: (1) pendekatan secara organisatoris, yaitu dengan cara kunjung mengunjungi antar organisasi dengan harapan tercipta suatu keakraban antar pengurus partai sebelum diadakan musyawarah fusi; (2) musyawarah, dalam tahap

ini berlangsung musyawarah antar pimpinan partai-partai yang berfusi. Namun dalam musyawarah hanya dihadiri oleh wakil-wakil dari PNI, Parkindo dan Partai Katolik ; dan tahap yang terakhir yaitu secara formal di akhir bulan Februari 1973 dihadapan Kodim 0732 ketiga partai secara resmi menyatakan fusi dalam PDI, kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan ke pusat.

Kedua, sejak kelahirannya hingga perkembangannya dewasa ini, PDI Sleman telah mengikuti pemilu sebanyak 4 kali yaitu pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987 dan pemilu 1992. Secara nasional dalam setiap kali pemilu, PDI memang selalu menempati urutan terakhir. Namun untuk pemilu 1982, 1987 dan pemilu 1992, PDI Sleman mampu bersaing dengan PPP. Bahkan kalau ditinjau dari perolehan suara dan jumlah kursi yang diraih PDI Sleman menunjukkan adanya suatu perkembangan di dalam tubuh partai tersebut. Pada pemilu 1982 , PDI Sleman memperoleh 58.780 suara dan menduduki 5 kursi DPRD TK II Sleman. Sedangkan pada pemilu 1987 PDI Sleman naik menjadi 62.345 suara serta meraih 6 kursi DPRD TK II Sleman. Dan pada pemilu 1992 PDI Sleman mampu meraih 93.466 suara dan menempatkan 8 wakilnya di DPRD TK II Sleman. Perkembangan PDI Kabupaten Sleman yang demikian itu, dipengaruhi oleh adanya interaksi antara PDI dengan lingkungan dimana PDI hidup, yakni kondisi sosio geografis Kabupaten Sleman. Unsur-unsur sosio geografis Sleman yang mampu mempengaruhi perkembangan PDI Sleman meliputi letak dan luas wilayah, keadaan tanah, kondisi iklim dan keadaan penduduk atau kondisi masyarakatnya yang relatif telah maju.

Ketiga, bila ditinjau dari kaca mata organisasinya atau lembaganya yang bernama " Partai Demokrasi Indonesia " di Kabupaten Sleman, maka ada dua (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perkembangan dalam tubuh PDI di Kabupaten Sleman pada pemilu 1982-1992. Faktor yang pertama yaitu faktor intern, dimana faktor ini meliputi tokoh idola, kualitas personal partai, pengorganisasian partai dan materi kampanye. Sedangkan faktor eksterennya yaitu meliputi sikap pemerintah dan kondisi parpol yang lain (PPP dan Golkar) pada masa-masa menjelang maupun pelaksanaan pemilu 1982 - 1992 .

Keempat, dengan perkembangan yang dicapai oleh PDI Kabupaten Sleman maka membawa akibat semakin tumbuh dan berkembangnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Sleman untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat PDI, berarti semakin memperkuat eksistensi PDI Kabupaten Sleman dalam percaturan politik di Kabupaten Sleman. Kepercayaan masyarakat terhadap PDI yang semakin meningkat ini, sebagai akibat semakin baiknya PDI Sleman yang betul-betul ingin memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi mereka, melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Kelima, perolehan hasil akhir yang dicapai Organisasi Peserta Pemilu khususnya PDI dari pemilu 1982 sampai pemilu 1992 tampak ada perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada meningkatnya jumlah pemilih, terjadinya pergeseran pola memilih masyarakat, tahap persiapan dan pelaksanaan kampanye yang semakin baik serta perubahan perolehan jumlah suara dan perubahan jumlah kursi yang diraih di DPRD TK II Sleman. Hal itu dapat dikatakan sebagai gejala adanya dinamika dalam ke-

hidupan masyarakat. Dinamika masyarakat akan terlihat dalam perolehan hasil akhir setiap pemilu yang selalu menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan. Hal itu dapat dilihat pada perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Sleman pada pemilu 1982, pemilu 1987 dan pemilu 1992.

Dengan demikian bagi Partai Demokrasi Indonesia harus selalu tanggap terhadap adanya gejolak yang ada dalam masyarakat dan dapat menyelaraskan dirinya dengan segala dinamika kehidupan masyarakat. PDI yang telah dipercaya oleh sebagian masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya selalu dituntut agar mampu merealisasikannya. PDI bagi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pembina masyarakat ke arah pembangunan baik fisik maupun mental masyarakat. Tujuan tersebut akan tercapai jika PDI selalu melaksanakan koreksi terhadap situasi dan kondisi organisasinya. Disamping itu diperlukan juga suatu peningkatan kualitas bagi organisasi dan personaliyanya dalam pelayanannya terhadap masyarakat yang kadang-kadang karena nikmatnya kekuasaan yang diembannya sering melalaikan pada tujuannya semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alfian

1986 Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia ,
Jakarta : Gramedia

Alfian dan Sjamsuddin, Nazaruddin (ed)

1988 Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia , Jakarta :
Rajawali Perss

Basit, Adnan

1982 Kemelut di NU: Antara Kyai dan Politikus , Solo :
CV Maysari

Bintarto, R

Geografi Sosial, Yogyakarta : UP Spring

Budiardjo, Miriam

1982 Dasar Dasar Ilmu Politik , Jakarta : Gramedia

Gottschalk, Louis

1975 Mengerti Sejarah: Terjemahan Nugroho Notosusanto ,
Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia

Haris, Syamsudin

1991 PPP Dan Politik Orde Baru , Jakarta : Grasindo

Indrawijaya, Adam I

1989 Perubahan Dan Pengembangan Organisasi , Bandung :
Sinar Baru

Jarmento

1983 Kepemimpinan Sebagai Ilmu dan Seni , Yogyakarta :
Liberty

Karim, Rusli

1983 Ferjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah
Potret Fasang Surut , Jakarta: Rajawali

Karim, Rusli

1992 Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia ,
Yogyakarta: Media Widya Mandala

Kartodirdjo, Sartono

1992 Pesta Demokrasi Di Pedesaan: Studi Kasus Filkades
Di Jateng Dan DIY, Yogyakarta: Aditya Media

- Legge, John D
 1985 Sukarno Sebuah Biografi Politik , Jakarta: Sinar Harapan
- Liddle, R. William
 1992 Pemilu Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik , Jakarta: LP3ES
- Magenda, Burhan (Penyunting)
 1992 Sikap Politik Tiga Kontestan , Jakarta: Sinar Harapan
- Mangkubumi, H
 1989 Kerangka Dan Konsepsi Politik Indonesia , Yogyakarta: Mitra Gama Widya
- Mas'ood, Mochtar dan Andrews, Colin Mac
 1982 Perbandingan Sistem Politik , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Michels, Roberth
 1984 Partai Politik Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi , Jakarta : Rajawali
- Moertopo, Ali
 1974 Strategi Politik Nasional , Jakarta : CSIS
- Moedjanto, G. dkk
 1988 Pancasila , Jakarta : APTIK
- Poerwadarminta, W.J.S
 1987 Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka
- Samsudin
 1972 Pemilihan Umum 1971 , Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Perss
- Sanit, Arbi
 1981 Sistem Politik Indonesia , Jakarta : Rajawali
- Sjamsuddin, Nazaruddin
 1984 PNI Dan Kepoliticannya , Jakarta : Rajawali
- Soekanto, Soejono
 1987 Sociologi Suatu Pengantar, Jakarta:Rajawali Perss
- Soetarto
 1981 Dasar Dasar Organisasi , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

- Sukanto, Adriana Elisabeth. dkk
 1991 DDI Dan Prospek Pembangunan Politik , Jakarta : Grasindo
- Sundarso
 1992 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Metodologi Penelitian Administrasi Dan Skripsi , Semarang: Fisisipol Universitas Diponegoro
- Sundhaussen, Ulf
 1986 Politik Militer Indonesia 1945 - 1967 , Jakarta : LP3ES
- Susanto, Budi
 1993 Feristiwa Yogya 1992 , Yogyakarta : Kanisius
- Sutopo, Soejay.M
 1959 Indonesia , Djakarta : Gramedia
- Tjasyono, Bayong
 1986 Iklim Dan Lingkungan , Bandung : Cendekia Jaya Utama
- N. N
 1983 UU RI No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Dan UU RI No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah , Semarang : Aneka Ilmu
- Biro Pusat Statistik (BPS)
 1983 Kabupaten Sleman Dalam Angka 1983 , Sleman : BPS
- Biro Pusat Statistik (BPS)
 1987 Kabupaten Sleman Dalam Angka 1987 , Sleman : BPS
- Biro Pusat Statistik (BPS)
 1992 Kabupaten Sleman Dalam Angka 1992 , Sleman : BPS
- Laporan BPP
 1977 Sukses Organisasi , Jakarta : BPP

B. ARTIKEL

- Budiardjo, Miriam
 1981 " Partisipasi Dan Partai Politik: Suatu Pengantar " , dalam : Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi Dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai , Jakarta:Gramedia
- Dhakidae, Daniel
 1981 " Pemilihan Umum Di Indonesia Saksi Pasang Naik Dan

- Surut Partai Politik " , dalam: Prisma No. 9
- Feith, Herbert
 1981 " Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 : Suatu Pengantar " , dalam: Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi Dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Gramedia
- Imawan, Riswanda
 1992 " Peranan Organisasi Massa Dan Organisasi Politik " , dalam: Prisma No. 4
- Kaisiepo, Manuel
 1985 " Dilema Partai Demokrasi Indonesia : Perjuangan Mencari Identitas " , dalam: Seri Kumpulan Artikel Pilihan Prisma, Jakarta: LP3ES
- Soedjatmoko
 1956 " The Role Of Political Parties In Indonesia " , dalam: P.W.Thayer (ed), Nationalism And Progress In Free Asia , Baltimore : The John Hopkin Press
- Wuryandari, Ganewati
 1991 " Partai Demokrasi Indonesia Dan Pemilu 1992 " , dalam : Jurnal Ilmu Politik No. 9 , Jakarta: Gramedia

C. DOKUMEN

- Sekretaris Negara Republik Indonesia
 1981 30 Tahun Indonesia Merdeka, II, Jakarta: Tira Eustaka
- N.N
 _____ Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Undang Undang Partai Politik dan Golongan Karya, Yogyakarta: DPD PDI
- N.N
 1973 Dokumen Seleksi Partai Demokrasi Indonesia , Jakarta : DFP PDI
- N.N
 1973 Notulen Rapat Pembentukan DPD FDI DIY tanggal 4 Februari 1973 , Yogyakarta : DPD PDI

N.N

1973 Laporan Perkembangan PDI, Jakarta : DPP PDI

N.N

1983 Pandangan Umum Babak I FPDI DPRD TK II Sleman Terhadap RABD Kabupaten Sleman 1983 / 1984 , Sleman : DPRD

N.N

1987 Pandangan Umum Babak I FPDI DPRD TK II Sleman Terhadap RABD Kabupaten Sleman 1986 / 1987 , Sleman : DPRD

N.N

1987 Rekapitulasi Hasil Pemilu PDI Kabupaten Sleman 1982 - 1987 , Sleman : DPC PDI

N.N

1992 Pandangan Umum Babak I FPDI DPRD TK II Sleman Terhadap RABD Kabupaten Sleman 1991 / 1992 , Sleman : DPRD

N.N

1992 Penyelenggaraan Pemilu 1987 Dan 1992 DI Kabupaten Sleman , Sleman ; Panitia Pemilihan Daerah (PPD) TK II

D. MAJALAH, BULETIN DAN SURAT KABAR

Priema No.7 Agustus 1978

Editor No.37 / Thn. V / 30 Mei 1992

Varia Sleman, Edisi I 1992 / 1993

Tempo 28 Maret 1987

Jurnal Pemilu 1992 Kabupaten Sleman No. 32 dan No. 25

Kompas 6 Maret 1987

Bernas 12 Januari 1992

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DARTAR INFORMAN

1. Bpk. Satriyo Pidekso
Umur : 71 th
Jabatan : Ketua II DPC PDI Sleman 1974-1979
Anggota DPRD Sleman 1977-1982
Alamat : Gamping Kidul, RW. 16 RT. 5, Gamping
Sleman atau Jln. Wates Km. 4,5 Yogya-
karta
2. Bpk. Robertus Suprpto Siswosuardono
Umur : 70 th
Jabatan : Bendahara DPC PDI Sleman 1974-1984
Anggota DPRD Sleman 1982-1987
Alamat : Denggung, Tridadi, Sleman
3. Bpk. Suparmadi, BA
Umur : 59 th
Jabatan : Sekretaris II DPC PDI Sleman 1979-
1989
Anggota DPRD TK II Sleman 1982-1987
Alamat : Morangan, Triharjo, Sleman
4. Bpk. H. Herusetyo Efendi
Umur : 57 th
Jabatan : Bendahara DPC PDI Sleman 1984-1989
Anggota DPRD Sleman 1982-1992
Alamat : Tempel, Widodomartani, Ngemplak,
Sleman
5. Bpk. Drs. Suharto
Umur : 54 th

Jabatan : Wakil Sekretaris DPD PDI DIY periode
1989-1994

Anggota DPRD DIY 1992-1997

Anggota DPRD Sleman 1987-1992

Alamat : Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman

6. **Bpk. Sudiyo, BA**

Umur : 57 th

Jabatan : Anggota DPRD Sleman 1987-1992

Alamat : Sumber, Balecatur, Gamping, Sleman

7. **Bpk. Sutrisno**

Umur : 55 th

Jabatan : Ketua DPC PDI Sleman 1989-1994

Wakil Ketua III DPRD Sleman periode
1992-1997

Alamat : Karang Mloko, Sariharjo, Ngaglik ,
Sleman

8. **Bpk. R.Subarjono, BA**

Umur : 54 th

Jabatan : Ketua III DPC PDI Sleman 1989-1994

Anggota DPRD Sleman 1992-1997

Alamat : Blembem Kidul, Pakembinangun, Pakem
Sleman

9. **Bpk. Ngadiyono**

Umur : 52 th

Jabatan : Sekretaris I DPC PDI Sleman 1989-1994

Anggota DPRD Sleman 1992-1997

Alamat : Jagalan, Margoluwih, Seyegan, Sleman

10. Bpk. Yohanes Dwiyadi
Umur : 41 th
Jabatan : Ketua III DPC PDI Sleman 1989-1994
Anggota DPRD TK II Sleman 1992-1997
Alamat : Kebondalem, Madurejo, Prambanan, Sle-
man
11. Bpk. Herpurwanto, Bchk
Umur : 36 th
Jabatan : Sekretaris IV DPC PDI Sleman 1989-
1994
Anggota DPRD Sleman 1992-1997
Alamat : Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman
12. Bpk. Dwiswanto
Umur : 33 th
Jabatan : Anggota DPRD Sleman 1992-1997
Alamat : Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman
13. Bpk. Hardiman, BA
Umur : 47 th
Jabatan : Sekretaris III DPC PDI Sleman 1984-
1989
Anggota DPRD Sleman 1987-1992
Alamat : Kadisono, Kalitirto, Berbah, Sleman
14. Bpk. Sutardi, SH
Umur : 32 th
Jabatan : Komcam Ngemplak periode 1989-1994
Alamat : Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
15. Bpk. Muhadi HS
Umur : 45 th

Jabatan : Komdes Widodomartani 1989-1994
Alamat : Jetis, Widodomartani, Ngemplak ,
Sleman

16. Bpk. Drs. Sugito Harun

Umur : 42 th
Jabatan : Komcam Depok 1989-1994
Alamat : Mrican, Gang Surya I a CT, Depok,
Sleman

17. Bpk. Drs. Trinugroho

Umur : 35 th
Jabatan : Komcam Moyudan 1989-1994
Alamat : Nulisan, Sumberahayu, Moyudan, Sle-
man

18. Bpk. Arifin

Umur : 39 th
Jabatan : Anggota DPRD TK II Sleman 1992-1997
dari FPP
Alamat : Tegal Kertirejo, Selomartani , Kalasan
Sleman

19. Bpk. H. Wardhani

Umur : 56 th
Jabatan : Anggota DPRD TK II Sleman 1987-1992
dari FPP
Alamat : Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



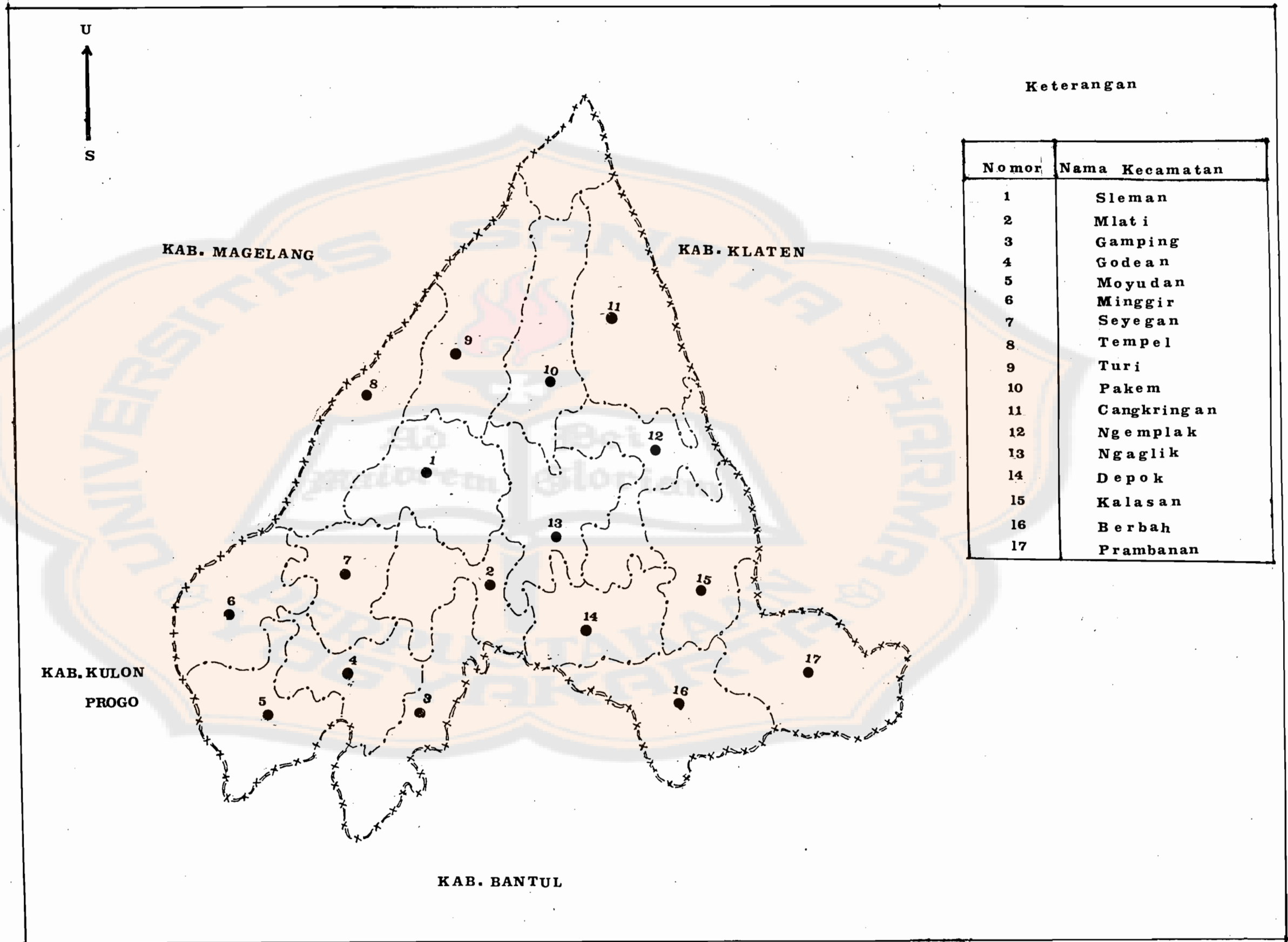
LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

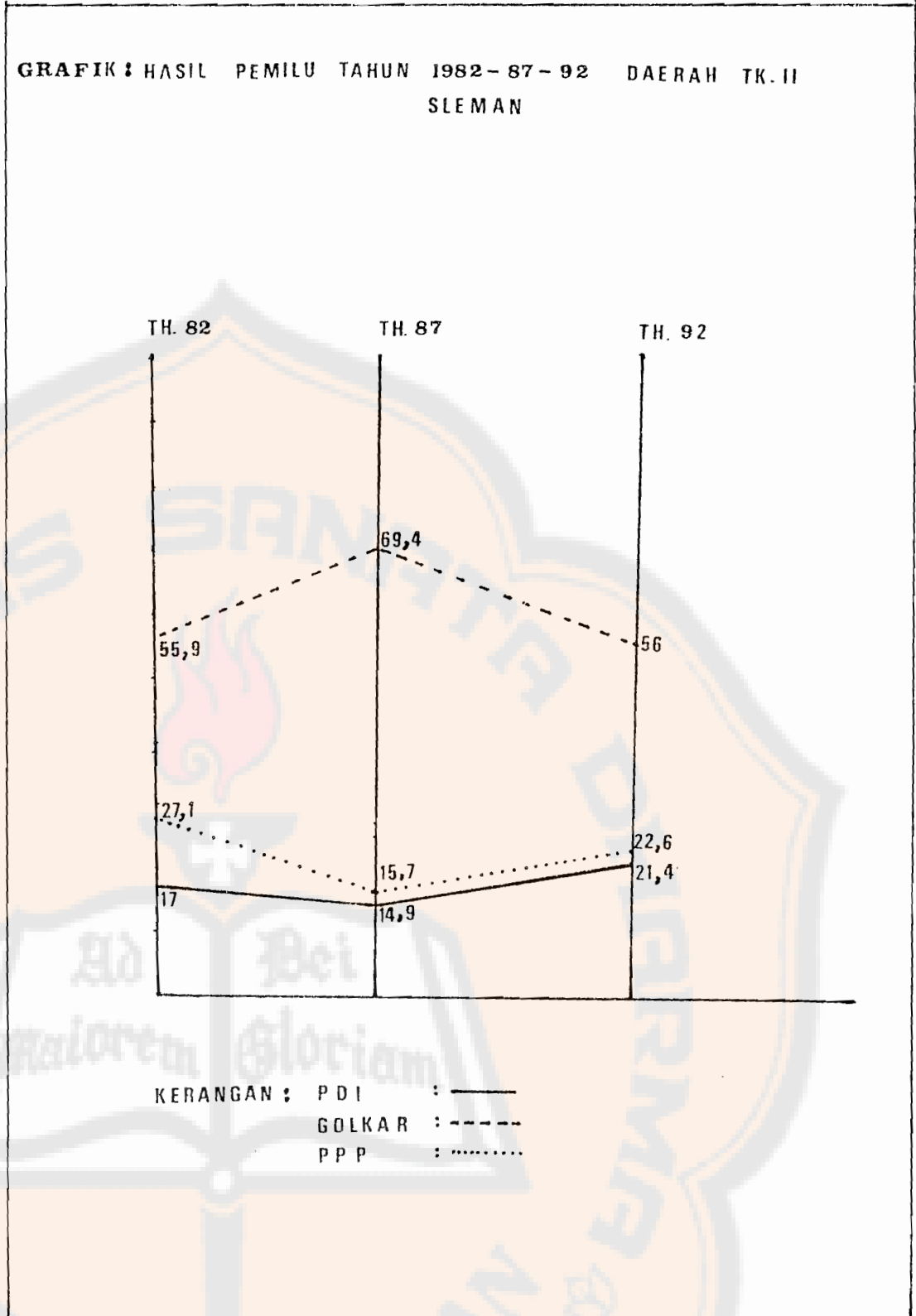
LAMPIRAN: I.

SKETSA PETA WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

SKALA 1 : 200.000



LAMPIRAN 2



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN: 5

PETA POLITIK PDI KABUPATEN SLEMAN

PADA PEMILU 1992

